

KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI JAWA BARAT

TRIWULAN III-2009

KANTOR BANK INDONESIA BANDUNG

Kantor Bank Indonesia Bandung
Jl. Braga No. 108
BANDUNG
Telp : 022 – 4230223
Fax : 022 – 4214326

Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

Misi Bank Indonesia

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

Nilai-nilai Strategis Bank Indonesia

Nilai-nilai yang menjadi dasar organisasi, manajemen dan pegawai untuk bertindak atau berperilaku yaitu kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas dan kebersamaan.

Visi Kantor Bank Indonesia Bandung

Menjadi Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya di daerah melalui peningkatan peran dalam menjalankan tugas-tugas Bank Indonesia yang diberikan.

Misi Kantor Bank Indonesia Bandung

Berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan pelaksanaan tugas bidang ekonomi moneter, sistem pembayaran, pengawasan bank serta memberikan saran kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya.

Tugas Pokok Bank Indonesia Bandung adalah sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kepada Kantor Pusat tentang kondisi ekonomi dan keuangan daerah di wilayah kerjanya;
2. Melaksanakan kegiatan operasional sistem pembayaran tunai dan/atau non tunai sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah di wilayah kerjanya;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap perbankan di wilayah kerjanya;
4. Memberikan saran kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan ekonomi daerah, yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil kajian yang akurat;
5. Mengelola sumber daya internal yang dibutuhkan sebagai faktor pendukung terlaksananya fungsi-fungsi utama.

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku “Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Barat Triwulan III-2009” ini akhirnya selesai disusun. Hasil kajian atas perkembangan ekonomi regional Provinsi Jawa Barat pada triwulan tersebut memberi gambaran bahwa setelah melambat selama tiga triwulan sebelumnya perekonomian Jawa Barat menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

Perekonomian Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan laju pertumbuhan, yakni dari 3,2% (yoy) pada triwulan II-2009 menjadi 3,6% pada triwulan III-2009. Dari sisi permintaan, peningkatan di seluruh komponen mendorong terjadinya pemulihan perekonomian Jawa Barat. Kondisi ini terutama disebabkan oleh kinerja ekspor yang mengalami perbaikan seiring dengan perbaikan perekonomian global, walaupun belum pulih sepenuhnya. Dari sisi penawaran, pertumbuhan di sektor industri pengolahan khususnya industri yang berorientasi ekspor, merupakan faktor penyebab utama membaiknya kinerja perekonomian Jawa Barat. Sementara dari sisi domestik, peningkatan konsumsi rumah tangga mampu menggerakkan sektor PHR. Di sisi lain, setelah tumbuh cukup tinggi pada triwulan sebelumnya sebagai akibat faktor iklim yang sangat kondusif, sektor pertanian pada triwulan III-2009 diperkirakan mengalami pertumbuhan yang melambat.

Sementara itu, inflasi Jawa Barat masih melanjutkan tren penurunan, yakni dari 3,13% (yoy) pada triwulan II-2009 menjadi 1,87% pada triwulan III-2009. Hal ini disebabkan oleh pelemahan tekanan eksternal melalui apresiasi nilai tukar, penurunan inflasi negara mitra dagang utama, dan harga komoditas strategis di pasar internasional, ekspektasi inflasi masyarakat yang membaik, pasokan bahan makanan yang relative terjaga, serta hilangnya pengaruh kenaikan harga BBM pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. Berbeda halnya dengan perkembangan inflasi tahunan, inflasi Jawa Barat secara triwulanan meningkat setelah sebelumnya mengalami deflasi 0,15% (qtq) menjadi 1,87% (qtq). Peningkatan laju inflasi pada periode laporan disebabkan oleh tekanan permintaan yang meningkat dan aksi ambil untung pedagang menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri serta kenaikan biaya pendidikan pada tahun ajaran baru sekolah. Namun demikian, faktor eksternal dapat menahan kenaikan laju inflasi lebih lanjut.

Di sisi pembiayaan perbankan, penyaluran kredit perbankan Jawa Barat pada triwulan III-2009 masih tetap tumbuh 17,25% (yoy) menjadi Rp97,15 triliun atau lebih lambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 22,51%. Perlambatan kredit tersebut diperkirakan sebagai akibat dari masih belum kuatnya permintaan kredit seiring dengan kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 20,12% (yoy) menjadi sebesar Rp128,57 triliun atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 19,80%. Jika dilihat dari jenis simpanannya, peningkatan pertumbuhan terjadi pada giro dan tabungan, sementara deposito mengalami pertumbuhan yang melambat. Kondisi ini diperkirakan sebagai akibat dari turunnya suku bunga deposito seiring dengan penurunan BI *rate*. Di sisi lain, risiko kredit bank umum

konvensional di Jawa Barat pada triwulan III-2009 menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Persentase jumlah kredit bermasalah kotor atau *Non Performing Loan* (NPL) *Gross* menurun dari 3,91% di triwulan II-2009 menjadi 3,81% pada triwulan III-2009. Selain itu, seiring dengan membaiknya prospek perekonomian dunia di tahun 2010, diperkirakan risiko kredit perbankan akan semakin terkendali.

Sementara itu, belanja pemerintah baik pusat maupun daerah di wilayah Jawa Barat diperkirakan dapat menjadi salah satu sumber pendorong pertumbuhan ekonomi. Kinerja realisasi keuangan daerah membaik pada triwulan laporan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya karena percepatan realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemberian bantuan bencana gempa, serta proyek pembangunan jalan dan jembatan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan rekening pemerintah daerah yang melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Dari sisi ketenagakerjaan, penambahan jumlah tenaga kerja yang di-PHK melambat sejalan dengan pemulihan perekonomian Jawa Barat pada triwulan III-2009. Selain itu, kesejahteraan petani mengalami peningkatan sebagaimana yang tercermin dari NTP Jawa Barat bulan September 2009 meningkat dari 0,57% (yoy) menjadi 1,61%. Peningkatan kesejahteraan petani terutama disebabkan oleh penurunan biaya yang harus dibayarkan petani pada hampir seluruh komponen indeks harga yang dibayar petani, kecuali sandang dan transportasi.

Uraian di atas merupakan hasil analisa kami terhadap berbagai data dan informasi, yang selain berasal dari Bank Indonesia, laporan perbankan, serta hasil-hasil survei yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Bandung, juga kami peroleh dari berbagai pihak, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dinas-dinas terkait, Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Pusat Statistik, Dinas Perhubungan, BULOG Divre III Jawa Barat, serta Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini, perkenankan kiranya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut yang telah membantu penyusunan buku ini.

Kami menyadari bahwa cakupan serta kualitas data dan informasi yang disajikan dalam buku ini masih perlu terus disempurnakan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak yang berkepentingan dengan buku ini. Kiranya kerjasama yang sangat baik dengan berbagai pihak selama ini dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridha-Nya dan melindungi setiap langkah kita.

Bandung, 3 November 2009 



Yang Ahmad Rizal
Pemimpin

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	x
Tabel Indikator Ekonomi Jawa Barat	xiii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB 1 KONDISI MAKRO EKONOMI REGIONAL	7
1. Sisi Permintaan	10
1.1. Konsumsi	10
1.2. Investasi	13
1.3. Ekspor-Impor	17
2. Sisi Penawaran	19
2.1. Sektor Pertanian	20
2.2. Sektor Industri Pengolahan	23
2.3. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	26
2.4. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	27
2.5. Sektor Bangunan / Konstruksi	27
2.6. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	28
2.7. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	30
2.8. Sektor Jasa-jasa	31
Boks 1. Hasil <i>Quick Survey</i> Arah Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat	32
Boks 2. Program-program Peningkatan Investasi di Jawa Barat	34
BAB 2 PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH	37
1. Perkembangan Inflasi	39
1.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa	40
Inflasi Tahunan	40
Inflasi Triwulan	41
a. Kelompok Bahan Makanan	42
b. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan tembakau	43
c. Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	44
1.2. Inflasi Menurut Kota	44
Inflasi Tahunan	44
Inflasi Triwulan	45
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Triwulanan	46
2.1. Fundamental	47
a. Eksternal	47
b. Ekspektasi Infalsi	49
c. Interaksi Permintaan dan Penawaran	50
2.2. Non Fundamental	51
a. Volatile Foods	51
b. Administered Price	52
Boks 3. Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi: Upaya Pengendalian Inflasi Pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri	54
Boks 4. Fenomena Harga Komoditas Hasil Peternakan	57
BAB 3 PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH	59
1. Struktur Perbankan di Jawa Barat	61
2. Bank Umum Konvensional	62
2.1. Pendanaan dan Risiko Likuiditas	62
Perkembangan Dana Pihak Ketiga	62
Ekses Likuiditas	64
2.2. Perkembangan Kredit dan Risikonya	64

	Perkembangan Kredit	64
	Kredit Mikro, Kecil dan Menengah (MKM)	67
	Kredit dengan Lokasi Proyek di Jawa Barat	67
	Risiko Kredit	69
	2.3. Risiko Pasar	71
	3. Bank Umum Syariah.....	72
	4. Bank Umum yang Berkantor Pusat di Jawa Barat.....	73
	5. Bank Perkreditan Rakyat	74
	Boks 5. Dampak Gempa Bumi Tasikmalaya Terhadap Perbankan di Jawa Barat.....	75
BAB 4	KEUANGAN DAERAH.....	77
	1. Pendapatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di Jawa Barat.....	79
	1.1. Pendapatan Pemerintah Pusat di Daerah.....	80
	1.2. Pendapatan Pemerintah Provinsi	80
	Pendapatan Asli Daerah.....	81
	Dana Perimbangan.....	82
	2. Belanja Daerah.....	82
	2.1. Belanja APBN di Jawa Barat	83
	Belanja Dana Dekonsentrasi.....	83
	Belanja Dana Tugas Pembantuan.....	84
	Belanja APBN yang Berasal dari Utang Luar Negeri.....	85
	2.2. Belanja APBD Provinsi Jawa Barat	86
	3. Rekening Milik Pemerintah Daerah di Bank Umum.....	87
	4. APBD – Perubahan 2009.....	88
	Boks 6. Realisasi Stimulus Infrastruktur Tahun 2009	90
BAB 5	PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN	91
	1. Pengedaran Uang Kartal.....	93
	1.1. Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (<i>Inflow/Outflow</i>)	93
	1.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar	95
	1.3. Uang Palsu.....	95
	2. Sistem Pembayaran Non Tunai.....	96
	2.1 Kliring Lokal.....	96
	2.2 <i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS).....	96
BAB 6	PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH.....	97
	1. Ketenagakerjaan	99
	Keadaan Ketenagakerjaan Jawa Barat	99
	2. Kesejahteraan.....	100
	Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan	100
	Kesejahteraan Petani	101
BAB 7	PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	103
	1. Prospek Ekonomi Makro.....	105
	2. Prakiraan Inflasi	106
	Faktor Fundamental	107
	Faktor Non Fundamental	108
	LAMPIRAN.....	109
	DAFTAR ISTILAH	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (yoy) Provinsi Jawa Barat Dari Sisi Permintaan (%)	10
Tabel 1.2.	Nilai Realisasi Investasi di Jawa Barat Menurut Sektor Usaha Hingga Triwulan III-2009 (Rp Miliar).....	15
Tabel 1.3.	Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Provinsi Jawa Barat dari Sisi Penawaran.....	20
Tabel 1.4.	Pencapaian Realisasi Areal Tanam, Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Jawa Barat Tahun 2009.....	22
Tabel 1.5.	Indikator Perhotelan di Jawa Barat.....	26
Tabel 1.6.	Nilai Tambah Bank Umum di Jawa Barat (Rp Miliar).....	27
Tabel 1.7.	Perkembangan Persewaan Bangunan.....	27
Tabel 1.8.	Perkembangan Properti Komersial.....	28
Tabel 1.9.	Jumlah Kendaraan yang Melintasi 12 Gerbang Tol di Jawa Barat.....	29
Tabel 1.10.	Pemakaian Listrik di Jawa Barat (Juta Kwh).....	30
Tabel 2.1.	Inflasi Tahunan Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%).....	41
Tabel 2.2.	Inflasi Triwulanan di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%).....	42
Tabel 2.3.	Inflasi Tahunan di Jawa Barat Menurut Kota (%).....	45
Tabel 2.4.	Inflasi Triwulanan Jawa Barat Menurut Kota (%).....	45
Tabel 2.5.	Inflasi Triwulanan di Jawa Barat Menurut Kota & Kelompok Barang dan Jasa Triwulan II-2009 (qtq, %).....	46
Tabel 2.6.	Inflasi Triwulan Menurut Faktor Penyebab (qtq, %).....	47
Tabel 2.7.	Perkembangan Harga Lelang dan Eceran Gula Pasir.....	48
Tabel 2.8.	Perbandingan Tarif Tol Lama dan baru.....	52
Tabel 3.1.	Jumlah Kredit Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Triwulan II-2009.....	67
Tabel 3.2.	NPL Gross Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/ Kota.....	71
Tabel 4.1.	Perkembangan Pendapatan Pemerintah Povinsi Jawa Barat.....	81
Tabel 4.2.	Perkembangan Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi Jawa Barat.....	81
Tabel 4.3.	Realisasi Dana Dekonsentrasi Jawa Barat di Lima Dinas	83
Tabel 4.4.	Realisasi Dana Tugas Pembantuan Jawa Barat di Lima Dinas.....	84
Tabel 4.5.	Perkembangan Belanja yang Berasal dari Utang Luar Negeri	85
Tabel 4.6.	Realisasi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Rp Miliar).....	87
Tabel 4.7.	Perkembangan Pertumbuhan Rekening Milik Pemerintah Daerah di Jawa Barat Menurut Jenis Rekening (yoy, %).....	88
Tabel 4.8.	Perkembangan Pertumbuhan Rekening Milik Pemerintah Daerah di Jawa Barat Menurut Lokasi Rekening (yoy, %)	88
Tabel 4.9.	APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2009.....	89
Tabel 5.1.	Perkembangan <i>Outflow</i> Uang Kertas dan Uang Logam melalui KBI Bandung.	94
Tabel 5.2.	Perkembangan Transaksi Kliring Lokal Rata-rata per Bulan di Jawa Barat	96
Tabel 5.3.	Perkembangan Transaksi RTGS di Jawa Barat	96
Tabel 6.1.	Nilai Tukar Petani di Jawa Barat Bulan Juni dan September 2009 (2007=100).....	101

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat	9
Grafik 1.2.	Indeks Keyakinan Konsumen	11
Grafik 1.3.	Komponen Indeks Ekspektasi	11
Grafik 1.4.	Komponen Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini.....	11
Grafik 1.5.	Indeks Riil Penjualan.....	12
Grafik 1.6.	Impor Barang Konsumsi Jawa Barat.....	12
Grafik 1.7.	Posisi Simpanan Perorangan di Bank Umum di Jawa Barat	12
Grafik 1.8.	Posisi Baki Debet Kredit Konsumsi Bank Umum di Jawa Barat	13
Grafik 1.9.	Angka Persetujuan Plafon Kredit Baru untuk Penggunaan Konsumsi oleh Bank Umum di Jawa Barat	13
Grafik 1.10.	Realisasi Investasi di Jawa Barat Berdasarkan Nilai Proyek	14
Grafik 1.11.	Realisasi Investasi di Jawa Barat Berdasarkan Jumlah Proyek.....	14
Grafik 1.12.	Porsi Realisasi Investasi Berdasarkan Nilai Investasi.....	14
Grafik 1.13.	Porsi Realisasi Investasi Berdasarkan Jumlah Proyek.....	14
Grafik 1.14.	Distribusi Realisasi Investasi Berdasarkan Wilayah Dati II di Jawa Barat Periode Januari s.d September 2009.....	15
Grafik 1.15.	Penjualan Semen di Jawa Barat.....	16
Grafik 1.16.	Impor Barang Modal	16
Grafik 1.17.	Posisi Penyaluran Kredit investasi oleh Bank Umum di Jawa Barat.....	17
Grafik 1.18.	Angka Persetujuan Plafon Kredit Baru untuk Penggunaan Investasi oleh Bank Umum di Jawa Barat	17
Grafik 1.19.	Nilai Ekspor Jawa Barat.....	17
Grafik 1.20.	Volume Ekspor Jawa Barat.....	18
Grafik 1.21.	Nilai dan Volume Ekspor Mesin Elektrik.....	18
Grafik 1.22.	Nilai dan Volume Ekspor Alat Telekomunikasi.....	18
Grafik 1.23.	Nilai dan Volume Ekspor Tekstil dan Produk tekstil.....	18
Grafik 1.24.	Volume ekspor Jawa Barat Berdasarkan Negara Pembeli.....	19
Grafik 1.25.	Nilai Impor Jawa Barat	19
Grafik 1.26.	Volume Impor Jawa Barat.....	19
Grafik 1.27.	Produksi padi Sawah dan Ladang di Jawa Barat	21
Grafik 1.28.	Luas Panen Padi Sawah dan Ladang di Jawa Barat.....	21
Grafik 1.29.	Luas Panen Padi Jawa Barat.....	21
Grafik 1.30.	Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Pertanian	22
Grafik 1.31.	Saldo Bersih Tertimbang Realisasi Kegiatan Usaha di Jawa Barat.....	23
Grafik 1.32.	Kapasitas Produksi Dunia Usaha di Jawa Barat	23
Grafik 1.33.	Penjualan Motor Nasional.....	24
Grafik 1.34.	Penjualan Mobil Nasional.....	24
Grafik 1.35.	Volume Ekspor Kendaraan	24
Grafik 1.36.	Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Industri Pengolahan.....	25
Grafik 1.37.	Indeks Riil penjualan Eceran.....	26
Grafik 1.38.	Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran.....	26
Grafik 1.39.	Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Konstruksi.....	28
Grafik 1.40.	Jumlah Penumpang Domestik dan Internasional di Bandara Husein Sastranegara.....	28
Grafik 1.41.	Jumlah Angkutan Lebaran Total dan Angkutan Jalan untuk Keperluan Lebaran di Jawa Barat.....	29
Grafik 1.42.	Jumlah Kereta, Angkutan Sungai, Danau dan Perairan, dan Angkutan Udara untuk Keperluan lebaran di Jawa Barat.....	29
Grafik 1.43.	Penyaluran Kredit oleh Bank Umum ke Sektor Pengangkutan dan Komunikasi.....	30
Grafik 1.44.	Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih....	30
Grafik 1.45.	Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Jasa Dunia Usaha dan Sosial.	31
Grafik 2.1.	Inflasi Tahunan Jawa Barat dan Nasional.....	39
Grafik 2.2.	Inflasi Triwulanan Jawa Barat dan Nasional	39

Grafik 2.3.	Inflasi Bulanan Jawa Barat dan Nasional	40
Grafik 2.4.	Inflasi Tahunan dan Andil Inflasi Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa Triwulan III-2009.....	41
Grafik 2.5.	Inflasi dan Andil Inflasi Triwulanan Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa Triwulan III-2009.....	42
Grafik 2.6.	Inflasi Triwulan Kelompok bahan Makanan di Jawa Barat.....	43
Grafik 2.7.	Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan III-2009.....	43
Grafik 2.8.	Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi di Jawa Barat.....	43
Grafik 2.9.	Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan III-2009.....	43
Grafik 2.10.	Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga di Jawa Barat.....	44
Grafik 2.11.	Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan III-2009.....	44
Grafik 2.12.	Laju Inflasi di Negara Mitra Dagang.....	47
Grafik 2.13.	Perkembangan Kurs Rupiah.....	47
Grafik 2.14.	Perkembangan Harga Komoditas Strategis di Pasar Internasional.....	48
Grafik 2.15.	Perkembangan Harga Barang dan Jasa Menurut Pengusaha di Jawa Barat.....	49
Grafik 2.16.	Ekspektasi Pedagang Eceran Terhadap Harga Barang dan Jasa di Kota Bandung.....	49
Grafik 2.17.	Ekspektasi Konsumen terhadap Harga Barang dan Jasa di Kota Bandung.....	50
Grafik 2.18.	Kapasitas Terpakai di Jawa Barat.....	50
Grafik 2.19.	Perkembangan Harga Beberapa Komoditas Pada Subkelompok Daging-dagingan.....	51
Grafik 2.20.	Perkembangan Harga Beberapa Komoditas Pada Subkelompok Sayur-sayuran.....	51
Grafik 2.21.	Perkembangan Harga Beberapa Komoditas pada Subkelompok Bumbu-bumbuan	51
Grafik 2.22.	Pergerakan Harga Gas di Pasar Internasional.....	53
Grafik 3.1.	Komposisi Aset Perbankan di Jawa Barat Triwulan III-2009	61
Grafik 3.2.	Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Umum Konvensional di Jawa Barat berdasarkan Jenis Simpanan.....	62
Grafik 3.3.	Perkembangan DPK Bank Umum Konvensional di Jawa Barat berdasarkan Jenis Valuta ...	63
Grafik 3.4.	Perkembangan DPK Valuta Asing & Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD	63
Grafik 3.5.	Perkembangan DPK Bank Umum Konvensional di Jawa Barat berdasarkan Kelompok Bank	63
Grafik 3.6.	DPK Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Triwulan III-2009 berdasarkan Golongan Kepemilikan	63
Grafik 3.7.	Perkembangan SBI Bank Umum Konvensional di Jawa Barat dan SBI Perbankan Nasional.....	64
Grafik 3.8.	Perkembangan Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat	64
Grafik 3.9.	Perkembangan Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan.....	65
Grafik 3.10.	Perkembangan Pertumbuhan Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan.....	65
Grafik 3.11.	Pangsa Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Sektor Ekonomi Triwulan III-2009.....	65
Grafik 3.12.	Perkembangan Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Bank.....	66
Grafik 3.13.	Perkembangan Pertumbuhan Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Bank.....	66
Grafik 3.14.	Perkembangan Persetujuan Plafon Kredit Baru Bank Umum Konvensional di Jawa Barat .	66
Grafik 3.15.	Perkembangan Kredit MKM Berdasarkan Skala Usaha	68
Grafik 3.16.	Perkembangan Kredit MKM Berdasarkan Jenis Penggunaan.....	68
Grafik 3.17.	Perkembangan Kredit Lokasi Proyek dan Kredit Bank Pelapor.....	68
Grafik 3.18.	Perkembangan Jumlah Kredit Bermasalah Bank Umum Konvensional di Jawa Barat.....	69
Grafik 3.19.	Perkembangan NPL Gross Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Bank.....	69
Grafik 3.20.	Perkembangan NPL Gross Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan	70

Grafik 3.21.	Perkembangan NPL Gross Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Beberapa Sektor Ekonomi Utama.....	70
Grafik 3.22.	Perkembangan NPL Gross Kredit MKM dan Total Kredit.....	71
Grafik 3.23.	Perkembangan Bank Umum Syariah Di Jawa Barat.....	72
Grafik 3.24.	Perkembangan Indikator Bank yang Berkantor Pusat di Jawa Barat.....	73
Grafik 3.25.	Perkembangan Indikator BPR Konvensional di Provinsi Jawa Barat.....	74
Grafik 4.1.	<i>Tax Ratio</i> dan Total Penerimaan Pajak di Provinsi Jawa Barat	79
Grafik 4.2.	Perkembangan Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat.....	80
Grafik 4.3.	Perkembangan Retribusi dan Pengelolaan Kekayaan Daerah (PKD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat	82
Grafik 4.4.	Perkembangan Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.....	82
Grafik 4.5.	Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat dari Utang Luar Negeri.....	85
Grafik 4.6.	Perkembangan Rekening Milik Pemerintah Daerah di Jawa Barat.....	87
Grafik 5.1.	Perkembangan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i> Uang Kartal di Jawa Barat	94
Grafik 5.2.	Perkembangan PTTB Kantor Bank Indonesia Bandung.....	95
Grafik 6.1.	Saldo Bersih Tertimbang Indikator Jumlah Karyawan.....	100
Grafik 7.1.	Ekspektasi Kegiatan Dunia Usaha.....	105
Grafik 7.2.	Perkembangan dan Prakiraan Inflasi Jawa Barat Tahun 2009.....	106
Grafik 7.3.	<i>Up Side & Down Side Risk</i> Proyeksi Inflasi Triwulanan Jawa Barat pada Triwulan IV-2009.....	107
Grafik 7.4.	Ekspektasi Konsumen Terhadap Harga Barang dan Jasa di Kota Bandung.....	107
Grafik 7.5.	Luas Lahan Panen Padi.....	108

TABEL INDIKATOR EKONOMI JAWA BARAT

I. MAKRO

INDIKATOR	2008			2009		
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III
PDRB - harga konstan (Rp Miliar)*	71.012	74.384	74.020	72.980	73.500	77.031
- Pertanian	8.227	9.053	8.096	11.380	9.080	9.488
- Pertambangan & Penggalian	1.530	1.730	1.719	1.720	1.780	1.799
- Industri Pengolahan	33.487	34.264	35.083	31.590	32.940	34.495
- Listrik, Gas, dan Air Bersih	1.476	1.492	1.536	1.580	1.640	1.670
- Bangunan	2.269	2.620	2.603	2.330	2.460	2.882
- Perdagangan, Hotel, dan Restoran	14.038	14.826	14.711	14.250	15.000	15.867
- Pengangkutan dan Komunikasi	3.050	3.154	3.098	3.180	3.390	3.515
- Keuangan, Persewaan, dan Jasa	2.255	2.425	2.309	2.140	2.350	2.437
- Jasa	4.680	4.827	4.879	4.820	4.870	4.878
Pertumbuhan PDRB (yoy %)	4,2	6,8	4,5	4,4	3,2	3,6
Ekspor-Impor**	2.140,62	3.143,58	2.430,58	2.967,76	3.119,55	2.680,01
Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)	5.040,62	5.505,69	5.057,99	4.063,09	4.681,69	3.528,38
Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton)	1.925,68	2.007,70	1.767,00	1.434,01	1.921,40	1.261,63
Nilai Impor Nonmigas (USD Juta)	2.900,00	2.362,11	2.627,41	1.095,33	1.562,14	848,37
Volume Impor Nonmigas (ribu ton)	789,00	448,87	621,75	193,08	246,97	158,63
Indeks Harga Konsumen***	167,71	113,37	113,54	113,54	113,37	115,49
- Kota Bandung	171,84	112,78	112,70	112,82	112,66	114,51
- Kota Bekasi	163,95	112,68	112,71	118,25	112,43	114,41
- Kota Bogor	167,13	115,47	116,00	116,92	116,60	118,60
- Kota Sukabumi	161,74	112,83	114,32	116,23	116,64	118,10
- Kota Cirebon	161,94	116,96	117,18	118,25	118,30	121,25
- Kota Tasikmalaya	177,24	113,68	115,07	115,97	117,23	118,51
- Kota Depok	NA	113,70	113,91	112,92	112,69	115,43
Laju Inflasi Tahunan (yoy %)***	11,83	12,30	11,11	7,45	3,13	1,87
- Kota Bandung	13,52	10,31	10,23	6,31	2,17	1,61
- Kota Bekasi	11,17	10,07	10,10	6,68	3,59	1,51
- Kota Bogor	9,61	13,67	14,20	6,17	2,57	2,24
- Kota Sukabumi	12,03	9,94	11,39	8,25	3,38	3,31
- Kota Cirebon	13,19	13,93	14,14	8,22	5,23	3,47
- Kota Tasikmalaya	11,53	10,71	12,07	9,18	6,91	2,99
- Kota Depok	N/A	11,49	11,70	N/A	6,87	1,33

Keterangan:

* Proyeksi KBI Bandung

** Data Ekspor-Impor Triwulan III-2009 adalah data bulan Juli s.d. Agustus 2009

** Data IHK Triwulan II-2008 hingga Triwulan II-2009 menggunakan Tahun Dasar 2007

II. PERBANKAN

No	Indikator	2008				2009		
		Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III
A Bank Umum								
1	Total Aset (Rp Triliun)	133,59	139,72	145,03	154,91	162,80	170,85	176,01
2	DPK (Rp Triliun)	101,76	105,98	107,03	117,76	123,03	126,97	128,57
	- Tabungan (Rp Triliun)	36,58	39,44	39,94	42,09	41,63	45,06	46,66
	- Giro (Rp Triliun)	22,25	23,01	21,88	22,99	27,48	27,61	27,68
	- Deposito (Rp Triliun)	42,93	43,53	45,22	52,68	53,91	54,31	54,24
3	Kredit (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi proyek*)	127,22	140,15	151,22	161,93	167,13	171,39	174,18
	- Investasi	19,39	20,79	22,68	25,01	24,28	24,25	24,75
	- Modal Kerja	58,13	65,04	70,37	77,04	79,79	81,36	81,30
	- Konsumsi	49,70	54,32	58,18	59,87	63,06	65,77	68,13
4	Kredit (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi kantor cabang	70,98	77,92	82,86	87,35	87,58	95,46	97,15
	- Modal Kerja	30,36	34,31	36,97	39,95	39,39	44,00	44,23
	- Investasi	7,39	8,08	8,69	9,22	9,18	9,50	9,65
	- Konsumsi	33,22	35,53	37,20	38,18	39,02	41,96	43,28
5	- LDR (%)	69,75	73,52	77,42	74,18	71,19	75,18	75,56
6	Rasio NPL Gross (%)	3,78	3,63	3,57	3,52	3,99	3,91	3,81
7	Rasio NPL Net (%)	2,06	1,72	1,5	1,43	1,63	1,60	1,57
8	Kredit MKM (triliun Rp)	55,82	60,77	63,85	65,27	66,18	71,97	73,47
9	Kredit Mikro (< Rp50 juta) (triliun Rp)	24,18	25,26	26,28	26,14	26,49	28,42	29,11
	- Kredit Modal Kerja	3,27	3,76	4,22	4,21	4,48	5,26	5,22
	- Kredit Investasi	0,41	0,48	0,45	0,45	0,46	0,56	0,58
	- Kredit Konsumsi	20,50	21,02	21,61	21,47	21,56	22,60	23,31
10	Kredit Kecil (Rp50 juta s.d. Rp 500 juta) (triliun Rp)	16,38	18,61	20,19	21,33	22,04	24,97	25,66
	- Kredit Modal Kerja	5,31	5,87	6,25	6,36	6,39	6,85	6,94
	- Kredit Investasi	0,82	0,88	0,96	0,98	0,99	1,15	1,21
	- Kredit Konsumsi	10,25	11,85	12,98	13,99	14,66	16,97	17,51
11	Kredit Menengah (Rp500 juta s.d.Rp5 miliar) (triliun Rp)	15,26	16,90	17,37	17,81	17,65	18,57	18,70
	- Kredit Modal Kerja	10,84	12,07	12,38	12,76	12,66	13,46	13,52
	- Kredit Investasi	2,22	2,46	2,66	2,73	2,73	2,83	2,85
	- Kredit Konsumsi	2,20	2,38	2,33	2,31	2,26	2,28	2,32
12	Total Kredit MKM (triliun Rp)	55,82	60,77	63,85	65,27	66,18	71,97	73,47
13	Rasio NPL MKM gross (%)	3,71	3,55	3,32	3,06	3,69	3,62	3,56
B Bank Umum Syariah*)								
1	Total Aset (Rp Triliun)	4,05	4,73	4,91	5,52	5,20	5,66	5,61
2	DPK (Rp Triliun)	3,19	3,73	3,65	3,97	4,03	4,49	4,38
	- Giro (Rp Triliun)	0,26	0,44	0,32	0,38	0,33	0,34	0,33
	- Deposito (Rp Triliun)	1,47	1,62	1,63	1,82	1,87	1,90	2,13
	- Tabungan (Rp Triliun)	1,46	1,66	1,71	1,79	1,89	2,25	1,93
3	Pembiayaan (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi kantor cabang	2,95	3,07	3,37	3,43	3,41	3,53	3,72
	- Modal Kerja	1,67	1,75	1,86	1,81	1,86	1,89	2,01
	- Investasi	0,57	0,52	0,57	0,61	0,54	0,55	0,55
	- Konsumsi	0,75	0,80	0,93	1,00	1,01	1,09	1,16
4	- FDR	92,34	82,28	92,21	86,26	86,26	78,50	84,83
C BPR Konvensional*)								
1	Total Aset (Rp Triliun)	5,00	5,29	5,71	5,86	6,21	6,49	6,67
2	DPK (Rp Triliun)	3,52	3,64	3,88	4,03	4,40	4,62	4,77
	- Tabungan (Rp Triliun)	0,78	0,83	0,79	0,90	0,96	1,03	1,06
	- Deposito (Rp Triliun)	2,74	2,81	3,09	3,13	3,44	3,59	3,72
3	Kredit (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi proyek	3,68	4,07	4,43	4,40	4,49	4,59	4,71
	- Modal Kerja	2,06	2,22	2,46	2,43	2,42	2,45	2,48
	- Investasi	0,15	0,15	0,16	0,15	0,14	0,14	0,14
	- Konsumsi	1,47	1,70	1,80	1,82	1,93	2,00	2,08
4	Kredit MKM (triliun Rp)	3,68	4,07	4,43	4,40	4,49	4,59	4,71

*) Posisi Agustus 2009

III. SISTEM PEMBAYARAN

Indikator	2008				2009		
	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III
Transaksi Tunai							
Posisi Kas Gabungan (Rp Triliun)	3,66	1,90	0,95	3,11	5,77	7,42	6,65
Inflow (Rp Triliun)	1,43	2,72	4,75	5,68	7,02	3,34	3,71
Outflow (Rp Triliun)	3,66	1,54	3,75	2,03	0,81	2,01	3,14
Pemusnahan Uang (Jutaan lembar/keping)	146,69	127,22	114,05	155,88	118,24	76,42	178,98
Transaksi Non Tunai							
BI-RTGS							
Nominal Transaksi BI-RTGS (Rp Triliun)	155,09	143,79	140,44	156,30	130,57	138,64	159,53
Volume Transaksi BI-RTGS	198.876	188.469	164.434	217.398	188.863	196.533	232.945
Rata-rata Harian Nominal Transaksi BI-RTGS (Rp Triliun)	2,63	2,44	2,27	2,69	2,18	2,24	2,57
Rata-rata Harian Volume Transaksi BI-RTGS	3.371	3.194	2.652	3.748	3.148	3.170	3.757
Kliring							
Nominal Perputaran Kliring (triliun Rp)	9,60	10,23	11,48	10,93	9,94	10,38	10,64
Volume Perputaran Kliring	506.234	516.866	544.327	479.764	504.311	476.875	484.106
Rata-rata Harian Nominal Perputaran Kliring (triliun Rp)	0,16	0,16	0,19	0,19	0,17	0,17	0,17
Rata-rata Harian Volume Perputaran Kliring	8.580	8.204	8.779	8.272	8.405	7.692	7.808

Halaman ini sengaja dikosongkan

RINGKASAN EKSEKUTIF



PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Ekonomi Jawa Barat triwulan III-2009 diperkirakan tumbuh 3,6% (yoy).

Kinerja perekonomian Jawa Barat pada triwulan III-2009 dirasakan semakin menguat dan menunjukkan tren pemulihan. Setelah tumbuh melambat selama tiga triwulan sebelumnya, pada triwulan III-2009 pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 3,6% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 3,2%.

Dari sisi permintaan, perbaikan di seluruh komponen mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

Dari sisi permintaan, perbaikan di seluruh komponen mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan III-2009. Konsumsi rumah tangga masih tumbuh cukup tinggi, akibat lonjakan konsumsi menjelang hari besar keagamaan, terjaganya daya beli masyarakat dan melambatnya penambahan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Investasi juga diperkirakan membaik, didorong oleh peningkatan permintaan dan optimisme pelaku usaha, serta terjaganya kondisi ekonomi-politik yang kondusif pasca Pemilu. Demikian juga halnya dengan kinerja ekspor yang mengalami perbaikan seiring dengan peningkatan permintaan dari negara-negara mitra dagang seiring perbaikan perekonomian global, walaupun belum pulih seperti periode sebelum krisis.

Dari sisi penawaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan dan PHR.

Dari sisi penawaran, peningkatan kinerja di dua sektor ekonomi dominan di Jawa Barat, yaitu industri pengolahan serta perdagangan, hotel, dan restoran (PHR), diperkirakan mendorong perbaikan perekonomian Jawa Barat pada triwulan laporan. Setelah mengalami kontraksi pada triwulan sebelumnya, industri pengolahan diperkirakan tumbuh positif pada triwulan III-2009. Peningkatan permintaan terhadap produk industri pengolahan Jawa Barat, khususnya yang berorientasi ekspor, memicu perbaikan kinerja di sektor tersebut, yang tercermin dari peningkatan utilisasi kapasitas produksi. Sementara dari sisi domestik, peningkatan konsumsi rumah tangga mampu menggerakkan sektor PHR. Di sisi lain, setelah tumbuh cukup tinggi pada triwulan sebelumnya sebagai akibat faktor iklim yang sangat kondusif, sektor pertanian pada triwulan III-2009 diperkirakan mengalami pertumbuhan yang melambat.

PERKEMBANGAN INFLASI

Tren penurunan laju inflasi tahunan Jawa Barat pada triwulan III-2009 masih berlanjut

Secara tahunan, laju Inflasi Jawa Barat kembali melambat secara tajam dari 3,14% pada triwulan II-2009 menjadi 1,87% (yoy) pada triwulan III-2009. Secara triwulanan, laju inflasi menunjukkan arah pergerakan yang berbeda. Jika pada triwulan II-2009 tercatat deflasi sebesar 0,15%, pada triwulan III-2009 tercatat inflasi sebesar 1,87% (qtq).

Secara tahunan, baik sisi fundamental maupun non fundamental menjadi penyebab penurunan laju inflasi Jawa Barat.

Perlambatan laju inflasi tahunan di Jawa Barat disebabkan oleh tekanan eksternal yang melemah, ekspektasi inflasi masyarakat yang membaik, relatif kecilnya pengaruh kebijakan pemerintah terhadap harga, serta minimalnya tekanan dari sisi permintaan. Rendahnya pengaruh eksternal tercermin dari nilai tukar rupiah yang terapresiasi, harga komoditas strategis di pasar internasional yang turun, dan laju inflasi negara mitra dagang utama yang relatif rendah. Sebagai akibat perlambatan perekonomian global, inflasi dari sisi ekspektasi maupun permintaan relatif rendah. Sementara, kebijakan pemerintah berupa kenaikan harga gas elpiji bersubsidi dan tarif beberapa ruas tol, tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kenaikan harga barang dan jasa.

Secara triwulanan, peningkatan tekanan inflasi inti (ekspektasi dan interaksi permintaan-penawaran) dan volatile foods merupakan faktor utama pendorong kenaikan laju inflasi Jawa Barat

Sementara, secara triwulanan, kenaikan laju inflasi triwulanan di Jawa Barat pada periode laporan terjadi pada sebagian besar kelompok barang dan jasa. Inflasi kelompok bahan makanan serta kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau lebih disebabkan bukan hanya oleh meningkatnya permintaan, namun juga terkait dengan aksi ambil untung para pedagang di saat bulan puasa dan hari raya Idul Fitri. Sementara, inflasi kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga meningkat karena kenaikan biaya pendidikan saat tahun ajaran baru. Di lain pihak, kondisi eksternal yang relatif stabil dan apresiasi nilai tukar rupiah menyebabkan laju inflasi relatif tertahan.

PERKEMBANGAN PERBANKAN

Perkembangan perbankan di Jawa Barat masih tumbuh melambat.

Secara umum perkembangan perbankan di Jawa Barat pada triwulan III-2009 masih mengalami perlambatan. Hal ini terlihat dari berbagai indikator seperti aset dan *outstanding* kredit, yang secara tahunan (yoy) tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sedikit lebih tinggi. Sementara itu, secara triwulanan (qtq) baik aset, *outstanding* kredit maupun DPK mengalami perlambatan. Pada triwulan III-2009 kredit tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK sehingga *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan di Jawa Barat masih mengalami sedikit peningkatan. Di sisi lain, risiko kredit masih dalam batas yang relatif aman. Hal ini terlihat dari persentase jumlah kredit bermasalah yang mengalami penurunan. Sementara itu, eksekusi likuiditas berupa penempatan bank pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh perbankan di Jawa Barat mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Aset perbankan Jawa Barat tumbuh 2,74% (qtq) atau 21,48% (yoy).

Pada triwulan III-2009, aset perbankan di Jawa Barat tumbuh 2,89% (qtq) atau 20,97% (yoy) menjadi Rp182,54 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,02% (qtq) atau 22,21% (yoy), sebagai akibat melambatnya pertumbuhan kredit yang disalurkan. Jika dibandingkan dengan nasional, aset perbankan di Jawa Barat memiliki pangsa sebesar 7,9%.

DPK bank umum konvensional masih tumbuh cukup tinggi

Secara tahunan tren pertumbuhan DPK relatif cukup tinggi. Pada triwulan III-2009, DPK tumbuh 20,12% (yoy) menjadi sebesar Rp128,57 triliun atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 19,80%. Jika dilihat dari jenis simpanannya, peningkatan pertumbuhan terjadi pada giro dan tabungan, sementara deposito mengalami pertumbuhan yang melambat. Hal ini diperkirakan sebagai akibat dari turunnya suku bunga deposito seiring dengan penurunan BI *rate*. Sejalan dengan hal tersebut, pangsa deposito pada triwulan III-2009 semakin menurun menjadi 42,18% dari 42,77% pada triwulan sebelumnya.

Kredit yang disalurkan tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya

Sebagaimana pada dua triwulan sebelumnya, pertumbuhan kredit pada triwulan III-2009 masih mengalami tren perlambatan. *Outstanding* kredit yang disalurkan sampai dengan posisi September 2009 adalah sebesar Rp97,15 triliun. Secara tahunan, kredit tumbuh 17,25% (yoy) lebih lambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 22,51%. Sementara itu, secara triwulanan, kredit tumbuh 1,78% (qtq) atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 8,99%(qtq). Perlambatan kredit tersebut diperkirakan sebagai akibat dari masih belum kuatnya permintaan kredit seiring dengan kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih.

Risiko kredit masih dalam batas relatif aman

Risiko kredit bank umum konvensional di Jawa Barat pada triwulan III-2009 menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Persentase jumlah kredit bermasalah kotor atau *Non Performing Loan* (NPL) *Gross* menurun dari 3,91% di triwulan II-2009 menjadi 3,81% pada triwulan III-2009. Sementara itu, persentase NPL net mengalami penurunan dari 1,60% menjadi 1,57%. Selain itu, seiring dengan membaiknya prospek perekonomian dunia di tahun 2010, diperkirakan risiko kredit perbankan akan semakin terkendali.

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

Transaksi sistem pembayaran menunjukkan peningkatan

Kegiatan sistem pembayaran di Jawa Barat pada triwulan III-2009 menunjukkan peningkatan. Jumlah aliran uang masuk (*inflow*) ke Kantor Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat, meningkat 11,08% (qtq) menjadi Rp3,71 triliun. Demikian juga jumlah aliran uang keluar (*outflow*) naik 56,29% menjadi Rp3,14 triliun. Sementara itu, untuk transaksi kliring, rata-rata nominal per bulan naik 2,50% (qtq) menjadi Rp10,64 triliun dan rata-rata volume transaksi per bulan meningkat 1,52% menjadi 484.106 warkat. Di sisi lain, rata-rata nominal dan volume transaksi pembayaran melalui BI-RTGS per bulan naik masing-masing sebesar 15,07% (qtq) menjadi Rp53,18 triliun dan 18,53% menjadi sebanyak 77.648 transaksi. Peningkatan kegiatan sistem pembayaran selama periode laporan, terkait dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat di Jawa Barat untuk bertransaksi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri baik secara tunai maupun non tunai.

PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

Realisasi belanja pada triwulan III-2009 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

Realisasi belanja baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh realisasi belanja daerah yang cukup besar pada pos anggaran pendidikan, pertanian, serta sarana-prasana. Sementara, realisasi belanja pemerintah pusat yang disalurkan di wilayah Jawa Barat juga mengalami kenaikan, terutama berupa dana tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi.

Penerimaan pemerintah daerah yang terutama berasal dari pajak mengalami peningkatan

Penerimaan pemerintah daerah mengalami peningkatan terutama pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dalam bentuk kenaikan pajak kendaraan bermotor. Di sisi lain, penerimaan pajak untuk pemerintah pusat di wilayah Jawa Barat mengalami penurunan. Hal ini diperkirakan sebagai dampak dari meningkatnya realisasi stimulus keringanan pajak dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pada APBD-P tahun 2009, baik penerimaan maupun belanja Pemerintah Provinsi meningkat

Dalam APBD-P tahun 2009 yang disahkan pada triwulan III-2009, penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan terutama berasal dari pos dana perimbangan, yakni dana bagi hasil cukai dan pajak panas bumi. Sementara, dari sisi belanja, alokasi untuk bantuan bencana alam dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan lebih besar dibandingkan dengan alokasi awal.

PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat menunjukkan perbaikan

Sejalan dengan mulai membaiknya perekonomian Jawa Barat pada triwulan III-2009, kondisi ketenagakerjaan diperkirakan mengalami perkembangan yang positif. Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di

Jawa Barat diperkirakan mengalami peningkatan, khususnya untuk kedua sektor dominan di Jawa Barat, yaitu industri pengolahan dan perdagangan, hotel, dan restoran.

Kesejahteraan petani meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

Tingkat kesejahteraan yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan peningkatan. Pada akhir triwulan III-2009, pertumbuhan NTP tercatat sebesar 1,61% (yoy) meningkat dibandingkan periode triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 0,57%.

PROSPEK PEREKONOMIAN

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat diperkirakan semakin membaik.

Perekonomian Jawa Barat ke depan diperkirakan semakin menunjukkan tren perbaikan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan IV-2009 diperkirakan meningkat, dari perkiraan sebesar 3,6% (yoy) pada triwulan III-2009 menjadi 4,3% (yoy) pada triwulan IV-2009. Dengan angka perkiraan tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sepanjang tahun 2009 diperkirakan berkisar antara 3,5% - 4% (yoy). Dari sisi permintaan, kenaikan pertumbuhan ekonomi selama triwulan IV-2009 terutama didorong oleh perbaikan ekspor dan investasi, akibat meningkatnya optimisme perbaikan ekonomi global serta iklim usaha yang semakin kondusif. Dari sisi penawaran, peningkatan pertumbuhan ditopang oleh perbaikan kinerja di sektor industri pengolahan, sebagai kontributor utama perekonomian Jawa Barat. Para pelaku usaha diperkirakan akan merespons perbaikan kondisi ekonomi global melalui peningkatan utilisasi kapasitas produksi terutama dalam rangka memenuhi permintaan eksternal.

Inflasi tahunan Jawa Barat pada triwulan IV-2009 diperkirakan akan meningkat, sementara inflasi triwulanan diperkirakan akan lebih rendah.

Secara tahunan laju inflasi Jawa Barat diperkirakan telah mencapai titik terendah pada triwulan III-2009 dan akan meningkat pada triwulan IV-2009 dengan kisaran antara 3% - 4% (yoy). Angka ini merupakan level inflasi yang paling rendah setelah periode krisis moneter tahun 1998. Secara triwulanan, inflasi Jawa Barat pada triwulan IV-2009 diproyeksikan sebesar 1,7% - 1,8% atau relatif lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Faktor penyebab rendahnya inflasi triwulanan Jawa Barat, antara lain membaiknya ekspektasi inflasi masyarakat, minimalnya tekanan kenaikan harga dari sisi eksternal, serta stabilnya interaksi antara permintaan dan penawaran. Di lain pihak, kenaikan harga barang yang diatur pemerintah (*administered price*) seperti gas elpiji serta kenaikan harga bahan makanan (*volatile foods*) diperkirakan memberikan dampak yang minimal terhadap inflasi di Jawa Barat.

BAB 1

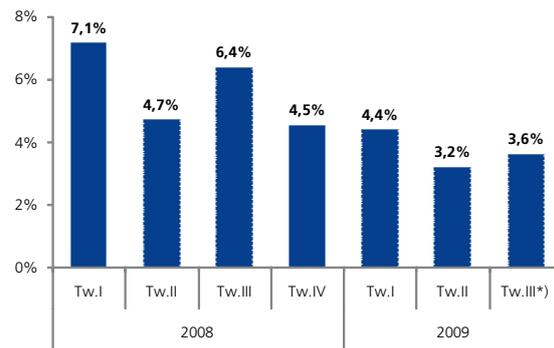
KONDISI MAKRO EKONOMI REGIONAL



Kinerja perekonomian global pada triwulan III-2009 dirasakan semakin menguat dan menunjukkan tren pemulihan. Melambatnya laju kontraksi negara-negara maju serta pulihnya kinerja ekonomi negara-negara berkembang memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, termasuk perekonomian regional Jawa Barat. Setelah tumbuh melambat pada tiga triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Jawa

Barat pada triwulan III-2009 diperkirakan tumbuh sebesar 3,6% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 3,2%.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat
*) Proyeksi KBI Bandung

Dari sisi permintaan, perbaikan di seluruh komponen mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan III-2009. Konsumsi rumah tangga masih tumbuh cukup tinggi, akibat lonjakan konsumsi menjelang hari besar keagamaan, terjaganya daya beli masyarakat dan melambatnya penambahan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak mulai menggeliatnya sektor riil pada triwulan laporan. Investasi juga diperkirakan membaik, didorong oleh peningkatan permintaan dan optimisme pelaku usaha, serta terjaganya kondisi ekonomi-politik yang kondusif pasca Pemilu. Demikian juga halnya dengan kinerja ekspor yang mengalami perbaikan seiring dengan peningkatan permintaan dari negara-negara mitra dagang seiring perbaikan perekonomian global, walaupun belum pulih seperti periode sebelum krisis.

Dari sisi penawaran, peningkatan kinerja di dua sektor ekonomi dominan di Jawa Barat, yaitu industri pengolahan serta perdagangan, hotel, dan restoran, diperkirakan mendorong perbaikan perekonomian pada triwulan laporan. Setelah mengalami kontraksi pada triwulan sebelumnya, industri pengolahan diperkirakan tumbuh positif pada triwulan III-2009. Peningkatan permintaan terhadap produk industri pengolahan Jawa Barat, khususnya yang berorientasi ekspor, memicu pulihnya kinerja sektor tersebut. Optimisme pelaku usaha sudah mulai tampak melalui peningkatan utilisasi kapasitas produksi. Sementara dari sisi domestik, peningkatan konsumsi rumah tangga mampu menggerakkan sektor PHR. Di sisi lain, setelah tumbuh cukup tinggi pada triwulan sebelumnya sebagai akibat faktor iklim yang sangat kondusif, sektor pertanian pada triwulan III-2009 diperkirakan mengalami pertumbuhan yang melambat. Produksi pertanian, khususnya tanaman pangan, diperkirakan sudah tidak melonjak setinggi produksi pada semester I-2009, karena iklim di Jawa Barat sudah kembali normal, tidak sebaik iklim pada periode lalu.

1. SISI PERMINTAAN

Membbaiknya seluruh komponen permintaan agregat menopang peningkatan pertumbuhan perekonomian Jawa Barat pada triwulan III-2009. Stabil dan relatif tingginya konsumsi rumah tangga didorong oleh membaiknya ekspektasi konsumen seiring menggeliatnya kembali aktivitas perekonomian daerah. Daya beli yang stabil menopang konsumsi rumah tangga, melalui penurunan jumlah PHK serta penguatan keyakinan konsumen pasca Pemilu Presiden yang berlangsung aman dan lancar. Investasi diperkirakan mengalami peningkatan kembali untuk mendukung kelancaran produksi seiring peningkatan permintaan eksternal dan domestik. Kondisi perekonomian global yang membaik serta kondisi perekonomian nasional yang stabil pasca Pemilu Presiden mendorong optimisme para pelaku usaha untuk merealisasikan investasinya pada triwulan III-2009. Kinerja ekspor juga membaik, sejalan dengan melambatnya laju kontraksi negara-negara maju serta pulihnya kinerja ekonomi negara-negara berkembang. Perbaikan kondisi perekonomian global tersebut mendorong membaiknya keyakinan konsumen serta meningkatnya indeks produksi di negara-negara maju, yang selanjutnya memicu peningkatan permintaan internasional terhadap produk-produk Jawa Barat.

**Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (yoy) Provinsi Jawa Barat
Dari Sisi Permintaan (%)**

Komponen	2008				2009		
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III*)
Konsumsi rumah tangga	8.0%	4.8%	7.8%	4.3%	7.1%	5.6%	6.0%
Konsumsi pemerintah	-2.9%	-14.5%	11.0%	5.0%	4.5%	7.0%	7.9%
Pembentukan Modal Tetap Bruto	10.4%	8.5%	14.0%	7.9%	12.7%	4.4%	6.3%
Ekspor	-14.2%	-10.5%	-20.8%	-8.4%	-13.7%	-13.0%	-2.8%
Impor	-5.5%	-14.3%	-19.8%	-3.9%	-8.8%	-2.8%	5.6%
PDRB	7.1%	4.7%	6.4%	4.5%	4.4%	3.2%	3.6%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (data s.d. triwulan II-2009)

*) Proyeksi KBI Bandung

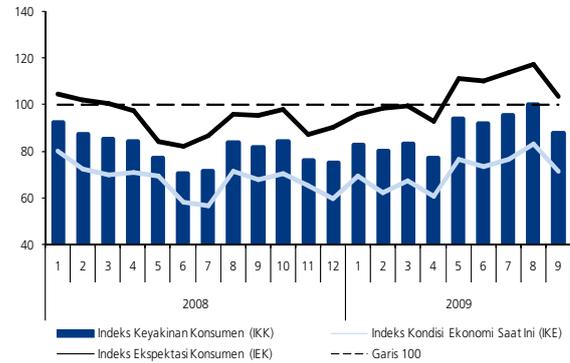
1.1. Konsumsi

Seiring membaiknya kondisi sektor riil, konsumsi rumah tangga diperkirakan mengalami peningkatan pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh 6,0% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,6%. Sejalan dengan kondisi ekonomi yang membaik, persiapan masyarakat dalam menyambut hari besar keagamaan (Lebaran) yang terkonsentrasi sepenuhnya pada triwulan III-2009 juga mendorong relatif tingginya konsumsi rumah tangga pada periode laporan. Peningkatan konsumsi rumah tangga juga didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat serta penguatan keyakinan konsumen.

Penguatan keyakinan konsumen diindikasikan oleh peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) selama triwulan III-2009 (Gambar 1.2).

Berdasarkan hasil Survei Konsumen KBI Bandung, rata-rata IKK pada triwulan III-2009 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, serta mengalami peningkatan pertumbuhan secara tahunan, dari 13% (yoy) pada triwulan II-2009 menjadi 19% pada triwulan III-2009. Peningkatan optimisme masyarakat ditunjukkan oleh peningkatan rata-rata IKK dari 87,61 menjadi 94,31 pada triwulan III-2009, walaupun mengalami penurunan pada bulan September 2009.

Grafik 1.2. Indeks Keyakinan Konsumen

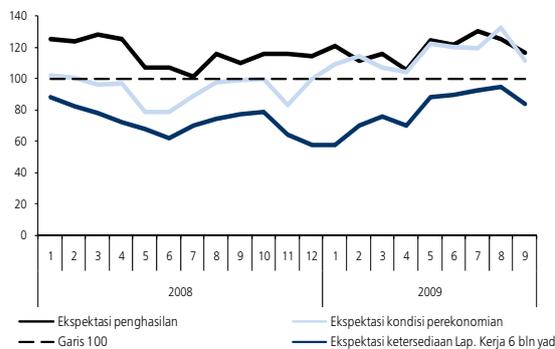


Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia Bandung.

Dilihat dari komponennya, kenaikan pertumbuhan tahunan IKK pada triwulan III-2009 terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE).

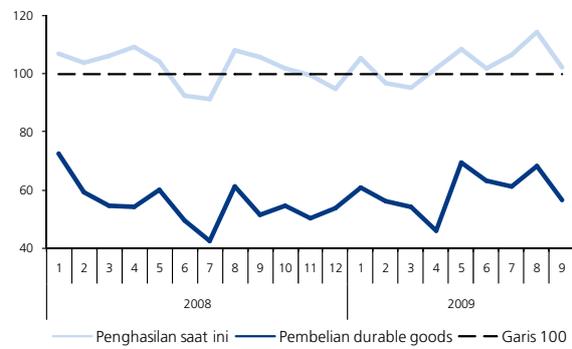
Rata-rata IKE pada triwulan III-2009 adalah sebesar 18% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan II-2009 yang sebesar 6% (yoy). IKE diperkirakan meningkat karena perbaikan kondisi ekonomi akibat menggeliatnya aktivitas perekonomian daerah, serta stabilnya kondisi ekonomi dan politik setelah pesta demokrasi yang berjalan aman dan lancar. Kenaikan ini didorong oleh kenaikan yang cukup tinggi pada pertumbuhan indeks pembelian barang tahan lama (*durable goods*) dan indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini. Peningkatan indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini tersebut timbul sebagai dampak Bergeraknya kembali perekonomian Jawa Barat, sehingga laju PHK berkurang, serta dibukanya kembali lowongan kerja baru di berbagai subsektor, terutama di sektor industri pengolahan. Berdasarkan data dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tidak ada penambahan jumlah tenaga kerja yang di-PHK dan dirumahkan hingga September 2009, apabila dibandingkan kondisi pada akhir triwulan II-2009.

Grafik 1.3. Komponen Indeks Ekspektasi



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia Bandung.

Grafik 1.4. Komponen Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia Bandung.

Meningkatnya konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2009 juga diindikasikan oleh Indeks Riil Penjualan Eceran. Indeks rata-rata pada triwulan III-2009 tumbuh meningkat menjadi 302,7, dari 278,7 pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan indeks tersebut pun tumbuh meningkat dari 13,0% (yoy) menjadi 14,5%. Salah satu barang mendorong peningkatan konsumsi tersebut adalah penjualan kendaraan bermotor. Hal ini diindikasikan oleh kenaikan pajak kendaraan bermotor, dari tumbuh 7,9% (yoy) pada triwulan II-2009 menjadi 10,3% pada triwulan III-2009. Kondisi ini mengindikasikan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat Jawa Barat. Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga tumbuh membaik walaupun masih mengalami kontraksi, dari tumbuh -18,7% (yoy) menjadi -7,9%.

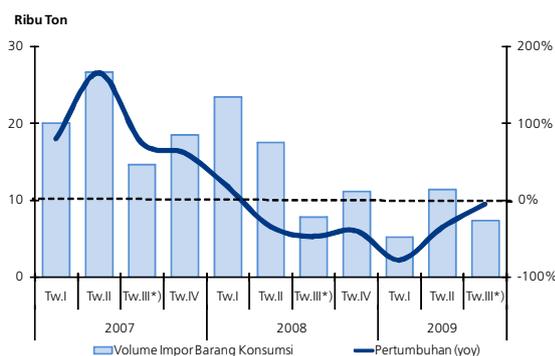
Grafik 1.5. Indeks Riil Penjualan



Sumber: Survei Penjualan Eceran, Bank Indonesia

Impor barang konsumsi ke Jawa Barat mengalami peningkatan pada triwulan III-2009. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan konsumsi rumah tangga, yang salah satunya dipenuhi melalui kegiatan impor dari luar negeri. Impor barang konsumsi pada triwulan III-2009 tumbuh sebesar -5,3% (yoy), sangat membaik dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan II-2009 yang sebesar -35,1%. Dengan perkembangan tersebut, impor barang konsumsi Jawa Barat terindikasikan sudah pulih pada semester II-2009.

Grafik 1.6. Impor Barang Konsumsi Jawa Barat



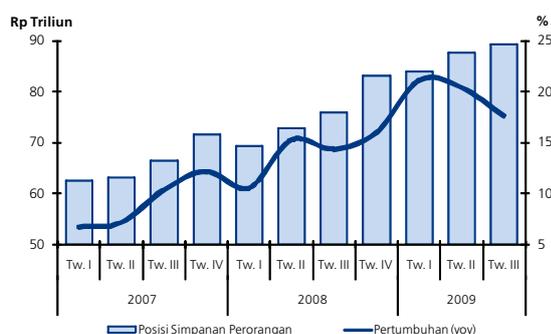
Sumber: Bank Indonesia

Keterangan:

*) Periode Juli s.d. Agustus 2009

Peningkatan konsumsi rumah tangga juga diindikasikan oleh posisi simpanan perorangan di bank umum di Jawa Barat. Pertumbuhan posisi simpanan perorangan pada triwulan III-2009 semakin melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II-2009, yaitu sebesar 17,7% (yoy), lebih lambat dibandingkan triwulan II-2009 yang tumbuh sebesar 20,4%. Perlambatan tersebut

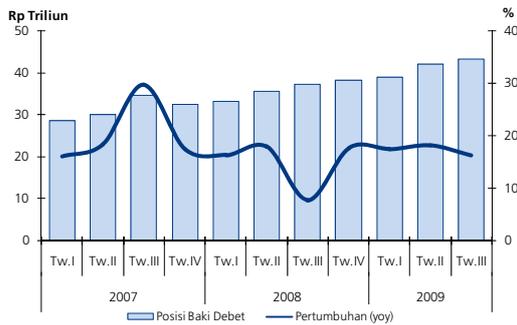
Grafik 1.7. Posisi Simpanan Perorangan di Bank Umum di Jawa Barat



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung.

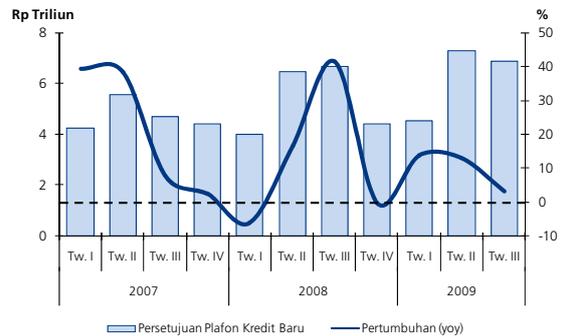
mengindikasikan bahwa salah satu sumber pembiayaan masyarakat untuk melakukan konsumsi adalah penggunaan simpanan mereka di bank umum. Sementara itu, posisi baki debit kredit konsumsi bank umum di Jawa Barat masih cenderung stabil, walaupun angka persetujuan plafon kredit baru untuk penggunaan konsumsi mengalami perlambatan dibandingkan periode sebelumnya. Dengan demikian, dapat diindikasikan bahwa masyarakat lebih cenderung untuk mempergunakan simpanan mereka terlebih dahulu dibandingkan kredit konsumsi, untuk membiayai peningkatan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat pada triwulan III-2009 ini.

Grafik 1.8. Posisi Baki Debet Kredit Konsumsi Bank Umum di Jawa Barat



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung.

Grafik 1.9. Angka Persetujuan Plafon Kredit Baru untuk Penggunaan Konsumsi oleh Bank Umum di Jawa Barat



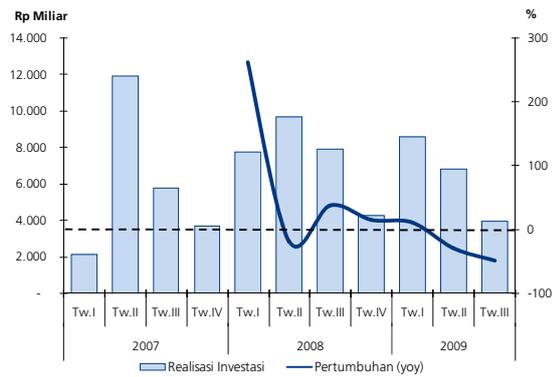
Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung.

1.2. Investasi

Seiring peningkatan optimisme di kalangan pelaku usaha atas perbaikan kondisi perekonomian, investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) di Jawa Barat diperkirakan tumbuh meningkat. Pertumbuhan investasi pada triwulan III-2009 diperkirakan sebesar 6,3% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 4,4%. Meningkatnya optimisme pelaku usaha tersebut sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian global serta stabilnya kondisi dalam negeri setelah Pemilu Presiden yang berlangsung aman dan lancar.

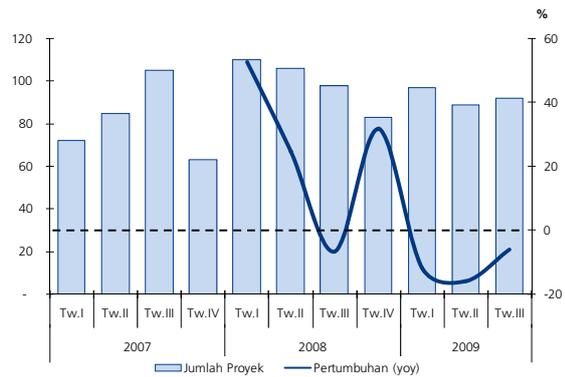
Peningkatan investasi di Jawa Barat terlihat dari peningkatan jumlah proyek yang direalisasikan menjadi IUT (Izin Usaha Tetap). Pada triwulan III-2009, terjadi realisasi 92 buah proyek menjadi IUT, meningkat dibandingkan proyek pada triwulan II-2009 yang sejumlah 89 proyek. Dibandingkan periode yang sama pada tahun 2008, jumlah proyek yang menjadi IUT mengalami kontraksi sebesar 6,1% pada triwulan III-2009, namun lebih baik dibandingkan triwulan II-2009 yang mengalami penurunan 16,0% (yoy). Namun demikian, peningkatan jumlah proyek yang terealisasi tidak diikuti oleh peningkatan nilai realisasi investasi. Nilai realisasi investasi pada triwulan III-2009 justru mengalami penurunan pertumbuhan yang semakin mendalam.

Grafik 1.10. Realisasi Investasi di Jawa Barat Berdasarkan Nilai Proyek



Sumber: Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat

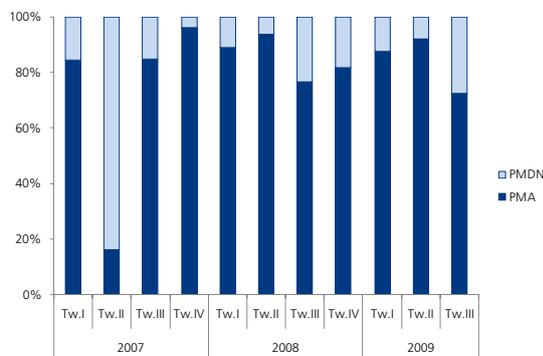
Grafik 1.11. Realisasi Investasi di Jawa Barat Berdasarkan Jumlah Proyek



Sumber: Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat

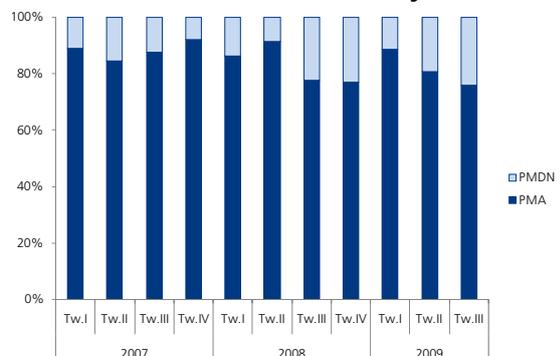
Dibandingkan triwulan II-2009, terlihat ada sedikit perubahan komposisi investor yang merealisasikan investasinya pada triwulan III-2009. Porsi kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terlihat semakin besar dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan kontribusi sebesar 27% untuk nilai realisasi dan 24% untuk jumlah proyek. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada periode tersebut, PMDN hanya menyumbangkan 8% dari total nilai realisasi investasi dan 19% dari total proyek yang terealisasi.

Grafik 1.12. Porsi Realisasi Investasi Berdasarkan Nilai Investasi



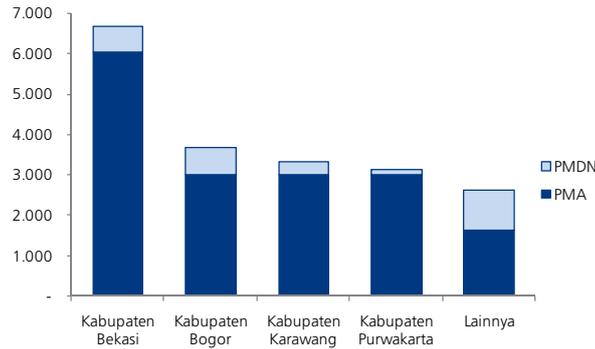
Sumber: Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat

Grafik 1.13. Porsi Realisasi Investasi Berdasarkan Jumlah Proyek



Sumber: Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat

Dilihat dari wilayahnya, Kabupaten Bekasi merupakan daerah dengan nilai realisasi investasi terbesar di Jawa Barat hingga September 2009. Hal ini menunjukkan besarnya daya tarik Kabupaten Bekasi untuk menarik investor. Secara garis besar, terdapat 4 kabupaten yang mendominasi realisasi investasi di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bekasi (34,5%), Kabupaten Bogor (18,9%), Kabupaten Karawang (17,1%), dan Kabupaten Purwakarta (16,1%). Kabupaten Bekasi juga mendominasi jumlah proyek yang direalisasikan, dengan jumlah sebanyak 43,7% proyek direalisasikan di wilayah tersebut, serta penyerapan jumlah tenaga kerja, dengan menyerap 27,9% dari penyerapan tenaga kerja hasil dari realisasi investasi di tahun 2009 ini.

Grafik 1.14. Distribusi Realisasi Investasi Berdasarkan Wilayah Dati II di Jawa Barat Periode Januari s.d. September 2009

Industri logam, mesin, dan elektronik, serta industri tekstil menguasai porsi realisasi investasi di Jawa Barat selama tahun 2009. Kondisi ini sejalan dengan arahan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengarahkan Jawa Barat sebagai sentra industri elektronik. Sementara itu, pada triwulan III-2009 ini, kenaikan nilai realisasi investasi dibandingkan triwulan sebelumnya didorong oleh peningkatan realisasi investasi pada industri tekstil, yang meningkat sebesar Rp957,5 miliar. Di posisi kedua, nilai realisasi investasi di industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain meningkat sebesar Rp800,8 miliar pada triwulan III-2009 ini. Peningkatan tersebut juga menunjukkan bahwa permintaan masyarakat, baik terhadap tekstil (terutama ekspor) maupun alat angkutan sudah mulai naik pada triwulan III-2009 ini, sehingga pelaku usaha yang bergerak di kedua sektor tersebut meningkatkan kapasitas produksinya melalui investasi. Investor tekstil, khususnya bidang garmen, membangun pabrik baru di Jawa Barat, terutama di wilayah Kabupaten Subang dan Kabupaten Sukabumi, karena daya tarik lingkungan masyarakat yang relatif kondusif serta upah minimum kabupaten/kota yang relatif masih rendah.

Tabel 1.2. Nilai Realisasi Investasi Di Jawa Barat Menurut Sektor Usaha Hingga Triwulan III-2009 (Rp Miliar)

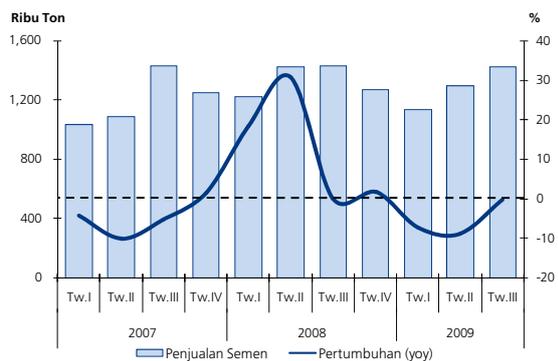
Sektor Usaha	PMA	PMDN	Total
Sektor Primer	20.03	161.34	181.36
Tanaman Pangan & Perkebunan	-	-	-
Peternakan	20.03	147.62	167.65
Kehutanan	-	-	-
Perikanan	-	-	-
Pertambangan	-	13.71	13.71
Sektor Sekunder	11,942.96	1,949.90	13,892.85
Industri Makanan	404.96	92.31	497.27
Industri Tekstil	2,707.85	832.05	3,539.89
Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki	648.03	-	648.03
Industri Kayu	72.16	-	72.16
Industri Kertas & Percetakan	302.54	379.26	681.79
Industri Kimia & Farmasi	629.84	90.74	720.58
Industri Karet & Plastik	1,564.40	437.59	2,001.99
Industri Mineral Non Logam	-	-	-
Ind. Logam, Mesin, & Elektronik	3,885.36	113.46	3,998.82
Ind. Instrumen, Kedokteran, Presisi, & Optik dan Jam	94.88	-	94.88
Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	1,363.71	-	1,363.71
Industri Lainnya	269.24	4.50	273.74

Sektor Usaha	PMA	PMDN	Total
Sektor Tersier	4,771.08	577.61	5,348.69
Listrik, Gas, dan Air	2,023.71	-	2,023.71
Konstruksi	-	37.00	37.00
Perdagangan & Reparasi	402.08	56.40	458.48
Hotel & Restoran	42.32	60.01	102.33
Transportasi, Gudang, dan Komunikasi	3.90	246.95	250.85
Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran	2,240.87	117.60	2,358.47
Jasa Lainnya	58.20	59.65	117.85
Total	16,734.07	2,688.84	19,422.91

Sumber: Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat

Peningkatan investasi terjadi pada kedua komponennya, yaitu investasi bangunan dan investasi non bangunan. Peningkatan investasi bangunan diindikasikan oleh pertumbuhan konsumsi semen di Jawa Barat, yang lebih tinggi pada triwulan III-2009. Konsumsi semen pada triwulan III-2009 tumbuh -0,2% (yoy), membaik dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang masih mengalami penurunan sebesar 8,8%.

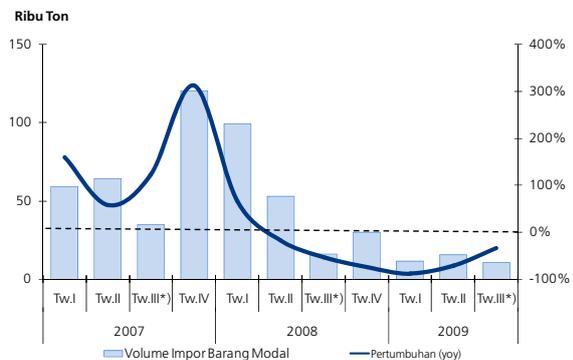
Grafik 1.15. Penjualan Semen di Jawa Barat



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia.

Peningkatan investasi non bangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi ditunjukkan oleh kenaikan pertumbuhan impor barang modal. Walaupun masih mengalami kontraksi, pertumbuhan impor barang modal meningkat dari -70,5% (yoy) pada triwulan II-2009 menjadi -33,4% pada triwulan III-2009 ini. Kondisi tersebut menunjukkan optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usaha mereka pada periode ke depan, sehingga meningkatkan impor barang modal demi menjaga kelancaran proses produksi.

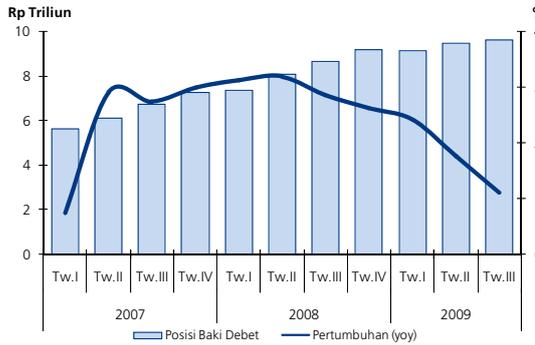
Grafik 1.16. Impor Barang Modal



Sumber: Bank Indonesia
Keterangan:
*) Periode Juli s.d. Agustus

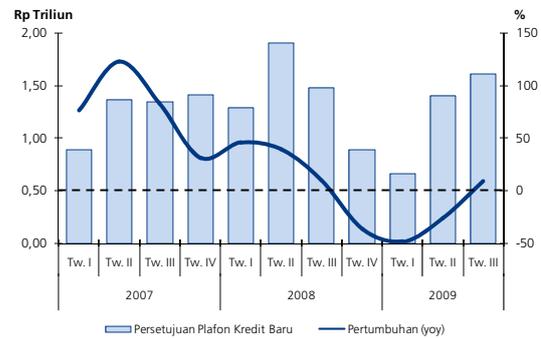
Angka persetujuan plafon kredit baru untuk penggunaan investasi menunjukkan tren peningkatan, setelah mengalami kontraksi pada tiga triwulan sebelumnya. Pada triwulan III-2009 ini, angka persetujuan plafon kredit investasi tumbuh sebesar 9,2% (yoy), sementara posisi baki debit kredit investasi tumbuh 11,1%.

Grafik 1.17. Posisi Penyaluran Kredit Investasi oleh Bank Umum di Jawa Barat



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung.

Grafik 1.18. Angka Persetujuan Plafon Kredit Baru untuk Penggunaan Investasi oleh Bank Umum di Jawa Barat



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung.

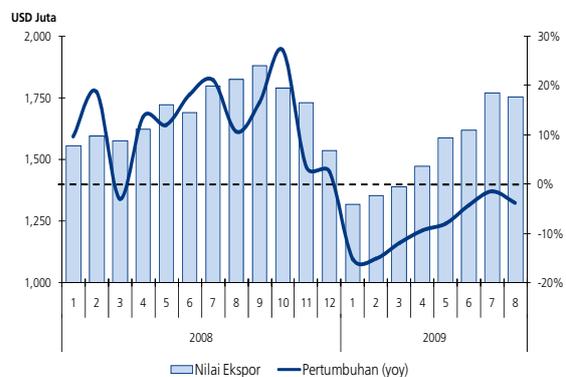
Peningkatan realisasi investasi juga didorong oleh perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Jawa Barat (lihat Boks 2. Program-program Peningkatan Investasi di Jawa Barat). Beberapa program telah direncanakan oleh BKPPMD untuk meningkatkan minat investor masuk ke Jawa Barat, yang kemudian akan meningkatkan nilai realisasi investasi di Jawa Barat.

1.3. Ekspor-Impor

Seiring dengan perbaikan kondisi perekonomian global, kinerja ekspor Jawa Barat pun mengalami peningkatan, walaupun masih belum pulih. Perekonomian global terindikasi mulai bergerak kembali, melalui perbaikan keyakinan konsumen internasional serta peningkatan indeks produksi di beberapa negara maju dan berkembang. Ekspor pada PDRB Jawa Barat diperkirakan tumbuh -2,8% (yoy) pada triwulan III-2009, membaik dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar -13,0%.

Nilai realisasi ekspor Jawa Barat terus mengalami perbaikan hingga triwulan III-2009. Adapun pertumbuhan ekspor pada periode Juli s.d. Agustus 2009 adalah sebesar -2,6% (yoy), membaik dibandingkan pertumbuhan pada periode sebelumnya, yang sebesar -7,1%. Sementara itu, volume ekspor mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 10,1% (yoy) pada triwulan III-2009, melambat dibandingkan pertumbuhan di triwulan sebelumnya yang sebesar -0,2%, namun jauh lebih baik dibandingkan kondisi ekspor pada

Grafik 1.19. Nilai Ekspor Jawa Barat

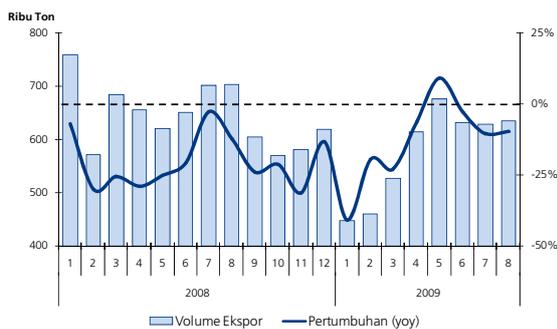


Sumber: Bank Indonesia

akhir tahun 2009 dan awal tahun 2009 lalu.

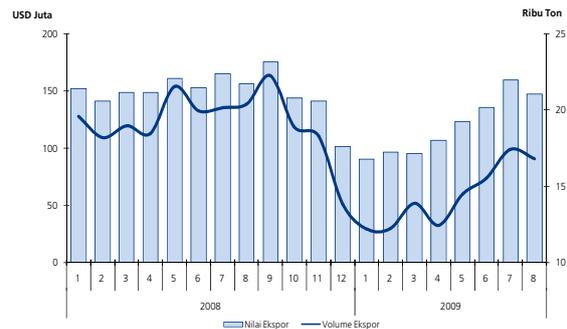
Dilihat dari klasifikasi SITC 2 digit, ketiga produk ekspor unggulan Jawa Barat terus menunjukkan tren perbaikan. Nilai ekspor alat telekomunikasi, yang menyumbang 12% nilai ekspor Jawa Barat pada tahun 2008, tumbuh meningkat dari 51,9% (yoy) menjadi 73%, sementara volume ekspornya juga mengalami peningkatan, dari 55% (yoy) menjadi 118,4%. Kondisi serupa juga terjadi pada ekspor mesin elektrik, yang berkontribusi terhadap 9% nilai ekspor Jawa Barat, tumbuh -4,5% (yoy) pada triwulan III-2009 (periode Juli s.d. Agustus 2009), membaik dibandingkan triwulan II-2009 yang tumbuh sebesar -20,9%. Demikian juga halnya dengan volume ekspornya, yang tumbuh membaik dari -29,1% (yoy) pada triwulan II-2009 menjadi -15,7% pada triwulan III-2009. Nilai ekspornya tumbuh Sementara itu, nilai ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT, mencakup *textile fibres and their waste, textile yarns, fabrics, and prod., dan clothing*) juga mengalami perbaikan walaupun tipis, dengan tumbuh -11% (yoy), sedikit membaik dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar -11,3%.

Grafik 1.20. Volume Ekspor Jawa Barat



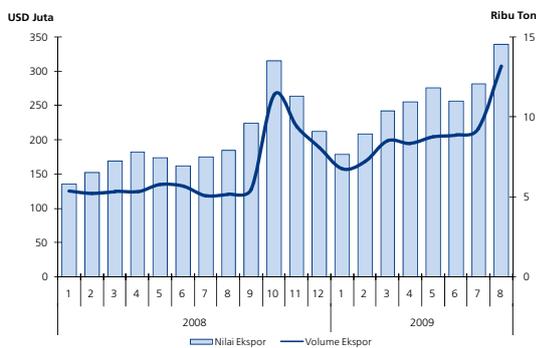
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.21. Nilai dan Volume Ekspor Mesin Elektrik



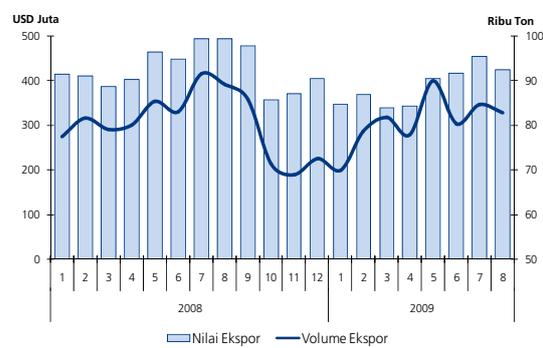
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.22. Nilai dan Volume Ekspor Alat Telekomunikasi



Sumber: Bank Indonesia

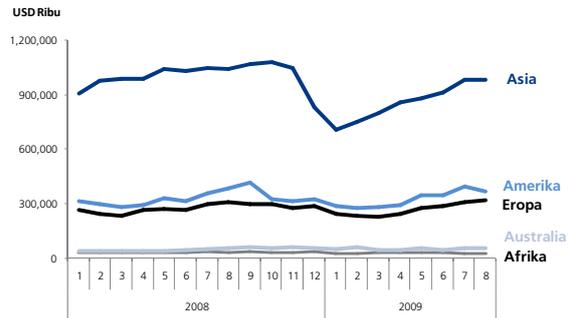
Grafik 1.23. Nilai dan Volume Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil



Sumber: Bank Indonesia

Peningkatan permintaan ekspor datang dari negara-negara mitra dagang utama Jawa Barat. Seiring membaiknya perekonomian negara-negara maju dan berkembang, permintaan ekspor dari Asia, Amerika, dan Eropa terus menunjukkan kenaikan, terutama sejak triwulan II-2009. Sementara ekspor dengan tujuan Australia dan Afrika, yang relatif tidak terkena dampak krisis keuangan global, masih relatif stabil.

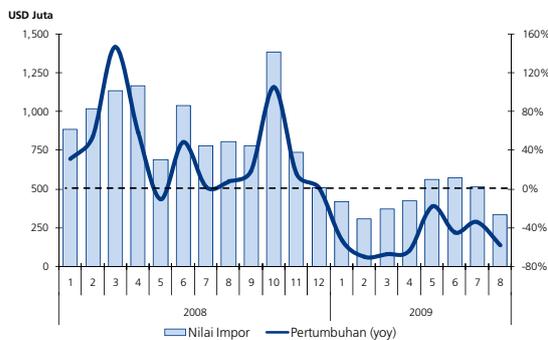
Grafik 1.24. Volume Ekspor Jawa Barat Berdasarkan Negara Pembeli



Sumber: Bank Indonesia

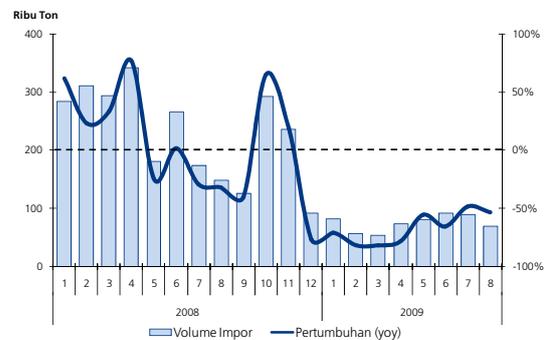
Bergeraknya perekonomian domestik meningkatkan permintaan Jawa Barat terhadap barang impor. Selain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik, barang impor juga digunakan sebagai bahan baku barang-barang yang berorientasi ekspor. Volume impor pada triwulan III-2009 (periode Juli s.d. Agustus 2009) tumbuh -50,9%, membaik dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar -68,7%. Adapun nilai impor mengalami pertumbuhan yang stagnan, yaitu dari -46,1% (yoy) menjadi -46,5% pada triwulan III-2009. Nilai impor tersebut tidak mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan volume impor, yang kemungkinan disebabkan karena apresiasi rupiah terhadap dolar AS.

Grafik 1.25. Nilai Impor Jawa Barat



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.26. Volume Impor Jawa Barat



Sumber: Bank Indonesia

2. SISI PENAWARAN

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan III-2009 ditopang oleh peningkatan kinerja sektor industri pengolahan, yang merupakan sektor paling dominan di Jawa Barat. Membaiknya kondisi perekonomian global mendorong peningkatan permintaan terhadap produk-produk industri pengolahan. Sektor PHR tumbuh relatif stabil dan cenderung mengalami peningkatan, akibat peningkatan di subsektor perdagangan. Kondisi ini salah satunya tercermin dari hasil Survei Arah Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat yang dilakukan oleh KBI Bandung

(lihat Boks 1. Hasil Survei Arah Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat). Sementara itu, sektor pertanian, sebagai sektor ketiga terbesar penyumbang PDRB Jawa Barat, diperkirakan tumbuh melambat, sehubungan masuknya musim tanam kedua.

Tabel 1.3. Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Provinsi Jawa Barat Dari Sisi Penawaran

Sektor	2008				2009		
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III*)
Pertanian	34,8%	-2,0%	3,5%	-11,2%	2,7%	9,7%	4,8%
Pertambangan & Penggalian	-15,3%	-15,9%	-8,8%	2,4%	1,0%	4,6%	4,0%
Industri Pengolahan	5,5%	9,5%	10,5%	10,8%	4,3%	-1,6%	0,7%
Listrik, Gas, & Air Bersih	4,7%	5,4%	3,7%	3,3%	4,5%	11,0%	11,9%
Bangunan / Konstruksi	2,1%	1,2%	13,4%	19,2%	3,9%	8,5%	10,0%
PHR	3,6%	2,8%	6,1%	-0,8%	6,5%	6,8%	7,0%
Pengangkutan & Komunikasi	0,5%	7,0%	3,5%	0,7%	7,7%	11,1%	11,4%
Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	-1,8%	3,5%	8,6%	9,9%	2,5%	4,3%	0,5%
Jasa-jasa	1,1%	-0,1%	2,4%	3,8%	2,7%	4,0%	1,0%
PDRB	7,1%	4,7%	6,4%	4,5%	4,4%	3,2%	3,6%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

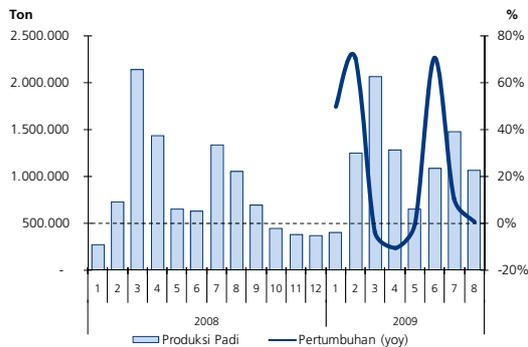
*) Proyeksi KBI Bandung

2.1. Sektor Pertanian

Setelah mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi pada triwulan II-2009, yaitu sebesar **9,7% (yoy)**, sektor pertanian diperkirakan akan mengalami perlambatan pada triwulan III-2009, menjadi **5,9%**. Tingginya pertumbuhan pada triwulan II-2009 salah satunya adalah karena adanya pergeseran musim panen raya hingga ke triwulan II, yang sebelumnya (tahun 2008) terkonsentrasi pada triwulan I saja. Selain itu, pertumbuhan yang tinggi di triwulan II-2009 tidak terlepas dari faktor iklim yang sangat menunjang. Untuk triwulan III tahun 2009 ini, pertanian tanaman pangan, khususnya padi, memasuki musim tanam.

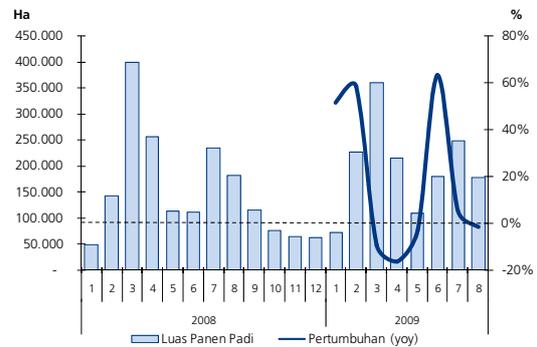
Perlambatan sektor pertanian diindikasikan oleh penurunan pertumbuhan produksi padi sawah dan ladang pada periode Juli dan Agustus 2009. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat, setelah mencapai pertumbuhan yang luar biasa (71%) pada bulan Juni 2009, produksi padi di Jawa Barat tumbuh melambat pada periode-periode berikutnya. Secara keseluruhan, pertumbuhan produksi padi melambat dari 11,0% (yoy) pada triwulan II-2009 (April s.d. Juni 2009) menjadi 6,2% pada triwulan III-2009 (Juli s.d. Agustus 2009). Perlambatan juga terlihat pada pertumbuhan luas panen padi sawah dan ladang, dimana pertumbuhan melambat dari 5,1% (yoy) pada triwulan II-2009 menjadi 2,2% pada triwulan III-2009.

Grafik 1.27. Produksi Padi Sawah dan Ladang di Jawa Barat



Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat

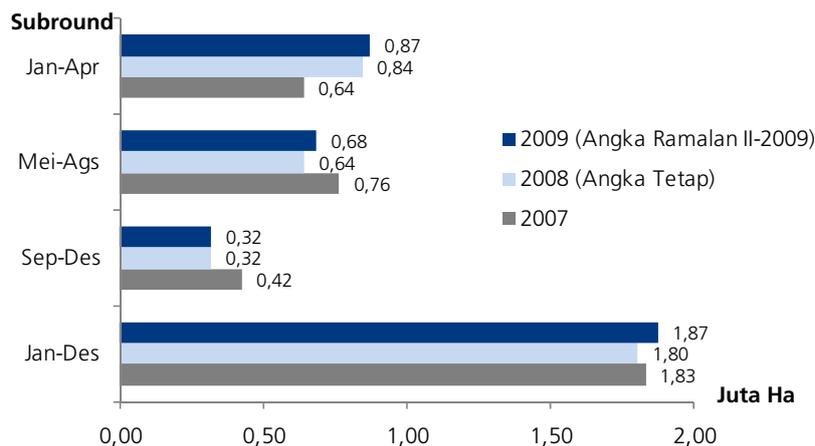
Grafik 1.28. Luas Panen Padi Sawah dan Ladang di Jawa Barat



Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat

Data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat tersebut sejalan dengan data Angka Ramalan II BPS. Pertumbuhan luas panen pada *subround* III (periode September s.d. Desember 2009) stagnan dibandingkan *subround* sebelumnya. Pada periode sebelumnya (*subround* II-Mei s.d. Agustus 2009), luas panen tumbuh 6,5% (yoy). Sementara itu, luas panen pada *subround* III-2009 relatif stagnan dibandingkan periode *subround* II-2009, yaitu dengan panen seluas 0,32 juta hektar. Dengan demikian, maka produksi padi diperkirakan juga ikut melambat sejalan dengan luas panennya.

Grafik 1.29. Luas Panen Padi Jawa Barat



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

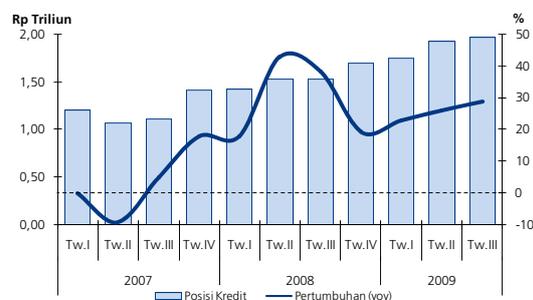
Tabel 1.4. Pencapaian Realisasi Areal Tanam, Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Jawa Barat Tahun 2009

Komoditi	Sasaran 2009	Realisasi s.d. Juli 2009	% Pencapaian
Padi Sawah			
Tanam (Ha)			
MT Okt - Mar	1.018.701	1.100.779	108,06%
MT Apr - Sep	793.374	684.689	86,30%
Jumlah Tanam	1.812.075	1.785.468	98,53%
Luas Panen (Ha)	1.721.468	1.290.275	74,95%
Produktivitas (Ku/Ha)	60	61	100,45%
Produksi (Ton)	10.402.168	7.831.609	75,29%
Padi Ladang			
Tanam (Ha)			
MT Okt - Mar	121.511	121.299	99,83%
MT Apr - Sep	360	588	163,33%
Jumlah Tanam	121.871	121.887	100,01%
Luas Panen (Ha)	119.435	119.962	100,44%
Produktivitas (Ku/Ha)	32	32	100,44%
Produksi (Ton)	381.596	384.983	100,89%
Jumlah (Padi Sawah dan Ladang)			
Tanam (Ha)			
MT Okt - Mar	1.140.212	1.222.078	107,18%
MT Apr - Sep	793.734	685.277	86,34%
Jumlah Tanam	1.933.946	1.907.355	98,63%
Luas Panen (Ha)	1.840.903	1.410.237	76,61%
Produktivitas (Ku/Ha)	59	58	99,45%
Produksi (Ton)	10.783.764	8.216.592	76,19%

Kekeringan diperkirakan tidak mengancam produksi pertanian Jawa Barat hingga akhir tahun 2009. Produksi padi sebanyak 10,6 juta ton (ARAM II-2009) diperkirakan dapat terlampaui karena cuaca yang kondusif serta dampak kekeringan yang minimal. Selama Januari hingga 15 September 2009, sekitar 3.311 hektar lahan mengalami puso, akibat kekeringan yang jauh menurun dibandingkan jumlah lahan puso di Jabar pada periode yang sama tahun 2008 yang seluas 68.248 hektar.

Dari sisi kredit perbankan, penyaluran kredit perbankan ke sektor pertanian mengalami peningkatan pertumbuhan. Posisi baki debit kredit ke sektor pertanian tumbuh 28,9% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 26,1%. Hal ini terjadi diperkirakan akibat upaya percepatan tanam padi yang dilakukan oleh petani, yang dilakukan mulai Oktober hingga awal November 2009, sehubungan dibukanya pasokan air dari sejumlah bendungan lebih awal, yang tentunya membutuhkan pembiayaan. Upaya percepatan tanam dilakukan

Grafik 1.30. Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Pertanian



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung

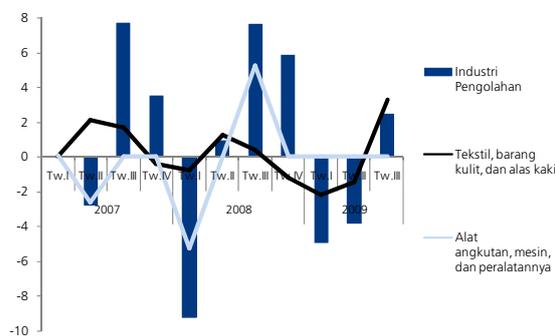
pada wilayah-wilayah sentra produksi padi di Kab. Indramayu, Majalengka, Subang, dan Karawang, yang selama ini selalu terjamin pasokan airnya dari Bendung Rentang Indramayu-Majalengka dan Bendungan Jatiluhur.

2.2. Sektor Industri Pengolahan

Setelah mengalami kontraksi pada triwulan sebelumnya, sektor industri pengolahan diperkirakan mampu tumbuh positif pada triwulan III-2009, sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan laporan. Peningkatan kinerja sektor industri pengolahan tersebut dipicu oleh mulai membaiknya permintaan, baik domestik maupun internasional. Jika dilihat dari kontribusinya, subsektor alat angkutan, mesin, dan peralatannya merupakan kontributor utama perekonomian Jawa Barat, diikuti oleh subsektor tekstil, barang kulit, dan alas kaki.

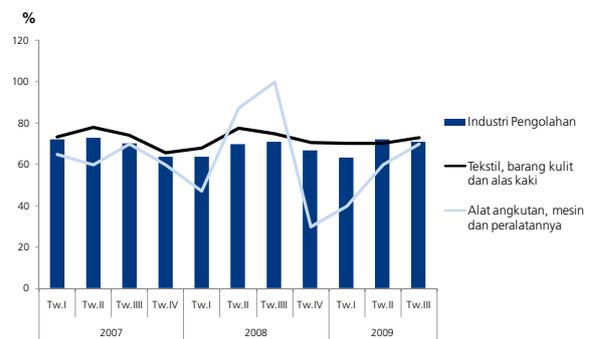
Peningkatan kinerja sektor industri pengolahan di Jawa Barat diindikasikan oleh hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha di Jawa Barat. Berdasarkan hasil survei tersebut, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) untuk indikator realisasi kegiatan usaha di sektor industri pengolahan mengalami peningkatan yang signifikan dari -3,83 pada triwulan II-2009 menjadi 2,43 pada triwulan III-2009. Sementara itu, kapasitas produksi seluruh subsektor pada industri pengolahan masih relatif stagnan. Penurunan tingkat kapasitas produksi terjadi di industri makanan, minuman, dan tembakau, barang kayu dan hasil hutan lainnya, serta kimia dan barang dari karet. Sementara itu, subsektor yang merupakan kontributor utama sektor industri pengolahan Jawa Barat tumbuh meningkat, yaitu subsektor alat angkutan, mesin, dan peralatannya (dari 60% menjadi 70%) serta tekstil, barang kulit, dan alas kaki (dari 70,4% menjadi 72,83%).

Grafik 1.31. Saldo Bersih Tertimbang Realisasi Kegiatan Usaha di Jawa Barat



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, KBI Bandung

Grafik 1.32. Kapasitas Produksi Dunia Usaha di Jawa Barat



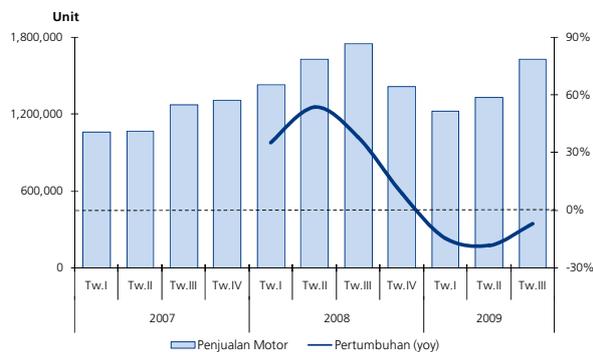
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, KBI Bandung

Peningkatan kinerja subsektor utama industri pengolahan utama Jawa Barat, yaitu industri alat angkutan, mesin, dan peralatannya, terutama didorong oleh membaiknya kondisi usaha

di Indonesia. Perbaikan kondisi usaha tersebut mendorong pengusaha untuk melakukan ekspansi, yang membutuhkan berbagai faktor produksi, termasuk mesin dan peralatan produksi lainnya.

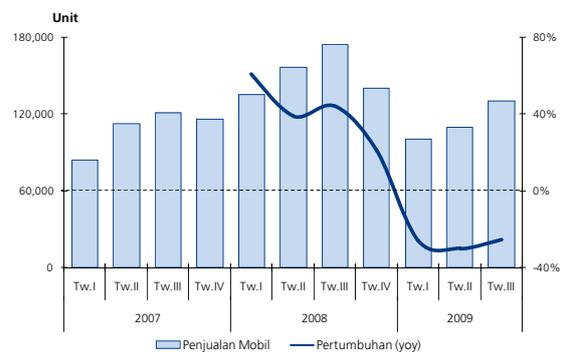
Penjualan kendaraan bermotor nasional juga mengalami perbaikan pada triwulan laporan, yang juga mendorong peningkatan kinerja subsektor alat angkutan, mesin, dan peralatannya. Penjualan motor secara nasional pada triwulan III-2009 tumbuh -7% (yoy), membaik dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II-2009 yang sebesar -18%. Walaupun masih mengalami kontraksi yang cukup dalam, peningkatan juga terjadi pada penjualan mobil nasional, yang tumbuh sebesar -25% (yoy), membaik dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar -30%. Produksi beberapa Agen Tunggal Pemilik Merek (ATPM) sudah kembali ke level normal, dan beberapa diantaranya lebih tinggi. Beberapa faktor yang mendorong peningkatan penjualan kendaraan bermotor antara lain gencarnya promosi penjualan dari berbagai ATPM dengan berbagai insentif (seperti suku bunga murah), stabilnya harga mobil menyusul menguatnya nilai tukar rupiah, kebutuhan masyarakat untuk mudik Lebaran, serta tren penurunan suku bunga bank dan perusahaan *multifinance*. Selain itu, pelaksanaan Pekan Raya Jakarta dan *Indonesia International Motor Show* (IIMS) yang digelar pada akhir Juli 2009 diperkirakan juga turut mendorong penjualan kendaraan bermotor. Untuk mengantisipasi lonjakan penjualan pada periode Lebaran, beberapa ATPM juga melakukan penambahan pasokan mobil baru untuk menghindari inden terlalu lama.

Gambar 1.33. Penjualan Motor Nasional



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 1.34. Penjualan Mobil Nasional

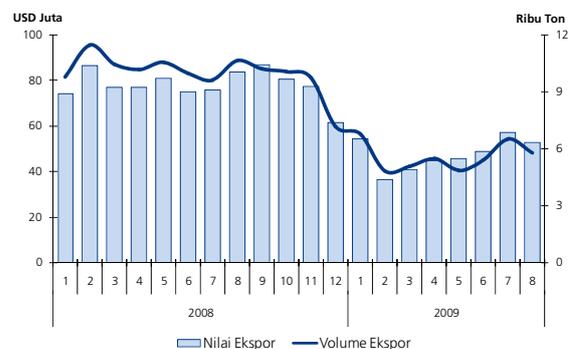


Sumber: Bank Indonesia

Sama halnya dengan kondisi di dalam negeri, permintaan luar negeri terhadap kendaraan dari Jawa Barat juga mengalami peningkatan.

Selama triwulan III-2009, nilai ekspor kendaraan bermotor tumbuh -31,2% (yoy), membaik dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar -40,3%. Sementara itu, pertumbuhan volume ekspor kendaraan bermotor mengalami perbaikan dari tumbuh -48,8% (yoy) pada triwulan II-2009 menjadi -39,3%.

Gambar 1.35. Volume Ekspor Kendaraan

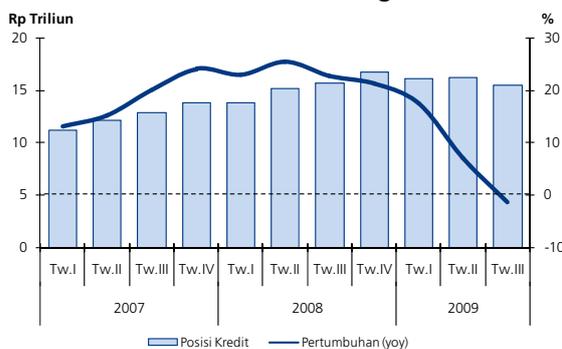


Sumber: Bank Indonesia

Tren pemulihan industri TPT salah satunya diindikasikan oleh pendirian beberapa pabrik TPT baru di Jawa Barat. Pada tahun 2009, sedikitnya akan ada 25 buah pabrik garmen baru yang dibangun di wilayah Jawa Barat, yaitu di daerah Sukabumi (11 perusahaan), Subang (12 perusahaan), Purwakarta (3 perusahaan), dan Karawang (3 perusahaan). Hal ini menunjukkan bahwa walaupun sektor TPT beberapa waktu lalu terkena dampak krisis keuangan global, sektor garmen sebagai industri hilir TPT cukup cepat pulih dari krisis tersebut. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat telah memperkirakan hal ini sebelumnya, yaitu sektor garmen mencapai titik terendah di triwulan I-2009 dan pulih pada semester II-2009. Selain itu, seiring dengan peningkatan turis asal Malaysia di Kota Bandung, peredaran produk TPT Jawa Barat, diperkirakan semakin meningkat di Malaysia. KADIN Kota Bandung memperkirakan produk garmen Kota Bandung saat ini menguasai 70% s.d. 80% pasar busana muslim di Malaysia. Mayoritas perpindahan produk TPT tersebut dibawa oleh para wisatawan, sedangkan volume pengiriman barang melalui prosedur ekspor masih sedikit. Pada akhir Juni 2009 lalu, 32 pengusaha Malaysia sudah menjajaki prospek bisnis busana muslim, dan menghasilkan kontrak perdagangan jangka panjang. Di industri alas kaki, dua investor asal Taiwan merealisasikan pembangunan pabrik sepatu berorientasi ekspor di Sukabumi, dengan total investasi USD 50 juta.

Pendirian pabrik barang-barang elektronik juga terus terjadi. Perusahaan elektronik Sanyo telah melakukan ekspansi untuk produk *optical disc*, dengan nilai investasi sejumlah USD39,8 juta di Cibitung, Jawa Barat. Produksi telah dijalankan mulai April 2009, dan hingga September 2009, produksi direncanakan sebesar 7.460.000 unit atau senilai USD 30,4 juta. Selain itu, Sanyo juga berpotensi untuk mengalihkan pabrik kamera digital dari Cina ke Indonesia, karena secara bisnis lebih menguntungkan, mengingat biaya tenaga kerja yang lebih rendah serta rencana untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kapasitas produksi diperkirakan meningkat dari 7,5 juta unit per tahun menjadi 10,5 juta unit per tahun. Peningkatan kapasitas produksi tersebut akan mendorong investasi pabrik komponen pendukung kamera digital (*plastic molding*). Pabrik baru direncanakan berdiri di Cimanggis, Jawa Barat, dan saat ini sedang dalam proses menunggu izin BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Di masa mendatang, BKPM sendiri akan mengarahkan Jawa Barat menjadi sentra elektronik di Indonesia. Di bulan September 2009, rombongan asal Taiwan sudah melakukan ke Jawa Barat untuk menjajaki investasi pabrik elektronik di Jawa Barat.

Grafik 1.36. Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Industri Pengolahan



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung

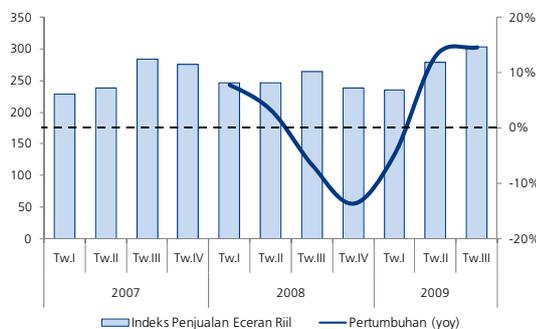
Walaupun mengalami peningkatan, pertumbuhan baki debit kredit perbankan ke sektor industri pengolahan mengalami penurunan. Penyaluran kredit tumbuh -1,3% (yoy), semakin menurun dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang masih mampu tumbuh positif sebesar 7,1% (yoy). Hal ini dimungkinkan, karena sebagian besar industri skala menengah besar di Jawa Barat memiliki kekuatan modal yang cukup tinggi, sehingga tidak terlalu bergantung pada

kredit perbankan.

2.3. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Sejalan dengan pertumbuhan konsumsi, sektor perdagangan, hotel, dan restoran diperkirakan mengalami peningkatan pertumbuhan. Sektor PHR diperkirakan meningkat tipis, dari tumbuh 6,8% (yoy) pada triwulan II-2009 menjadi 7,0% pada triwulan III-2009. Peningkatan tersebut didorong oleh perkembangan dari subsektor perdagangan, yang merupakan kontributor utama dalam sektor PHR. Berdasarkan Survei

Grafik 1.37. Indeks Riil Penjualan Eceran



Sumber: Survei Penjualan Eceran, KBI Bandung

Penjualan Eceran yang dilakukan oleh KBI Bandung, indeks riil penjualan eceran rata-rata pada triwulan III-2009 mengalami peningkatan dari 278,7 pada triwulan II-2009 menjadi 302,7 pada triwulan III-2009. Sementara itu, pertumbuhan indeks tersebut juga meningkat, yaitu dari 13,0% (yoy) pada triwulan II-2009 menjadi 14,5% pada triwulan III-2009.

Namun demikian, kinerja subsektor hotel mengalami sedikit perlambatan pada triwulan III-2009. Kondisi tersebut diindikasikan oleh melambatnya pertumbuhan rata-rata Tingkat Hunian Kamar (THK) hotel yang berlokasi di Jawa Barat. Namun demikian, perlambatan hanya terjadi pada pertumbuhan THK hotel non bintang, yaitu dari pertumbuhan 11,3% (yoy) pada triwulan II-2009, menjadi 8,8% pada triwulan III-2009. Sementara itu, hotel bintang masih tumbuh meningkat dengan pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu dari 4,1% menjadi 17,2%.

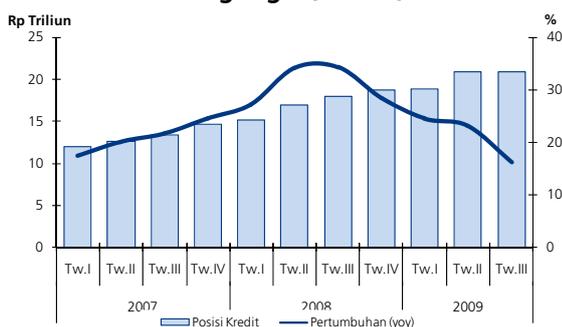
Tabel 1.5. Indikator Perhotelan di Jawa Barat

Tingkat Hunian Kamar	2008				2009			Pertumbuhan Tw.II-09 (yoy)	Pertumbuhan Tw.III-09 (yoy)
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III		
Hotel Bintang	42,31	41,40	40,03	42,21	43,65	43,10	46,93	4,1%	17,2%
Hotel Non Bintang	24,54	25,24	25,18	27,52	24,96	28,08	27,40	11,3%	8,8%
Hotel Bintang & Non Bintang	36,01	31,22	32,84	33,87	35,23	36,75	37,33	17,7%	13,7%

Sumber: BPS Provinsi Jabar

Serupa dengan kondisi di sektor industri pengolahan, penyaluran kredit ke sektor PHR mengalami perlambatan. Walaupun kinerja sektor tersebut diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, namun posisi baki debit kredit ke sektor PHR semakin

Grafik 1.38. Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung

melambat, yaitu dari sebelumnya tumbuh 23,2% (yoy) menjadi 16,2%.

2.4. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Pada triwulan III-2009, sektor keuangan diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan, yaitu dari 4,3% (yoy) pada triwulan sebelumnya, menjadi 0,5%. Perlambatan tersebut terutama didorong oleh perlambatan di subsektor keuangan, yang diindikasikan oleh pertumbuhan nilai tambah bank umum di Jawa Barat yang mengalami perlambatan. Setelah tumbuh tinggi pada triwulan II-2009, nilai tambah bank umum di Jawa Barat pada triwulan III-2009 tumbuh melambat menjadi 4,15% (yoy). Diperkirakan, perlambatan pertumbuhan nilai tambah bank tersebut terjadi sebagai dampak telah adanya penurunan suku bunga pinjaman yang diberikan oleh perbankan, sehingga *Net Interest Margin* (NIM) perbankan melambat.

**Tabel 1.6. Nilai Tambah Bank Umum di Jawa Barat
(Rp Miliar)**

Nilai Tambah	2008				2009			Pertumbuhan Tw.II-2009 (yoy)	Pertumbuhan Tw.III-2009 (yoy)
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III		
Bank Umum Pemerintah	870	1,878	3,040	4,182	1,213	2,742	3,397	46.02%	11.73%
Bank Swasta Nasional	544	1,158	1,757	2,246	504	1,105	1,680	-4.57%	-4.37%
Bank Asing dan Campuran	37	72	100	104	(11)	8	23	-88.63%	-76.77%
Total	1,452	3,108	4,897	6,532	1,707	3,856	5,100	24.05%	4.15%

Sumber: LBU KBI Bandung

Dilihat dari perkembangan persewaan bangunan, terdapat variasi pergerakan antar jenis properti yang disewakan. Total area untuk kantor yang disewakan tumbuh stagnan dibandingkan periode yang sama di tahun 2008, walaupun membaik dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 5,2% (yoy). Sebaliknya, total area pusat perbelanjaan yang disewakan mengalami kontraksi yang semakin mendalam, dari -7,84% (yoy) pada triwulan II-2009, menjadi 7,91% pada triwulan III-2009. Sementara itu, unit apartemen yang disewakan tumbuh relatif stabil dibandingkan periode sebelumnya.

Tabel 1.7. Perkembangan Persewaan Bangunan

Jenis Properti	2008				2009			Pertumbuhan Tw.II-2009 (yoy)	Pertumbuhan Tw.III-2009 (yoy)
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III		
Sewa Kantor	18,230	26,563	25,181	25,528	25,181	25,181	25,181	-5.20%	0.00%
Sewa Pusat Perbelanjaan	57,880	58,325	58,437	58,580	58,482	53,754	53,817	-7.84%	-7.91%
Sewa Apartemen	474	474	474	474	468	468	468	-1.27%	-1.27%

Sumber: Survei Properti Komersial Kota Bandung

2.5. Sektor Bangunan/Konstruksi

Peningkatan pertumbuhan diperkirakan terjadi pada subsektor bangunan/konstruksi pada triwulan III-2009. Dari sisi pelaku usaha, peningkatan pertumbuhan terjadi akibat sudah mulai

bergerak kembalinya perekonomian daerah, sehingga mendorong ekspansi pelaku usaha, yang salah satunya dilakukan dengan cara investasi pada komponen bangunan. Hal ini dapat berupa pendirian gedung/pabrik baru maupun perluasan. Peningkatan pada sektor bangunan/konstruksi tersebut salah satunya diindikasikan oleh peningkatan pertumbuhan konsumsi semen pada triwulan laporan. Konsumsi semen sudah menunjukkan pemulihan pada triwulan III-2009, dengan pertumbuhan sebesar -0,2% (yoy), membaik dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang masih mengalami penurunan sebesar 8,8%. Selain itu, peningkatan pertumbuhan juga ditunjukkan oleh perkembangan properti komersial, berupa meningkatnya pertumbuhan luas area perkantoran yang disewakan.

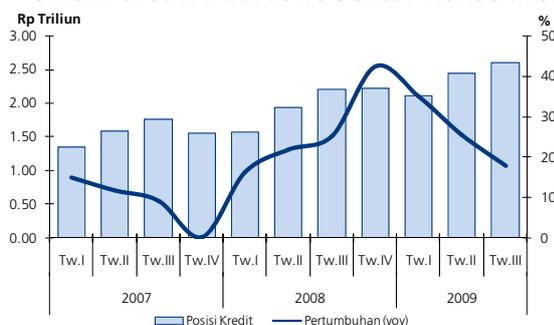
Tabel 1.8. Perkembangan Properti Komersial

Jenis Properti	2008				2009			Pertumbuhan Tw.II-2009 yoy	Pertumbuhan Tw.III-2009 yoy
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III		
Perkantoran Sewa (m ²)	18,230	26,563	25,181	25,528	25,181	25,181	25,181	-5.2%	0.0%
Pusat Perbelanjaan Sewa dan Jual (m ²)	106,260	107,040	107,152	105,252	105,555	101,139	101,217	-5.5%	-5.5%
Apartemen Jual (unit)	558	558	558	558	558	558	558	0.0%	0.0%
Hotel Bintang 3,4, dan 5 (jumlah kamar)	1,274	1,420	1,436	1450	1,432	1,535	1,550	8.1%	7.9%

Sumber: Survei Properti Komersial Kota Bandung

Walaupun mengalami peningkatan, penyaluran kredit ke sektor konstruksi mengalami perlambatan pada triwulan III-2009. Setelah mencapai puncaknya pada triwulan IV-2009, posisi baki debit kredit ke sektor konstruksi terus mengalami perlambatan, hingga mencapai titik terdalam pada triwulan III-2009, dengan pertumbuhan sebesar 17,9% (yoy).

Grafik 1.39. Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Konstruksi

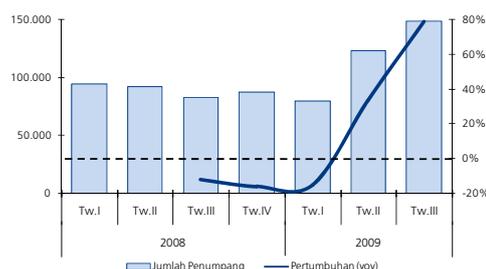


Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung

2.6. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor pengangkutan dan komunikasi pada triwulan III-2009 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2009. Salah satu indikator yang mencerminkan kondisi tersebut adalah jumlah penumpang di Bandara Husein Sastranegara, yang mengalami peningkatan pertumbuhan pada triwulan III-2009, yaitu dari tumbuh 33,55% (yoy) pada triwulan II-2009 menjadi 78,97% pada triwulan III-2009. Peningkatan terjadi, baik pada pertumbuhan penumpang domestik maupun internasional. Penumpang domestik, yang sebelumnya tumbuh negatif, pada triwulan III-2009 mampu tumbuh positif dengan pertumbuhan cukup tinggi. Hal ini merupakan dampak dari ditutupnya beberapa rute domestik pada periode yang sama di tahun 2008. Sementara itu, jumlah kendaraan yang melintasi 12 gerbang tol di Jawa Barat masih tumbuh relatif tinggi, yaitu sebesar 6,7% (yoy) untuk

Grafik 1.40. Jumlah Penumpang Domestik dan Internasional di Bandara Husein Sastranegara

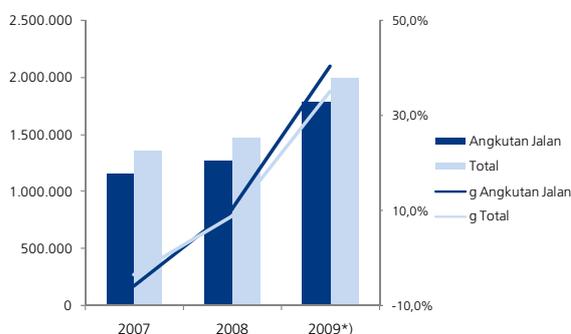


Sumber: PT Persero Angkasa Pura II

kendaraan masuk dan 4,4% (yoy) untuk kendaraan yang keluar gerbang tol di Jawa Barat.

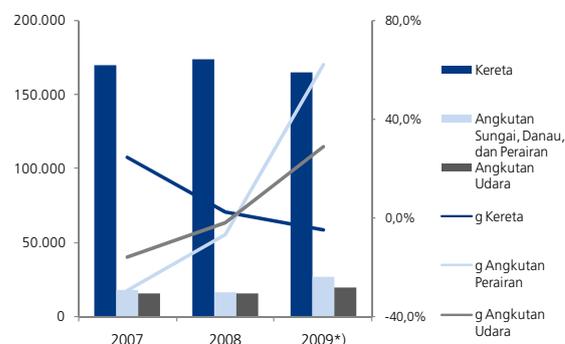
Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan para pemudik Jawa Barat, jumlah angkutan Lebaran untuk tahun 2009 juga ditingkatkan. Peningkatan jumlah dilakukan untuk angkutan jalan, angkutan sungai, danau, dan perairan, serta angkutan udara, selama jumlah kereta untuk keperluan Lebaran mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008. Secara total, jumlah angkutan Lebaran meningkat 35,2% (yoy) pada tahun 2009, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2008 yang hanya sebesar 8,8%.

Grafik 1.41. Jumlah Angkutan Lebaran Total dan Angkutan Jalan untuk Keperluan Lebaran di Jawa Barat



Sumber: Dinas Perhubungan Jawa Barat

Grafik 1.42. Jumlah Kereta, Angkutan Sungai, Danau dan Perairan, dan Angkutan Udara untuk Keperluan Lebaran di Jawa Barat



Sumber: Dinas Perhubungan Jawa Barat

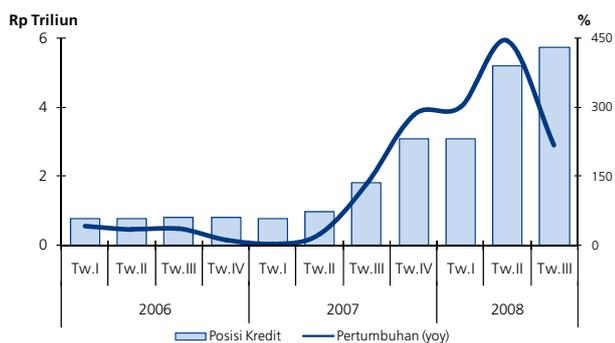
Tabel 1.9. Jumlah Kendaraan yang Melintasi 12 Gerbang Tol di Jawa Barat

Gerbang Tol	Tw.III-08		Tw.III-09		Pertumbuhan (yoy)	
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
Sadang	397.444	403.956	472.485	448.111	18,9%	10,9%
Jatiluhur	329.350	332.476	334.472	354.383	1,6%	6,6%
Padalarang Barat	1.766.209	1.934.139	2.011.706	1.932.843	13,9%	-0,1%
Padalarang	1.527.008	1.399.371	1.611.383	1.467.057	5,5%	4,8%
Baros 1	486.332	733.822	481.356	765.672	-1,0%	4,3%
Baros 2	734.933	517.741	759.052	515.529	3,3%	-0,4%
Pasteur	2.386.812	2.328.569	2.543.871	2.485.574	6,6%	6,7%
Pasir Koja	1.409.415	1.122.511	1.421.771	1.179.946	0,9%	5,1%
Kopo	976.264	1.054.697	1.022.053	1.096.667	4,7%	4,0%
M Toha	779.429	866.816	853.251	931.664	9,5%	7,5%
Buah Batu	1.208.841	1.302.141	1.184.199	1.267.619	-2,0%	-2,7%
Cileunyi	1.733.820	1.825.545	1.963.071	1.987.383	13,2%	8,9%
TOTAL	13.735.857	13.821.784	14.658.670	14.432.448	6,7%	4,4%

Sumber: PT Jasa Marga Kantor Cabang Purbaleunyi

Setelah tumbuh tinggi pada triwulan sebelumnya, penyaluran kredit perbankan ke sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami perlambatan. Pertumbuhan melambat signifikan, yaitu dari 444,6% (yoy) pada triwulan II-2009 menjadi 217,0% pada triwulan III-2009. Perlambatan tersebut menunjukkan pergerakan penyaluran kredit ke sektor dimaksud yang mulai bergerak kembali ke arah normal.

Grafik 1.43. Penyaluran Kredit oleh Bank Umum ke Sektor Pengangkutan dan Komunikasi



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung

2.7. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih

Peningkatan kinerja subsektor listrik diperkirakan mendorong pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air semakin meningkat. Kondisi tersebut diindikasikan oleh peningkatan konsumsi listrik di Jawa Barat selama triwulan III-2009, yang mengalami peningkatan pertumbuhan, dari 23,62% (yoy) pada triwulan II-2009 menjadi 27,04% pada triwulan III-2009. Konsumsi listrik yang meningkat tersebut didorong oleh peningkatan dari sisi konsumsi listrik untuk industri, akibat peningkatan aktivitas produksi di sektor industri pengolahan, yang tentunya menjadikan listrik sebagai salah satu faktor produksinya. Sementara itu, konsumsi listrik untuk rumah tangga tumbuh masih relatif stabil dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya.

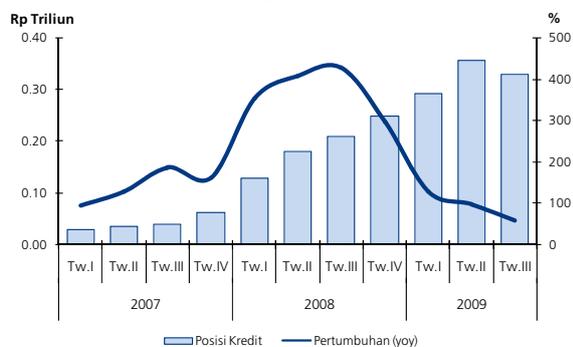
Tabel 1.10. Pemakaian Listrik di Jawa Barat (Juta Kwh)

Penggunaan	2008				2009			Pertumbuhan Tw.II-09 (yoy)	Pertumbuhan Tw.III-09 (yoy)
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III		
Rumah Tangga	2,383	2,419	2,513	2,611	2,682	2,903	3,000	19.99%	19.41%
Industri	3,623	3,807	3,918	4,083	4,202	4,794	5,169	25.92%	31.93%
Total	6,006	6,226	6,431	6,694	6,884	7,697	8,170	23.62%	27.04%

Sumber: PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Walaupun sektor listrik, gas, dan air bersih diperkirakan mengalami peningkatan, penyaluran kredit perbankan di Jawa Barat ke sektor tersebut mengalami perlambatan pada triwulan III-2009. Posisi baki debit kredit tersebut tumbuh sebesar 58,0% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan kredit pada triwulan sebelumnya yang sebesar 96,6%.

Grafik 1.44. Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih

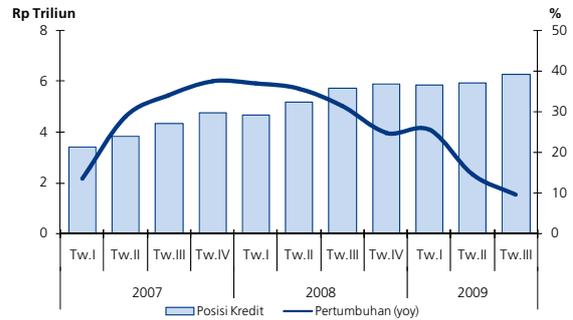


Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung

2.8. Sektor Jasa-Jasa

Sektor jasa-jasa diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan III-2009. Perlambatan tersebut diindikasikan oleh perlambatan laju pertumbuhan tahunan kredit yang disalurkan perbankan di Jawa Barat ke sektor jasa, baik jasa dunia usaha maupun jasa sosial. Pertumbuhan pada triwulan III-2009 adalah sebesar 9,5% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 14,4%.

Grafik 1.45. Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Jasa Dunia Usaha dan Sosial



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung

BOKS 1

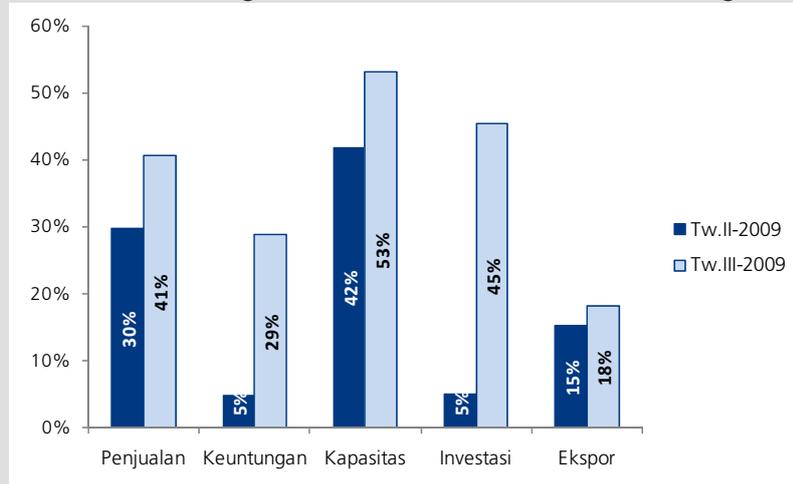
HASIL SURVEI ARAH PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA BARAT

Untuk mengetahui arah pertumbuhan ekonomi Jawa Barat terkini, pada bulan September 2009, KBI Bandung melakukan survei terhadap para pelaku usaha di sektor-sektor dominan di Jawa Barat. Total responden yang disurvei sebanyak 39 perusahaan, yang bergerak di sektor industri pengolahan (19 responden) dan perdagangan, hotel, dan restoran (20 responden). Secara umum, responden menyatakan mengalami peningkatan kegiatan usaha pada triwulan III-2009.

Hasil Survei terhadap Sektor Industri Pengolahan

Hampir 50% responden di sektor industri pengolahan bergerak di subsektor tekstil, barang kulit, dan alas kaki (9 responden). Berdasarkan hasil survei tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja sektor industri pengolahan secara tahunan (yoy) mengalami peningkatan pada triwulan III-2009, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yang didorong oleh beberapa hal, yaitu meningkatnya permintaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta penentuan harga jual yang lebih optimal. Sementara, peningkatan tersebut tercermin pula pada seluruh indikator usaha yang disurvei, meliputi penjualan, keuntungan, kapasitas produksi, investasi, serta ekspor. Peningkatan paling signifikan terjadi pada indikator investasi, yang tumbuh dari 5% (yoy) pada triwulan II-2009 menjadi 45% pada triwulan III-2009. Hal ini diperkirakan sebagai akibat meningkatnya optimisme kalangan pelaku usaha terhadap kondisi perekonomian ke depan, serta kondisi ekonomi politik yang relatif stabil pasca Pemilu Presiden yang berjalan aman dan lancar.

Grafik 1. Perkembangan Indikator Usaha di Sektor Industri Pengolahan

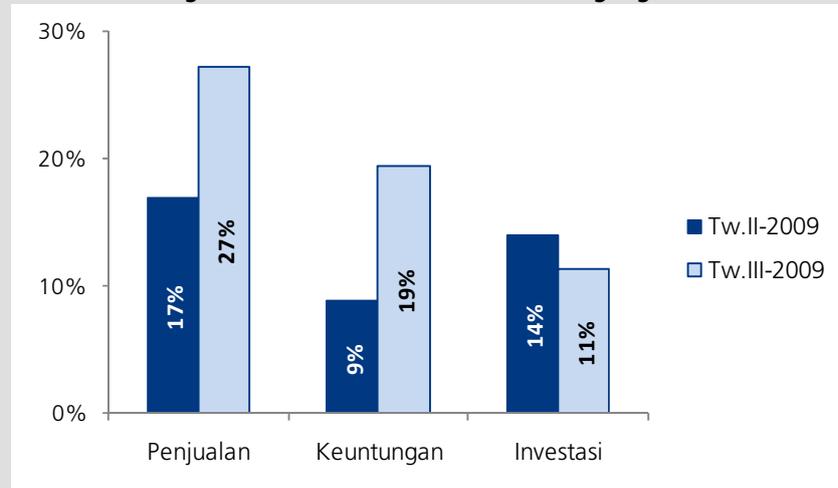


Hasil Survei terhadap Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Perkembangan yang searah juga terjadi pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR). Berdasarkan hasil survei, pada triwulan III-2009, pertumbuhan indikator penjualan dan keuntungan secara tahunan mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan penjualan meningkat dari 17% (yoy) pada triwulan II-2009 menjadi 27% pada triwulan III-2009, sementara

keuntungan tumbuh dari 9% (yoy) menjadi 19% pada triwulan III-2009. Namun demikian, indikator investasi mengalami sedikit perlambatan, yaitu dari 14% (yoy) pada triwulan II-2009 menjadi 11% pada triwulan III-2009.

Grafik 2. Perkembangan Indikator Usaha di Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran



BOKS 2

PROGRAM-PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI DI JAWA BARAT

Jawa Barat memiliki potensi yang sangat besar sebagai daerah tujuan investasi. Berdasarkan rekapitulasi minat-minat usaha yang sudah mendapat izin (SPPM/Surat Persetujuan Penanaman Modal), dari tahun 2005 – 2008, terdapat lebih dari Rp78 triliun minat investasi yang dapat digali menjadi realisasi investasi. Investasi tersebut terdiri dari 1.167 proyek dan memiliki peluang kerja sebanyak 202.846 orang. Upaya peningkatan realisasi investasi di Jawa Barat tidak terlepas dari berbagai program Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Jawa Barat untuk meningkatkan pelayanan, diantaranya program proaktif melalui kunjungan langsung ke kawasan industri yang ada di Jawa Barat. Pada program tersebut, BKPPMD melakukan evaluasi pelayanan, menampung permasalahan, dan mendapatkan masukan dari para investor. Hal ini secara tidak langsung merupakan promosi yang efektif, terutama lewat pembentukan citra positif di kalangan investor. Sepanjang tahun 2009, BKPPMD Jawa Barat sudah melakukan pertemuan dengan investor dan calon investor di 13 kawasan dari 24 kawasan industri yang berada di wilayah Jawa Barat.

Di samping itu, untuk mendorong percepatan investasi di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan SK No 570/512- BKPPMD tanggal 14 April 2009 tentang pembentukan satuan tugas (*task force*) penanganan permasalahan perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat. *Task force* ini terdiri dari 19 orang yang merupakan pemangku kepentingan dunia investasi di Jawa Barat, dan dikepalai oleh Kepala BKPPMD Jawa Barat. *Task force* berfungsi untuk membantu penanganan masalah yang dialami oleh para investor, terutama masalah perizinan. Berdasarkan informasi yang digali dari masyarakat, media massa, instansi pemerintah di provinsi dan kabupaten/kota, serta perusahaan melalui surat dan Laporan Penanaman Modal, ditemukan 82 permasalahan yang dialami para investor di Jawa Barat. Hingga saat ini, beberapa di antaranya telah terselesaikan. Selain itu, *task force* juga melakukan kunjungan secara aktif ke kawasan industri untuk mendengarkan langsung keluhan dan permasalahan dari dunia usaha, dan mencari solusi terbaik. Selanjutnya, *task force* akan memberikan fasilitasi untuk memberikan gambaran langkah solusi agar permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh *task force*, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui oleh para investor. Secara garis besar, masalah yang dihadapi antara lain terkait ketenagakerjaan, pemasaran, dan pertanahan. Dari sisi ketenagakerjaan, beberapa masalah yang ditemui antara lain kurangnya tenaga kerja terampil dari daerah setempat, tuntutan tenaga kerja atas nama putra daerah dengan memaksakan kehendak dan/atau kebijakan Pemda yang kontra produktif, serta disharmonisasi hubungan industrial antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja, yang kemudian memicu seringnya demo buruh. Dari aspek pemasaran, pelaku usaha merasakan kesulitan akibat tingginya suku bunga dan penurunan daya beli, kesulitan promosi produk luar negeri, serta keperluan akan *permanent display* produk di negara tujuan ekspor yang dikelola oleh pemerintah. Dari sisi aspek pertanahan, pelaku usaha mengeluhkan sulitnya mendapatkan izin lokasi dan keterbatasan lahan untuk perluasan. Di luar ketiga aspek tersebut, pelaku usaha menemui kesulitan akibat adanya

praktek percaloan, premanisme, kurang memadainya infrastruktur jalan dan listrik, kemacetan lalu lintas, birokrasi perizinan yang rumit, fluktuasi mata uang rupiah, serta banyaknya Peraturan Daerah (Perda) sejak diberlakukannya otonomi daerah.

Dari hasil identifikasi tersebut, BKPPMD selaku ketua *task force*, akan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang tergabung dalam *task force*, dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing instansi.

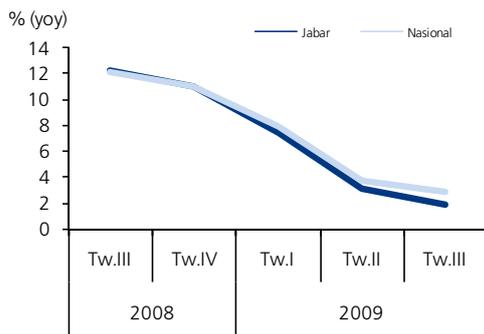
BAB 2

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH



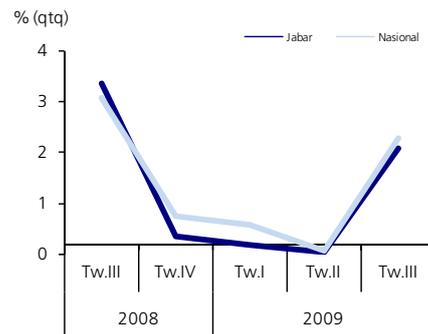
Tren penurunan laju inflasi tahunan Jawa Barat masih berlanjut pada triwulan III-2009. Inflasi Jawa Barat pada triwulan III-2009 tercatat sebesar 1,87% (yoy) atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 3,14% serta inflasi nasional yang sebesar 2,83% (Grafik 2.1). Sementara itu, secara triwulanan, Jawa Barat mengalami inflasi sebesar 1,87% (qtq) meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,15% (Grafik 2.2). Namun demikian, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional Jawa Barat yang sebesar 2,07% (qtq). Inflasi bulanan Jawa Barat juga mengalami tren kenaikan dari bulan Juli hingga September 2009.

Grafik 2.1. Inflasi Tahunan Jawa Barat dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, TD 2002.
Keterangan: * Inflasi dengan Tahun Dasar 2002;
** Inflasi dengan Tahun Dasar 2007.

Grafik 2.2. Inflasi Triwulanan Jawa Barat dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, TD 2002.
Keterangan: * Inflasi dengan Tahun Dasar 2002;
** Inflasi dengan Tahun Dasar 2007.

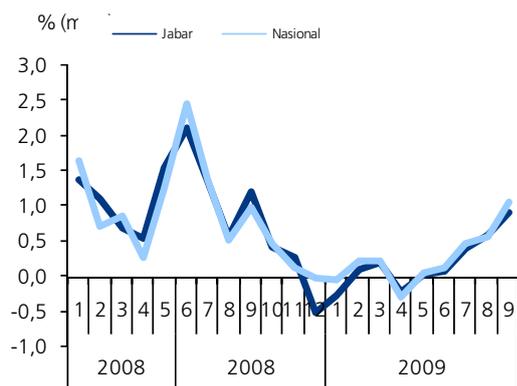
Inflasi Jawa Barat selama triwulan III-2009 disebabkan oleh sebagian besar faktor fundamental maupun non fundamental. Faktor fundamental yang paling berpengaruh adalah kenaikan ekspektasi inflasi dan tekanan permintaan. Bulan Ramadhan dan Idul Fitri serta tahun ajaran baru merupakan faktor utama yang menyebabkan ekspektasi inflasi dan permintaan masyarakat mengalami peningkatan. Kondisi tersebut secara musiman selalu meningkatkan tekanan inflasi. Sementara itu, faktor *administered price* (harga barang yang ditentukan oleh pemerintah) naik yang berasal dari kenaikan tarif tol dan harga gas elpiji. Selain itu, pengaruh bulan Ramadhan juga dirasakan melalui kenaikan harga bahan makanan seperti daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, cabe merah, sayur-sayuran, dan bumbu-bumbuan

1. PERKEMBANGAN INFLASI

Secara tahunan, tren penurunan laju inflasi kembali berlanjut dari 3,13% (yoy) pada triwulan II-2009 menjadi 1,87% pada triwulan III-2009. Secara umum, penurunan laju inflasi disebabkan oleh berkurangnya tekanan eksternal dan pengaruh harga BBM dibandingkan dengan tahun sebelumnya (*base-effect*). Pelemahan tekanan inflasi terjadi pada hampir semua kelompok pembentuk inflasi. Kelompok yang mengalami penurunan laju inflasi tahunan terbesar adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar yakni dari 3,59% pada triwulan II-2009 menjadi 0,45% pada triwulan III-2009. Sementara itu, deflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan semakin membesar dari -7,03% pada triwulan II-2009 menjadi -8,34% pada triwulan III-2009.

Secara triwulanan, inflasi Jawa Barat meningkat menjadi sebesar **1,87% (qtq)**. Sumbangan inflasi terbesar berasal dari kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau serta kelompok perumahan, air, gas, dan listrik. Kenaikan inflasi ketiga kelompok tersebut disebabkan oleh kenaikan permintaan dan ekspektasi harga pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri, serta kenaikan biaya pendidikan setiap tahun ajaran baru. Namun demikian, inflasi triwulan ini lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya karena hasil panen yang relatif baik, pelemahan permintaan dunia akibat krisis keuangan global, dan tekanan eksternal yang minimal.

Grafik 2.3. Inflasi Bulanan Jawa Barat dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.
Keterangan: data inflasi nasional bulan Juni 2008 tidak ditampilkan karena perbedaan tahun dasar. Pada grafik di atas, inflasi Jawa Barat berdasarkan Tahun Dasar 2002, sedangkan inflasi nasional sejak Juni 2008 berdasarkan Tahun Dasar 2007.

Tren kenaikan inflasi bulanan Jawa Barat masih berlanjut pada triwulan III-2009 (Grafik 2.3).

Pada bulan Juli 2009, Jawa Barat mengalami inflasi sebesar 0,38% (mtm) disebabkan oleh berkurangnya stok bahan makanan sehubungan oleh musim tanam padi. Di samping itu, seperti tahun-tahun sebelumnya tarif jasa pendidikan tercatat mengalami kenaikan pada bulan Juli hingga September. Selain itu, bulan Ramadhan yang dimulai sejak pertengahan bulan Agustus hingga September 2009 juga menyumbangkan andil inflasi yang cukup besar, yakni masing-masing sebesar 0,58% pada bulan Agustus dan 0,90% pada bulan September 2009.

1.1. INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA

Inflasi Tahunan

Hampir seluruh kelompok barang dan jasa penyumbang inflasi mengalami penurunan laju inflasi tahunan (Tabel 2.1). Penurunan laju inflasi tahunan terutama terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan air bersih, yakni dari 3,59% pada triwulan sebelumnya menjadi 0,45%. Hal ini disebabkan oleh relatif stabilnya harga gas elpiji pada tahun 2009 serta konversi minyak tanah yang berjalan dengan baik.

Sementara itu, penurunan juga terjadi pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi lebih dalam, yakni dari 7,03% menjadi 8,34%. Deflasi yang terjadi pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan disebabkan oleh dampak kenaikan harga BBM yang masih terjadi hingga triwulan III-2008 sehingga menyebabkan penurunan laju inflasi tahunan (*base-effect*).

Laju inflasi tahunan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga turun cukup besar pada triwulan III-2009, yakni dari 6,22% pada triwulan II-2009 menjadi 4,94% pada triwulan III-2009. Perlambatan laju inflasi kelompok tersebut diperkirakan merupakan pengaruh sementara karena

belum selesainya pencatatan kenaikan tarif pendidikan pada tahun 2009 ini di Jawa Barat oleh BPS pada triwulan III-2009.

Di lain pihak, kelompok bahan makanan adalah satu-satunya kelompok yang mengalami kenaikan laju inflasi tahunan, yakni dari 5,96% pada triwulan II-2009 menjadi 6,22% pada triwulan III-2009. Kenaikan laju inflasi pada kelompok bahan makanan lebih disebabkan oleh pergeseran masa panen pada tahun 2009 yang menjadi lebih awal dibandingkan tahun 2008. Oleh karena itu, inflasi kelompok bahan makanan mengalami kenaikan yang relatif minimal.

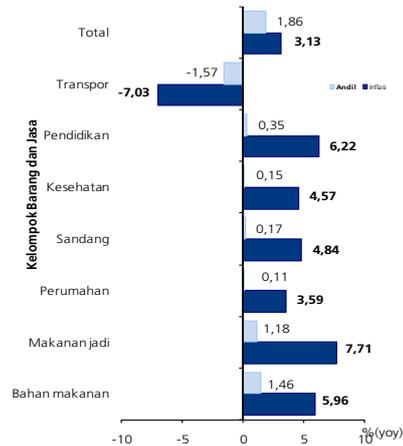
Tabel 2.1. Inflasi Tahunan Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%)

No.	Kelompok	2008		2009			Andil
		Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	
1	Bahan makanan	18,41	16,11	11,67	5,96	6,22	1,46
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	10,96	12,45	10,08	7,71	6,74	1,18
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	7,82	6,76	4,97	3,59	0,45	0,11
4	Sandang	7,03	3,69	6,83	4,84	4,09	0,17
5	Kesehatan	10,17	10,52	5,43	4,57	3,83	0,15
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	7,78	8,61	7,15	6,22	4,94	0,35
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	16,13	12,78	3,53	-7,03	-8,34	-1,57
Umum		12,30	11,11	7,45	3,13	1,87	1,87

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

Andil deflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan, yakni sebesar 1,57% mampu menahan laju inflasi tahunan Jawa Barat (Grafik 2.4). Besarnya andil deflasi kelompok tersebut disebabkan oleh penurunan harga BBM dan tarif angkutan pada awal tahun 2009 serta hilangnya pengaruh kenaikan harga BBM pada triwulan III-2008 (*base-effect*). Andil deflasi tersebut mampu menahan sumbangan inflasi kelompok bahan makanan serta makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yang lebih besar dari 1%.

Grafik 2.4. Inflasi Tahunan dan Andil Inflasi Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa Triwulan III-2009



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.
Keterangan: nama kelompok disingkat.

Inflasi Triwulanan

Secara triwulanan, sebagian besar kelompok mengalami inflasi yang cukup tinggi. Kelompok bahan makanan mengalami laju inflasi tertinggi, yakni sebesar 4,96% (qtq) (Tabel 2.2). Tingginya inflasi kelompok bahan makanan disebabkan oleh keterbatasan pasokan bahan pangan pada musim tanam serta permintaan yang meningkat pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Sementara, kelompok

pendidikan rekreasi dan olah raga yang juga mengalami inflasi kedua tertinggi setelah kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 3,12%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan biaya pendidikan sehubungan dengan mulainya awal tahun ajaran baru pada triwulan III-2009.

Kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan air bersih adalah satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi, yakni sebesar 0,15% sehingga dapat menahan laju inflasi Jawa Barat pada triwulan III-2009. Deflasi yang terjadi pada kelompok tersebut disebabkan oleh penurunan harga bahan bakar rumah tangga. Pertamina Bandung menginformasikan bahwa konversi minyak tanah yang berjalan dengan baik merupakan penyebab utama harga minyak tanah bergerak kembali ke level semula seperti pada tahun 2008 bahkan memiliki kecenderungan penurunan harga.

Tabel 2.2. Inflasi Triwulanan di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%)

No.	Kelompok	2008		2009			Andil
		Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.III
1	Bahan makanan	4,79	0,81	2,06	-1,63	4,96	1,17
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	2,78	1,82	2,01	0,85	0,20	0,35
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	2,98	0,25	-0,10	0,45	-0,15	-0,04
4	Sandang	0,91	0,86	4,44	-1,37	0,18	0,01
5	Kesehatan	1,50	0,74	1,57	0,69	0,78	0,04
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	4,38	1,54	0,14	0,08	3,12	0,23
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	2,07	-3,17	-5,95	0,01	0,66	0,11
Umum		3.14	0.15	0.00	-0.15	1.87	1.87

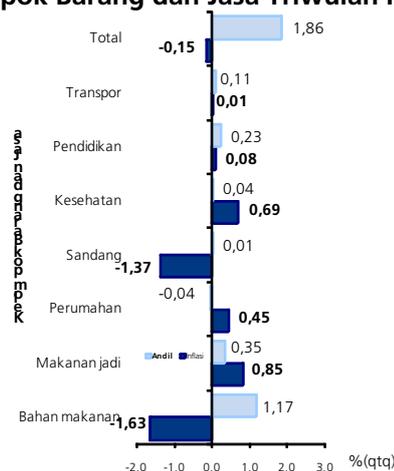
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

Di samping merupakan kelompok dengan angka inflasi tertinggi, kelompok bahan makanan juga menyumbang inflasi terbesar, yakni sebesar **1,17% (Grafik 2.5)**. Jika dibandingkan dengan kelompok lain hanya kelompok bahan makanan yang menyumbang inflasi lebih level 1%. Andil inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau juga relatif besar, yakni sebesar 0,35%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan bahan baku pembuatan makanan jadi serta bobot kelompok tersebut yang relatif besar. Selain itu, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga memberikan andil inflasi sebesar 0,23%.

a. Kelompok Bahan Makanan

Inflasi kelompok bahan makanan yang sebesar 4,96% dan andil sebesar 1,17% pada triwulan III-2009 disebabkan oleh kenaikan harga pada hampir seluruh komoditas dalam kelompok bahan makanan (Grafik 2.6). Kenaikan permintaan bahan pangan pada triwulan III-2009 tercermin

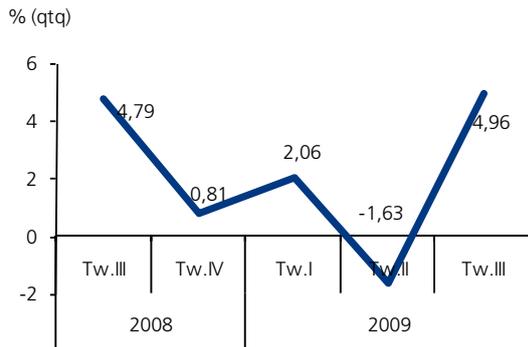
Grafik 2.5. Inflasi dan Andil Inflasi Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa Triwulan III-2009



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.
Keterangan: nama kelompok disingkat.

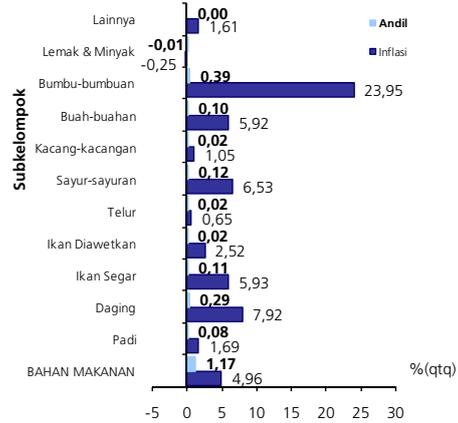
dari penurunan persediaan komoditas pangan milik pengusaha. Kenaikan harga terutama pada komoditas cabe merah dan bawang putih. Pasokan cabe merah pada triwulan III-2009 relatif terbatas karena sedang memasuki musim tanam dan hasil panen yang lebih rendah akibat curah hujan yang lebih tinggi pada tahun ini. Kenaikan harga tersebut terlihat dari harga cabe merah sebelum bulan Ramadhan sebesar Rp14.846/kg sementara setelah Idul Fitri naik menjadi Rp38.045/kg. Sementara itu, harga bawang putih naik disebabkan oleh produksi negara eksportir, seperti Cina yang turun. Kondisi tersebut tercermin dari harga rata-rata bawang putih sebelum bulan Ramadhan yang sebesar Rp9.669/kg menjadi Rp15.434/kg setelah Idul Fitri.

Grafik 2.6. Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Jawa Barat



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.7. Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan III-2009

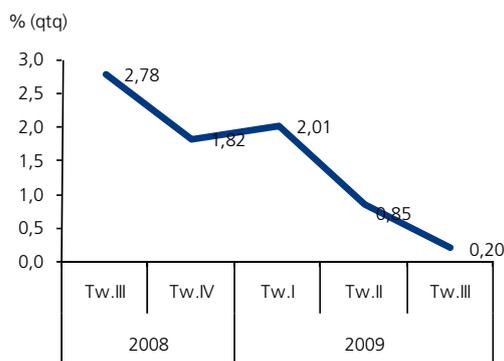


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

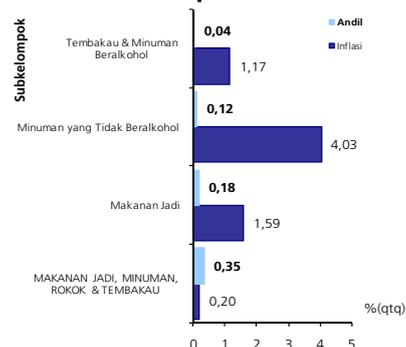
b. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau

Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau juga mengalami inflasi, yakni sebesar 0,20% dan andil sebesar 0,35% (Grafik 2.8). Inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau turun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni dari 0,85% pada triwulan II-2009 menjadi 0,20% pada triwulan III-2009. Berdasarkan sumbangannya, inflasi kelompok makanan jadi relatif besar yakni sebesar 0,35%. Hal ini semata-mata disebabkan oleh bobot kelompok ini yang cukup besar. Inflasi yang terjadi pada kelompok ini disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok bahan makanan serta ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga barang dan jasa pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

Grafik 2.8. Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi di Jawa Barat



Grafik 2.9. Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan III-2009



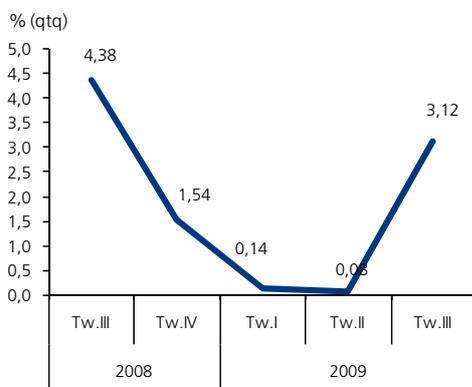
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

c. Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga

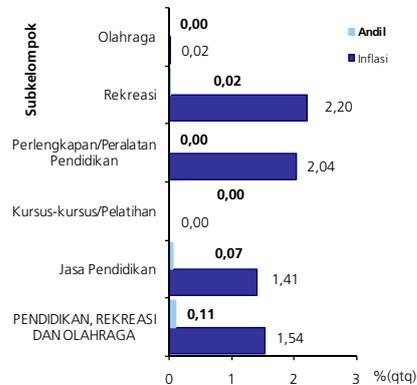
Kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga mengalami inflasi sebesar 3,12% dan andil inflasi sebesar 0,23% atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya (Grafik 2.10). Setiap awal tahun ajaran baru sekolah pada triwulan III, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami inflasi yang cukup tinggi. Inflasi terjadi sebagai akibat dari liburan sekolah, persiapan menyambut tahun ajaran baru, dan kenaikan biaya pendidikan. Hal ini diindikasikan oleh inflasi subkelompok jasa pendidikan, perlengkapan/peralatan pendidikan, dan rekreasi yang relatif tinggi (Grafik 2.11).

Grafik 2.10. Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga di Jawa Barat



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.11. Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan III-2009



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

1.2. INFLASI MENURUT KOTA

Inflasi Tahunan

Berdasarkan kota, penurunan inflasi tahunan masih terjadi di seluruh kota. Namun demikian, pada triwulan laporan Kota Sukabumi, Tasikmalaya, Cirebon, dan Bogor mengalami inflasi yang tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Jawa Barat. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Sukabumi, yakni sebesar 4,67% (yoy), sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Bandung yakni sebesar 1,53% (Tabel 2.3).

Inflasi di Bogor terjadi karena harga air kemasan meningkat sejak akhir tahun 2008. Kota Bogor merupakan lokasi industri air minum, bahkan pemerintah daerah memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) air kemasan. Namun demikian, kerusakan infrastruktur yang terjadi akibat distribusi air kemasan mendorong perusahaan air minum pindah ke daerah lain sehingga menyebabkan kenaikan harga.

Meskipun inflasi Kota Sukabumi dan Tasikmalaya di atas inflasi Jawa Barat, tetapi laju penurunan inflasi kedua tersebut adalah yang terbaik dibandingkan dengan kota lainnya. Inflasi Kota Sukabumi turun dari 6,91% pada triwulan II-2009 menjadi 4,67% pada triwulan III-2009

sementara inflasi Kota Tasikmalaya turun dari 6,87% pada triwulan II-2009 menjadi 4,25% pada triwulan III-2009.

Berdasarkan sumbangannya, andil inflasi Kota Bandung adalah yang terbesar meskipun angka inflasi Bandung adalah yang terendah bila dibandingkan dengan 6 kota lainnya (Tabel 2.3). Hal ini disebabkan bobot IHK Kota Bandung yang terbesar dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Andil inflasi Kota Bandung adalah sebesar 0,44% hampir sama dengan andil inflasi Kota Bekasi yang sebesar 0,43%. Sementara itu, Kota Sukabumi dan Tasikmalaya yang memiliki laju inflasi yang tertinggi memiliki andil inflasi yang terendah karena bobot kedua kota tersebut yang paling kecil.

Tabel 2.3. Inflasi Tahunan di Jawa Barat Menurut Kota (%)

No.	Kota	2008		2009			Andil Tw.III
		Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	
1	Bandung	10,84	10,23	6,31	2,17	1,53	0,44
2	Bekasi	11,74	10,10	6,68	3,59	1,54	0,43
3	Depok	N/A	11,70	0,00	2,57	1,52	0,31
4	Bogor	9,62	14,20	6,17	3,38	2,71	0,32
5	Cirebon	13,41	14,14	8,22	5,23	3,67	0,15
6	Sukabumi	9,15	11,39	8,25	6,91	4,67	0,18
7	Tasikmalaya	12,17	12,07	9,18	6,87	4,25	0,12
Gabungan		7,45	11,11	7,45	3,13	1,87	1,87

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

Inflasi Triwulanan

Secara triwulanan, setelah pada triwulan II-2009 sebagian besar kota mengalami deflasi, pada triwulan III-2009 seluruh kota mengalami inflasi yang cukup tinggi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Cirebon dan Depok, yakni masing-masing sebesar 2,49% dan 2,43%, sedangkan yang terendah adalah di Kota Tasikmalaya, yakni sebesar 1,09% (Tabel 2.4).

Menurut sumbangannya, Kota Bekasi memberikan andil inflasi tertinggi yakni sebesar 0,50%. Andil inflasi Kota Bandung dan Depok juga tidak jauh berbeda dengan Kota Bekasi, yakni sebesar 0,47% dan 0,49%. Hal ini semata-mata merupakan pengaruh bobot ketiga kota tersebut yang cukup besar. Sementara itu, empat kota lainnya memiliki andil inflasi yang relatif kecil, yakni berkisar antara 0,01% hingga 0,20%.

Tabel 2.4. Inflasi Triwulanan di Jawa Barat Menurut Kota (%)

No.	Kota	2008		2009			Andil Tw.III
		Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	
1	Bandung	2,28	-0,07	0,11	-0,14	1,64	0,47
2	Bekasi	3,82	0,03	0,01	-0,26	1,76	0,50
3	Depok	3,49	0,18	-0,87	-0,20	2,43	0,49
4	Bogor	2,38	0,46	0,79	-0,27	1,72	0,20
5	Cirebon	4,04	0,19	0,91	0,04	2,49	0,10
6	Sukabumi	3,42	1,32	1,67	0,35	1,25	0,05
7	Tasikmalaya	3,64	1,22	0,78	1,09	1,09	0,03
		0,00	0,15	0,00	-0,15	1,87	1,87

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

Laju inflasi Kota Cirebon yang relatif tinggi disebabkan oleh kenaikan harga emas perhiasan serta tarif jasa pendidikan yang cukup besar, sebagaimana tercermin dari inflasi kelompok sandang serta pendidikan, rekreasi, dan olah raga. Kenaikan harga emas perhiasan Kota Cirebon hampir selalu lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini diduga karena besarnya minat masyarakat wilayah Cirebon, yang merupakan daerah asal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap emas relatif tinggi. Sementara itu, inflasi Kota Depok yang cukup tinggi diduga didorong oleh inflasi kelompok bahan makanan yang mencapai 10,20% pada triwulan III-2009 (Tabel 2.5). Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang relatif tinggi sehingga beberapa kualitas komoditas bumbu-bumbuan dan sayur-sayuran kurang baik.

Sementara itu, Kota Bogor mengalami inflasi tertinggi pada kelompok bahan makanan, yakni sebesar 7,83%. Peningkatan tekanan inflasi kelompok bahan makanan diperkirakan karena kenaikan harga komoditas sayur-sayuran seperti bayam dan kedelai, akibat curah hujan yang relatif tinggi.

Jika pada umumnya Kota Tasikmalaya mengalami inflasi yang tertinggi dari 7 kota, kali ini Kota Tasikmalaya mengalami laju inflasi yang terendah. Hal ini terutama disebabkan oleh inflasi kelompok bahan makanan Kota Tasikmalaya yang lebih rendah. Harga telur ayam ras di kota ini mengalami deflasi atau hampir kembali ke level harga sebelum bulan Ramadhan, yakni bulan Juli 2009.

Hanya Kota Bekasi dan Sukabumi yang mengalami deflasi pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, yakni masing-masing sebesar sebesar 1,82% (Tabel 2.5). Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan program konversi minyak tanah pada kedua daerah tersebut berjalan dengan baik sehingga terjadi penurunan harga minyak tanah secara signifikan.

Tabel 2.5. Inflasi Triwulanan di Jawa Barat Menurut Kota & Kelompok Barang dan Jasa Triwulan II-2009 (qtq, %)

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Dpk	Bgr	Cn	Skbm	Tsm	
1	Bahan makanan	4,16	4,58	7,83	2,82	5,54	3,23	2,28	4,96
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	2,27	1,91	1,44	2,23	2,17	0,94	1,01	0,20
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	0,02	-0,70	0,07	0,17	0,03	-0,07	0,09	-0,15
4	Sandang	-0,78	0,69	0,89	0,60	1,88	-1,59	0,22	0,18
5	Kesehatan	0,39	0,74	-0,17	4,71	1,36	0,22	1,26	0,78
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	2,98	3,19	3,61	1,58	6,34	2,89	2,50	3,12
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	0,72	0,63	0,29	1,24	1,94	0,90	1,19	0,66
Umum		1,64	1,76	2,43	1,72	2,49	1,25	1,09	1,87

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI TRIWULANAN

Penyebab inflasi triwulanan pada triwulan III-2009 berasal baik dari faktor fundamental yakni kenaikan inflasi inti maupun faktor non fundamental, yakni kenaikan harga bahan

pangan (Tabel 2.6). *Volatile foods* menyumbang inflasi yang cukup tinggi karena masalah pasokan (sehubungan musim tanam dan musim hujan). Sementara, inflasi inti meningkat disebabkan oleh kenaikan ekspektasi inflasi serta meningkatnya permintaan.

Sementara itu, faktor *administered price* relatif minim. Pada akhir bulan September 2009 terjadi kenaikan tarif beberapa ruas tol serta harga gas elpiji non-PSO (*Public Service Obligation*) meskipun demikian dampak kenaikan harga beberapa barang dan jasa yang diatur oleh pemerintah tersebut relatif minimal. Selain itu, apresiasi nilai tukar dan penurunan inflasi negara mitra dagang utama juga menahan laju inflasi Jawa Barat pada triwulan III-2009.

Tabel 2.6. Inflasi Triwulanan Menurut Faktor Penyebab (qtq, %)

Komponen	2008				2009		
	Tw.I*	Tw.II*	Tw.III**	Tw.IV**	Tw.I**	Tw.II**	Tw.III**
Inti	1,38	1,34	1,24	0,52	0,59	0,12	0,60
<i>Administered Price</i>	0,37	2,37	0,79	-0,57	-1,08	0,08	0,08
<i>Volatile Foods</i>	1,43	0,69	1,07	0,19	0,49	-0,39	1,17
Umum	3,17	4,41	3,14	0,15	0,00	-0,15	1,87

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah

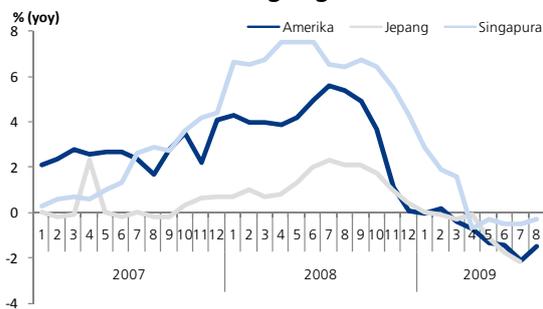
Keterangan: *) dihitung dengan menggunakan *exclusion method* menurut komoditas, **) dihitung dengan menggunakan *exclusion method* menurut subkelompok.

2.1. FUNDAMENTAL

a. Eksternal

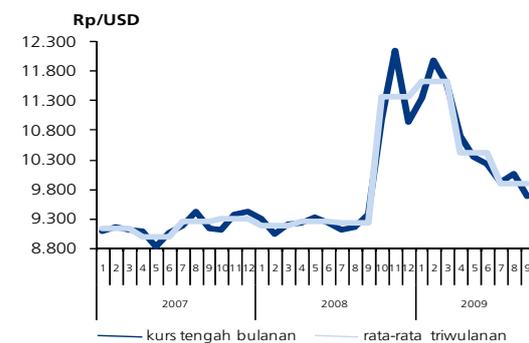
Faktor eksternal cenderung membaik sehingga laju inflasi relatif lebih terkendali jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tekanan eksternal cenderung mereda sebagaimana yang terlihat pada apresiasi nilai tukar penurunan, harga komoditas impor di pasar internasional serta laju inflasi negara mitra dagang utama yang relatif stabil.

Grafik 2.12. Laju Inflasi di Negara Mitra Dagang



Sumber: DSM

Grafik 2.13. Perkembangan Kurs Rupiah



Sumber: DSM

Setelah mengalami penurunan laju inflasi hingga triwulan II-2009, pada triwulan III-2009 negara mitra dagang utama mengalami stagnasi pada tingkat deflasi (Grafik 2.12). Amerika Serikat yang merupakan negara mitra dagang utama Jawa Barat masih melanjutkan tren penurunan laju inflasi, sementara laju inflasi Uni Eropa dan Singapura. Kondisi tersebut disebabkan oleh hilangnya

pengaruh kenaikan harga komoditas pangan di pasar internasional pada tahun 2008 (*base effect*) serta terjadi pelemahan permintaan akibat krisis keuangan global pada tahun 2009.

Selain itu, laju inflasi Jawa Barat juga relatif tertahan akibat apresiasi nilai tukar rupiah yang memiliki andil cukup besar (Grafik 2.13). Apresiasi nilai tukar rupiah disebabkan oleh membaiknya transaksi berjalan maupun transaksi modal neraca pembayaran Indonesia. Selain itu, besarnya penawaran valuta asing di Indonesia terutama disebabkan oleh membaiknya ekspektasi investor atas perekonomian Indonesia terkait krisis keuangan global dibandingkan negara-negara lain. Sementara itu, harga barang-barang yang diimpor mengalami penurunan sejalan dengan penurunan volume impor. Penurunan harga terutama terjadi pada barang-barang konsumsi yang diimpor oleh Jawa Barat seperti makanan dan minuman serta barang konsumsi tahan lama.

Harga gula pasir masih melanjutkan tren peningkatan yang bermula sejak awal tahun 2009. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan harga gula impor (akibat kenaikan harga gula pasir di pasar internasional), serta aksi ambil untung pedagang pada saat stok berkurang. Kekurangan pasokan di Jawa Barat terlihat dari tingginya harga rata-rata lelang gula petani di Jawa Barat (Tabel 2.7). Disparitas harga pada awal triwulan III-2009 yang cukup besar diperkirakan karena aksi ambil untung pedagang atas kenaikan harga gula di pasar internasional.

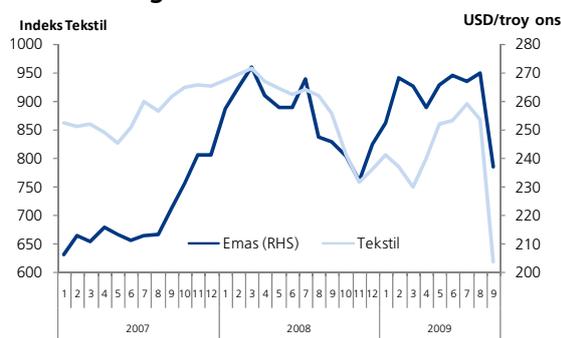
Tabel 2.7 Perkembangan Harga Lelang dan Eceran Gula Pasir

No.	Tanggal	Harga rata-rata lelang	Harga di tingkat eceran
1	25 Juni 2009	Rp6.930/kg	Rp8.544/kg
2	10 Juli 2009	Rp6.673/kg	Rp8.544/kg
3	31 Juli 2009	Rp6.805/kg	Rp8.553/kg
4	5 Agustus 2009	Rp7,419/kg	Rp8.882/kg
5	20 Agustus 2009	Rp8,273/kg	Rp9.710/kg

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Selain itu, harga komoditas strategis di pasar internasional mengalami penurunan harga dibandingkan dengan triwulan II-2009 (Grafik 2.14). Penurunan harga tersebut tercermin dari perkembangan harga tekstil dan emas di pasar dunia. Penurunan harga emas disebabkan oleh membaiknya persepsi investor terhadap perekonomian dunia, sementara penurunan harga tekstil disebabkan oleh pelemahan permintaan dari negara importir.

Grafik 2.14. Perkembangan Harga Komoditas Strategis di Pasar Internasional



Sumber: Bloomberg

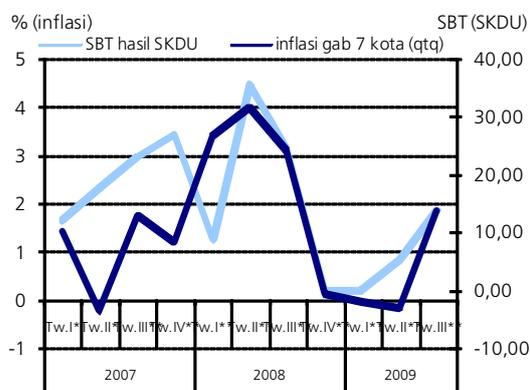
b. Ekspektasi Inflasi

Peningkatan ekspektasi para pelaku ekonomi (khususnya pengusaha dan pedagang eceran) di Jawa Barat terhadap harga barang dan jasa menyebabkan kenaikan laju inflasi Jawa Barat pada triwulan III-2009 meskipun mengalami laju kenaikan yang minimal. Namun demikian, stabilitas politik dan kecenderungan penurunan suku bunga kredit menyebabkan ekspektasi harga barang dan jasa konsumen turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perkembangan ekspektasi tersebut diindikasikan oleh hasil beberapa survei yang dilakukan oleh KBI Bandung, yaitu Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Survei Penjualan Eceran (SPE), dan Survei Konsumen (SK).

Kalangan pengusaha (responden SKDU) memprediksi bahwa masih terjadi kenaikan harga jual/tarif barang/jasa pada triwulan III-2009 setelah mencapai titik terendah pada awal tahun 2009. Hal ini, diindikasikan oleh penurunan angka SBT (saldo bersih tertimbang) hasil survei dari 5,32 menjadi 12,13 (Grafik 2.15). Kenaikan ekspektasi harga pengusaha terjadi di seluruh jenis industri yang disurvei. Namun peningkatan tertinggi terutama terjadi pada industri bahan makanan dan makanan jadi akibat penyelenggaraan bulan Ramadhan.

Ekspektasi pedagang juga mengalami peningkatan pada triwulan III-2009 karena memasuki musim tanam, bulan Ramadhan, dan tahun ajaran baru sekolah. Angka SBT *moving average* 3 bulan terhadap ekspektasi pedagang terhadap harga dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu dalam Survei Penjualan Eceran naik dari 119,64 pada akhir triwulan II-2009 menjadi 124,40 pada triwulan III-2009 (Grafik 2.16).

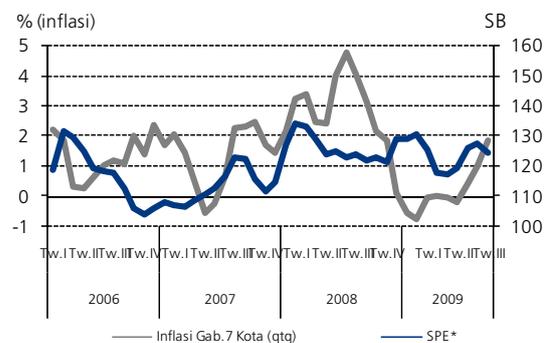
Grafik 2.15. Perkembangan Harga Barang dan Jasa Menurut Pengusaha di Jawa Barat



Sumber: Bank Indonesia.

Keterangan: *) Inflasi Jabar TD 02, **) Inflasi Jabar TD 07

Grafik 2.16. Ekspektasi Pedagang Eceran Terhadap Harga Barang dan Jasa di Kota Bandung



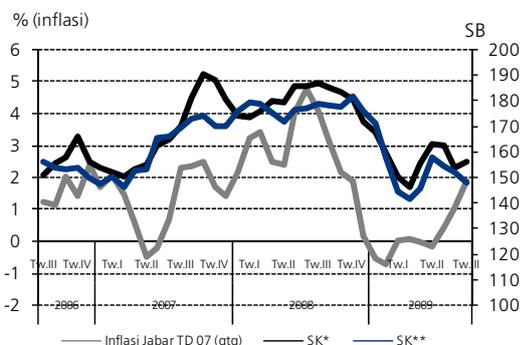
Sumber: SPE-KBI Bandung; BPS Provinsi Jawa Barat.

Keterangan: SPE*=*Moving Average* (3 bulan) Ekspektasi pedagang terhadap harga pada bulan tsb. menurut SPE pada 3 bulan sebelumnya

Seperti yang terjadi setiap triwulan III, tarif jasa pendidikan mengalami kenaikan pada triwulan III-2009. Berdasarkan informasi dari BPS, pada bulan Juli dan Agustus, biasanya terjadi kenaikan biaya pendidikan untuk SD dan SMP, sementara pada bulan September terjadi kenaikan biaya pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi. Berdasarkan pola musimannya, tarif jasa pendidikan biasanya akan menyumbangkan inflasi berkisar 0,3%-0,5% (mtm) selama bulan Juli-September. Namun demikian, hingga akhir triwulan III-2009 sumbangan inflasi jasa pendidikan Jawa Barat hanya

sebesar 0,21% sehingga diperkirakan kenaikan tarif jasa pendidikan akan tercatat juga pada triwulan IV-2009.

Grafik 2.17. Ekspektasi Konsumen Terhadap Harga Barang dan Jasa di Kota Bandung



Sumber: SK-KBI Bandung, BPS Provinsi Jawa Barat

Keterangan: SK*= *Moving Average* (3 bln) Ekspektasi konsumen terhadap harga pada bulan tsb. menurut SK 3 bulan sebelumnya; SK**= *Moving Average* (3 bln) Ekspektasi konsumen terhadap harga pada bulan tsb. menurut SK 6 bulan sebelumnya.

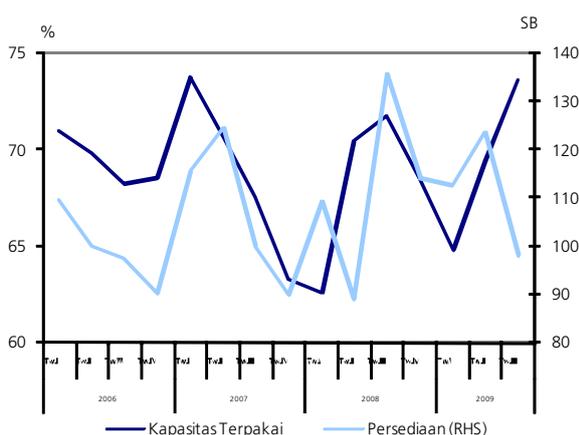
Di sisi lain, konsumen memiliki ekspektasi atas penurunan harga barang dan jasa (Grafik 2.17).

Ekspektasi lebih rendahnya harga barang dan jasa secara umum pada triwulan III-2009 disebabkan oleh kondisi politik yang lebih stabil setelah PEMILU Presiden dan suku bunga kredit yang turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Angka SBT *moving average* 3 bulan terhadap ekspektasi pedagang terhadap harga dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu dalam Survei Konsumen turun dari 162,67 pada akhir triwulan II-2009 menjadi 162,44 pada triwulan III-2009, sementara perkembangan harga 6 bulan yang akan datang juga turun dari 154,44 menjadi 151,78.

c. Interaksi Permintaan dan Penawaran

Dari sisi permintaan, sebagaimana dikemukakan pada BAB 1, daya beli masyarakat Jawa Barat diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh perkembangan penghasilan di Kota Bandung. Peningkatan penghasilan terutama disebabkan oleh realisasi Tunjangan Hari Raya dan perbaikan kondisi perekonomian.

Grafik 2.18. Kapasitas Terpakai di Jawa Barat



Sumber: SKDU-KBI Bandung

Peningkatan sisi permintaan diperkirakan masih dapat diimbangi oleh sisi penawaran sebagaimana terlihat dari meningkatnya kapasitas terpakai industri di Jawa Barat serta turunnya persediaan barang (stok). Industri di Jawa Barat masih memiliki kapasitas untuk meningkatkan produksinya mengingat kapasitas terpakai industri masih berkisar di bawah 75%. Selama triwulan III-2009 industri telah meningkatkan kapasitas terpakainya yakni dari 69,41% pada triwulan II-2009 menjadi sebesar 73,51% pada triwulan III-2009 (Grafik 2.18). Peningkatan utilisasi kapasitas terjadi pada sebagian besar industri di Jawa Barat seperti pertanian, pertambangan, serta listrik, gas, dan air bersih. Sementara itu, persediaan tanaman pangan mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sebagaimana terlihat dari angka SBT hasil SKDU triwulan III-2009 yang sebesar 98,21.

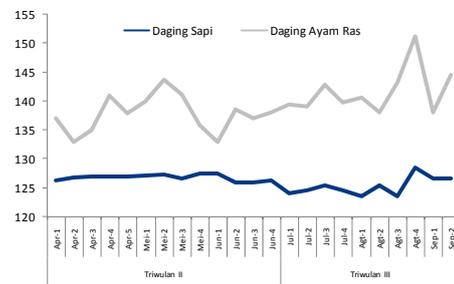
2.2. NON FUNDAMENTAL

a. Volatile Foods

Hasil Survei Pemantauan Harga Mingguan (SPHM) di Kota Bandung menunjukkan bahwa harga sebagian besar *volatile foods* mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi ini disebabkan pada triwulan III-2009 Jawa Barat sedang memasuki musim tanam dan kenaikan permintaan pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri (Boks 2. Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi Jawa Barat). Berdasarkan komponen pembentuk inflasi kelompok bahan makanan, seluruh subkelompok dalam kelompok tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Kenaikan laju inflasi terjadi pada subkelompok daging-dagingan yang terutama disebabkan oleh kenaikan harga daging ayam ras dan daging sapi (Grafik 2.19). Kondisi stok daging ayam ras dan daging sapi mengalami surplus, meskipun sebagian besar didatangkan dari luar Jawa Barat, yakni daging ayam ras dari Jawa Timur dan daging sapi dari luar negeri.

Grafik 2.19. Perkembangan Harga Beberapa Komoditas pada Subkelompok Daging-dagingan

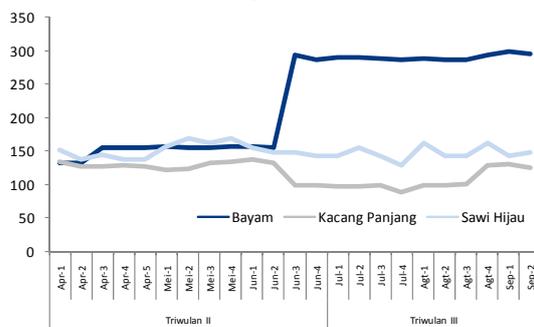


Sumber: SPHM KBI Bandung

Subkelompok sayur-sayuran mengalami inflasi yang relatif tinggi pada triwulan III-2009 (Grafik 2.20). Kenaikan harga terjadi pada beberapa komoditas, seperti bayam, dan kacang panjang. Produksi bayam terhambat karena curah hujan yang tinggi. Sementara, hanya pada bulan Ramadhan kacang panjang mengalami kenaikan harga.

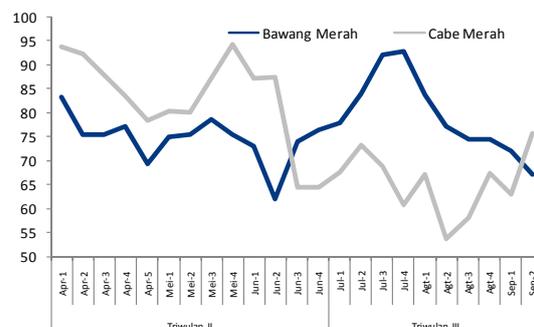
Subkelompok bumbu-bumbuan mengalami inflasi yang tertinggi diantara subkelompok dalam kelompok bahan makanan (Grafik 2.21). Komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah bawang merah. Bawang merah meningkat menjelang bulan Ramadhan dan musim penghujan. Namun demikian, setelah melewati masa tanam harga bawang merah kembali normal.

Grafik 2.20. Perkembangan Harga Beberapa Komoditas pada Subkelompok Sayur-sayuran



Sumber: SPHM KBI Bandung

Grafik 2.21. Perkembangan Harga Beberapa Komoditas pada Subkelompok Bumbu-bumbuan



Sumber: SPHM KBI Bandung

Harga bawang putih mengalami kenaikan disebabkan oleh gangguan distribusi dari pemasok di luar negeri. Kebutuhan bawang putih masyarakat Jawa Barat, sebagian besar diimpor dari Cina. Berdasarkan penelitian Bappeda Kota Bandung, bawang putih merupakan komoditas yang sebagian besar diimpor dari daerah di luar Jawa Barat, baik dari Provinsi Riau maupun luar negeri. Namun demikian, sejak harga bawang putih di pasar internasional kurang atraktif di tahun 2008, petani di Cina mengurangi produksi dan beralih ke tanaman lainnya. Produksi bawang putih Cina yang menurun menyebabkan terbatasnya stok bawang putih di Jawa Barat.

b. Administered Price

Pada triwulan III-2009 kenaikan administered price (harga barang yang diatur oleh pemerintah) memberikan dampak yang minimal. Harga yang diatur oleh pemerintah mengalami kenaikan disebabkan oleh kenaikan tarif beberapa ruas tol di Jawa Barat dan gas elpiji tabung yang non-PSO (*Public Service Obligation*) seperti tabung 6 kg, 12 kg, dan 50 kg. Kenaikan harga tersebut berdampak terhadap inflasi subkelompok transpor dan bahan bakar rumah tangga meskipun relatif minimal.

Tabel 2.8. Perbandingan Tarif Tol Lama dan Baru

	BESARNYA TARIF TOL (Rp.)				
	I Sedan, Jip, Pick Up / Truk Kecil & Bus	II Truk dengan 2 Gandar	III Truk dengan Tiga Gandar	IV Truk dengan Empat Gandar	V Truk dengan Lima Gandar
TOL JKT (PD.GEDE TIMUR) – BDG (CILEUNYI)					
Tarif Lama	40.500	63.000	80.000	99.500	120.500
Tarif Baru	44.500	69.500	88.000	110.500	132.000
Kenaikan (Rp dan %)	4.000 (6,7%)	6.500 (10,3%)	8.000 (9%)	11.000 (11%)	11.500 (9,5%)
TOL PALIMANAN - KANCI					
Tarif Lama	3.500	4.000	6.000	8.000	9.500
Tarif Baru	4.000	5.000	7.500	9.000	11.000
Kenaikan (Rp dan %)	500 (14%)	1.000 (25%)	1.500 (25%)	1.000 (12,5%)	1.500 (15,8%)

Sumber: Intelkam Polda Jawa Barat

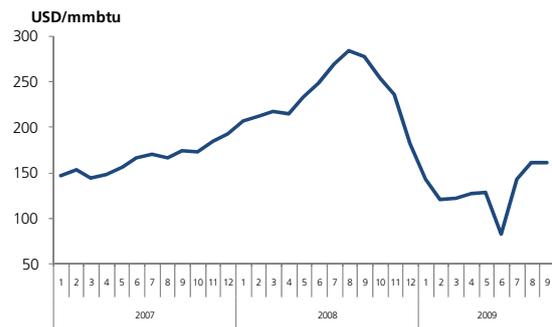
Kenaikan tarif jalan tol berdampak pada kenaikan harga angkutan pada bulan September 2009. PT. Jasa Marga telah menaikkan tarif jalan tol sebesar 15% (atas dasar inflasi Juli 2007-2009) pada tanggal 4 September 2009, yang meliputi 11 ruas jalan tol. Kenaikan harga tersebut sesuai dengan UU Tol No. 38/2004 yang menyebutkan bahwa kenaikan tarif dapat dilakukan berdasarkan angka inflasi setiap dua tahun sekali dengan pengajuan tiga bulan sebelum pelaksanaannya. Dari 11 ruas tol yang mengalami kenaikan tarif, sebanyak 2 ruas tol berada di Jawa Barat, yakni Tol Pondok Gede Timur – Cileunyi dan Tol Palimanan – Kanci. Kenaikan yang masing-masing naik dengan kisaran antara 6,7% hingga 25% dari tarif lama (Tabel 2.8). Pengusaha angkutan darat merespon kenaikan tarif tol dengan naikan tarif angkutan darat yang melewati jalan tol Purwakarta – Cileunyi menjadi sebesar 5%. Organisasi Angkutan Darat (Organda) menginformasikan bahwa penyesuaian ini dilakukan untuk menekan besarnya kerugian dan biaya operasional yang harus ditanggung oleh

pengusaha. Namun demikian, penyesuaian tarif ini baru diberlakukan ketika penumpang yang naik lebih sedikit dari setengah kapasitas angkutan darat.

Kenaikan harga gas elpiji non-PSO pada akhir bulan September 2009 menekan laju inflasi sub kelompok bahan bakar rumah tangga pada triwulan III-2009. PT. Pertamina mengusulkan kenaikan harga elpiji 12 kg secara bertahap sebesar Rp100/kg/bulan, hingga akhirnya mencapai Rp7.200/kg dari harga saat ini yang sebesar Rp5.250/kg. Kenaikan tersebut dilatarbelakangi oleh harga elpiji yang masih jauh dari harga keekonomiannya, yang di pasar internasional yang mencapai Rp7.000/kg - Rp7.700/kg. Pertamina Bandung memperkirakan bahwa kenaikan harga gas elpiji 12 kg tersebut akan berdampak minimal karena hanya mencakup 5,56% konsumsi masyarakat Jawa Barat yang sebesar 21,27 juta kg. Sementara, elpiji 3 kg yang mencakup 95% dari konsumsi masyarakat tidak mengalami perubahan harga. Dalam mengantisipasi gejolak harga yang mungkin akan timbul, maka PERTAMINA Bandung akan menjamin stok elpiji, pengamanan stok elpiji 3 kg karena akan terjadi pergeseran konsumen dari 12 kg menjadi 3 kg, dan menjalin kerja sama dengan Intelkam Polda untuk mengidentifikasi penimbunan gas elpiji 3 kg. Titik penyalur gas elpiji saat ini juga telah dirasa cukup yakni sebanyak 74 unit Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE).

Perkembangan harga gas di pasar internasional pada triwulan III-2009 cenderung meningkat setelah pada tahun 2008 harga gas mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Perbaikan permintaan negara-negara maju mendorong kenaikan harga gas elpiji pada tahun 2009. Harga gas yang berkisar di level USD 150/mmbtu memaksa PERTAMINA untuk memberikan subsidi kepada konsumen tagung gas 6 kg, 12 kg, dan 50 kg (Grafik 2.22).

Grafik 2.22. Pergerakan Harga Gas di Pasar Internasional



Sumber: Bloomberg (diolah)

BOKS 3

FORUM KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI: UPAYA PENGENDALIAN INFLASI PADA BULAN RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI

Bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri setiap tahun menyumbangkan inflasi yang cukup tinggi, yakni sebesar 1,5-2,0% dari rata-rata 6% inflasi tahunan Jawa Barat atau dengan proporsi sebesar 25-33% dari inflasi tahunan. Pola musiman inflasi Jabar sebulan sebelum hingga sebulan setelah Lebaran sangat tergantung kepada waktu terselenggaranya Lebaran, yakni

1. Lebaran terjadi pada awal bulan

Pada bulan sebelumnya, inflasi akan tinggi dan diperkirakan akan mencapai 1,2% hingga 1,6% (mtm). Pada bulan berikutnya inflasi akan relatif berkurang dalam kisaran 0,6% hingga 1% meskipun masih terdapat pengaruh kenaikan harga dari bulan sebelumnya.

2. Lebaran pada pertengahan bulan

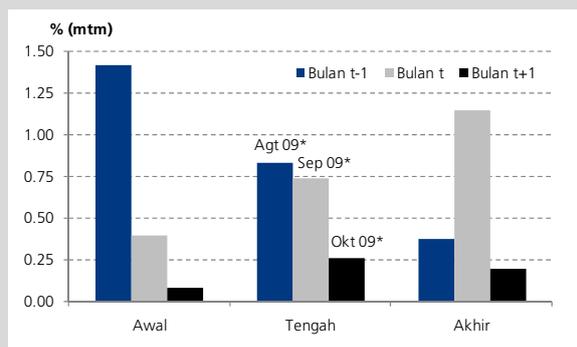
Jika lebaran terjadi pada pertengahan bulan, maka inflasi akan terjadi pada bulan sebelumnya dan bulan saat Lebaran, yakni masing-masing berkisar antara 0,5% hingga 1%.

3. Lebaran pada akhir bulan

Meskipun Lebaran terselenggara pada akhir bulan, inflasi pada bulan sebelumnya tercatat cukup tinggi berkisar antara 0,1% hingga 0,6%. Sementara itu, pada bulan saat terjadi Lebaran, inflasi akan terkonsentrasi dan berkisar antara 0,9% hingga 1,3%.

Pada tahun 2009, Lebaran diperkirakan yang akan jatuh pada pertengahan bulan September 2009 sehingga inflasi diperkirakan akan mengikuti pola musiman Tengah Bulan dan meningkatkan inflasi bulan Agustus dan September 2009 Jawa Barat. Dengan kondisi seperti itu, maka pengendalian inflasi melalui pemenuhan pasokan komoditas-komoditas strategis akan berlangsung lebih lama dibandingkan dengan pola musiman lainnya. Sementara itu, komoditas-komoditas yang sering kali memberikan sumbangan inflasi cukup besar pada bulan Ramadhan, antara lain daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, sayur-sayuran, cabe merah, minyak goreng, makanan jadi, sandang, emas, rokok, dan biaya tempat tinggal (Tabel 1).

Grafik 1. Inflasi Musiman Akibat Lebaran



Tabel 1. Komoditas Penyumbang Inflasi

No.	Komoditas	Faktor Penyebab
1	Daging sapi	Kenaikan permintaan tidak dapat diimbangi oleh Penawaran
2	Daging ayam ras	
3	Telur ayam ras	
4	Sayur-sayuran	
5	Cabe merah	
6	Minyak goreng	
7	Makanan jadi	Mengikuti bahan makanan
8	Sandang	Kenaikan permintaan dan Ekspektasi inflasi
9	Emas	
10	Rokok	
11	Tempat tinggal	Ekspektasi inflasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pedagang di Pasar Induk Caringin-Bandung, sejak sebelum bulan Ramadhan para pedagang telah menyisihkan modal serta berkoordinasi dengan para pemasok dalam rangka untuk memesan barang. Harga beberapa komoditas strategis akan mengalami kenaikan terutama pada H-1 bulan Ramadhan serta H-3 Lebaran.¹ Pada masa tersebut biasanya pedagang akan melakukan ‘tes pasar’ dengan mencoba menaikkan harga. Apabila daya beli konsumen masih cukup kuat, maka pedagang akan memutuskan untuk terus mempertahankan kenaikan harga.

¹ Lebaran diperkirakan akan dimulai pada tanggal 20 September 2009

Beberapa permasalahan yang menyebabkan tingginya tekanan inflasi menjelang Lebaran adalah (i) kenaikan permintaan, (ii) gangguan distribusi karena pengaturan lalu lintas kebutuhan pokok menjelang Lebaran, (iii) ekspektasi kenaikan harga pedagang, dan (iv) keterbatasan pasokan². Sementara itu, keterbatasan pasokan bukan merupakan faktor utama karena pada dasarnya stok pedagang telah penuh.

Upaya Pengendalian Inflasi di Jawa Barat

Dalam mengantisipasi inflasi akibat Bulan Ramadhan, Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi (FKPI) Jawa Barat pada rapat tanggal 14 Juli 2009 menyepakati untuk menyusun kegiatan-kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi.

1. Pemantauan atas perkembangan harga dan kondisi stok komoditas strategis di daerah-daerah di Jawa Barat.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Badan Ketahanan Pangan Daerah melalui rapat koordinasi lintas instansi dan daerah. Berdasarkan rapat koordinasi antar instansi tersebut disimpulkan bahwa stok komoditas strategis Jawa Barat menjelang bulan Ramadhan berada pada level aman dan diduga dapat memenuhi kenaikan permintaan masyarakat. Namun demikian, aspek kelancaran distribusi, aksi penimbunan komoditas strategis, dan kenaikan ekspektasi inflasi masyarakat masih berpotensi menaikkan harga.

2. Penyusunan prognosa kebutuhan dan stok komoditas strategis yang berpotensi mengalami kenaikan harga.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, serta Dinas Perikanan dan Kelautan dalam rapat FKPI telah menyampaikan data konsumsi dan stok komoditas strategis yang rawan mengalami kenaikan harga.

3. Kunjungan ke pasar tradisional serta konferensi pers untuk mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat.

Sebagai hasil tindak lanjut pertemuan koordinasi, FKPI Jawa Barat telah melakukan konferensi pers mengenai langkah-langkah antisipasi oleh masing-masing instansi terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat menjelang Idul Fitri pada bulan Agustus 2009

4. Penyelenggaraan pasar murah (pasar peduli) yang melibatkan pihak industri dan asosiasi dengan menjual komoditas strategis (beras, gula pasir, minyak goreng, dan kacang panjang) dengan harga yang lebih murah.

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat akan mengadakan safari bazaar Pasar Murah di beberapa daerah, yaitu tanggal 3-4 September 2009 di Bandung, 7-8 September di Sukabumi, 10-11 September di Cirebon, dan 14-15 September di Purwakarta. Dalam Pasar Murah tersebut, gula pasir, beras, mie kering, dan minyak goreng yang rawan mengalami kenaikan harga dijual dengan harga yang lebih murah. Komoditas-komoditas tersebut disubsidi dengan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bulog Divre III Jawa Barat, PT. Indofood, dan PT. RNI. Dalam rangkaian pasar murah tersebut, PT. RNI telah menyediakan 43,5 ton gula pasir yang dijual dengan harga Rp7.000/kg. Sementara itu, untuk Pasar Murah di kota Bandung PT. RNI telah menyediakan stok sebesar 7 ton gula pasir.

5. Pengaturan jadwal tanam dan panen serta optimalisasi penggunaan *cold storage*.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan serta Dinas Perikanan dan Kelautan melakukan pengaturan jadwal tanam agar dapat mengakomodasi kebutuhan konsumsi masyarakat saat bulan Ramadhan. Hal ini juga dilakukan karena untuk meningkatkan pendapatan petani pada saat harga komoditas mengalami kenaikan harga. Sementara, Dinas Peternakan telah membangun instalasi *cold storage* untuk menjaga stok daging hewan ternak tetap dapat dikonsumsi pada bulan Ramadhan.

6. Penjagaan atas keamanan dan lalu lintas selama Idul Fitri agar menjamin kelancaran distribusi barang.

Dinas Perhubungan mengawasi kelancaran distribusi barang terkait pemberlakuan pembatasan angkutan barang akan berlaku sejak H -4 sampai dengan H +1 Lebaran kecuali untuk kendaraan

² Pedagang di Pasar Induk Caringin memberikan keterangan bahwa menjelang Lebaran stok barang telah penuh sehingga pedagang tidak akan mengalami *opportunity loss*

yang mengangkut kebutuhan pokok masyarakat serta kepadatan lalu lintas yang terjadi pada Idul Fitri. Selain itu, Intelkam Polda melakukan pengawasan atas keamanan distribusi untuk meminimasi pungutan liar.

7. Penyusunan Peraturan Gubernur untuk Operasi Pasar pada Hari Besar Keagamaan Nasional

Peraturan Gubernur (Pergub) No. 102 tahun 2009 perihal Petunjuk Pelaksanaan Operasi Pasar (OP) dan Pasar Murah telah disahkan pada 25 September 2009. Berdasarkan Pergub dimaksud, maka dana alokasi OP hanya sebesar Rp2 miliar sementara untuk Pasar Murah sebesar Rp1 miliar untuk daerah miskin maupun daerah rawan pangan.

- OP hanya dapat dilakukan untuk harga beras, gula putih, dan minyak goreng, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komoditas	Jumlah dana	Subsidi
1	Beras	Rp1 miliar	Rp1.000/kg
2	Gula Pasir	Rp500 juta	Rp1.500/kg
3	Minyak Goreng	Rp500 juta	Rp2.000/liter
Jumlah		Rp2 miliar	

OP dapat dilakukan bila harga eceran komoditas naik sebesar 25% dari harga normal secara terus-menerus selama 15 hari di daerah miskin atau rawan pangan.

- Sementara untuk pelaksanaan Pasar Murah sebagai berikut:

No.	Komoditas	Jumlah dana	Subsidi
1	Beras	Rp500 juta	Rp2.000/kg
2	Gula Pasir	Rp100 juta	Rp1.500/kg
3	Minyak Goreng	Rp150 juta	Rp2.000/liter
4	Telur Ayam Ras	Rp250 juta	Rp1.500/kg
Jumlah		Rp1 miliar	

Pasar Murah dapat dilakukan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional di daerah miskin atau rawan pangan di 4 wilayah.

BOKS 4

FENOMENA HARGA KOMODITAS HASIL PETERNAKAN

Komoditas hasil peternakan, yakni daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras menyumbangkan inflasi yang cukup besar terhadap inflasi Jawa Barat. Pengaruh perubahan harga komoditas hasil peternakan tersebut tercermin dari bobot subkelompok daging-dagingan serta telur, susu, dan hasil-hasilnya yang secara rata-rata mencapai 5,65% dari total sejak berlakunya perhitungan inflasi Tahun Dasar 2007 (Tabel 1).

Tabel 1. Bobot 5 Subkelompok Bahan Makanan Terbesar

Jenis Subkelompok	Bobot terhadap Total*	Bobot terhadap Kelompok Bahan Makanan**
Padi-padian, Umbi-umbian & Hasilnya	4.79%	20.60%
Daging dan Hasil-hasilnya	3.16%	13.57%
Telur, Susu & Hasil-hasilnya	2.49%	10.70%
Ikan Segar	1.81%	7.74%
Lemak & Minyak	1.73%	7.44%
Kelompok Bahan Makanan	23.27%	100%

Sumber: BPS, diolah

Bobot kedua subkelompok yang relatif besar tersebut mencerminkan tingginya konsumsi masyarakat atas hasil produksi peternakan. Namun demikian, konsumsi masyarakat yang cukup tinggi belum dapat diimbangi dengan produksi peternak di Jawa Barat. Selama ini Provinsi Jawa Barat mendatangkan daging sapi dari luar negeri, daging ayam ras dari Jawa Timur, dan telur ayam ras dari Blitar. Eksportir daging sapi ke Jawa Barat, antara lain adalah Amerika Serikat, Brazil, Australia, dan New Zealand (Tabel 2).

Tabel 2. Produksi dan Konsumsi Produk Peternakan Tahun 2009

No.	Komoditas	Produksi*		Konsumsi	
		Ekor	Ton	Ekor	Ton
1	Daging Sapi	11.1140	13.132	77.240	12.475
	- Sapi lokal	58.040	5.577	35.833	5.299
	- Sapi impor	26.998	3.030	41.407	7.177
2	Daging Ayam	85.636.731	68.095	42.896.256	34.109
	- Ayam buras	6.784.638	4.776	3.398.497	2.393
	- Ayam ras petelur	1.276.527	1.025	639.453	513
	- Ayam ras pedaging	77.575.567	62.293	38.858.306	31.203
3	Telur Ayam	377.459.208	20.767	466.308.992	945.735.680
	- Ayam buras	79.111.017	3.164	49.640.395	100.677.220
	- Ayam ras petelur	298.348.191	17.603	416.668.597	845.058.460

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Keterangan: * Berdasarkan hasil proyeksi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat menerapkan beberapa program unggulan. Program-program tahun 2009 tersebut, antara lain pengembangan dan penguatan bibit ternak, perencanaan pembangunan peternakan, pengendalian dan pengujian mutu

pakan, peningkatan produktivitas petani, pencegahan dan penanggulangan penyakit, serta pemasaran dan pengolahan hasil panen. Selain itu, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Perhutani untuk menggunakan hutan negara menjadi areal pakan peternak sapi.

Di sisi lain, Pemerintah pusat pada tanggal 11 Agustus 2009 telah melakukan pembukaan impor daging sapi tanpa tulang dari Brazil untuk mengantisipasi kekurangan stok menjelang bulan Ramadhan (sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3.026 Tahun 2009). Namun demikian, pembukaan impor tersebut belum dimanfaatkan oleh pedagang. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat menginformasikan bahwa impor belum dilakukan karena belum diterbitkannya Surat Perintah Pelaksanaan (SPP) dari Dirjen Peternakan atas permintaan impor. Pengeluaran SPP berdasarkan atas syarat pemenuhan standar cooler, hasil audit kehalalan dari MUI, dan pemeriksaan dari BPPOM. Meskipun impor daging sapi dari Brazil belum berjalan, peraturan tersebut berpotensi untuk menurunkan harga daging sapi di masa yang akan datang.

Tabel 3. Perkembangan Harga Setelah dan Saat Bulan Ramadhan

	Harga sebelum bulan Ramadhan	Harga saat bulan Ramadhan
Daging sapi	Rp66.750/kg	Rp67.996
Daging ayam ras	Rp23.960/kg	Rp24.881/kg
Telur ayam ras	Rp14.341/kg	Rp13.261/kg

Sumber: Survei Pemantauan Harga Mingguan (SPHM), KBI Bandung

Kenaikan harga komoditas hasil peternakan tersebut terutama terjadi pada hari raya besar keagamaan nasional. Pada beberapa minggu menjelang mulainya bulan Ramadhan dan Idul Fitri, permintaan atas daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras meningkat sebagaimana tercermin dari kenaikan harga komoditas-komoditas tersebut yang cukup tinggi (Tabel 3).

Kenaikan tersebut disebabkan oleh aksi ambil untung peternak dan pedagang sehubungan dengan peningkatan permintaan menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Sedangkan, pasokan telur ayam ras yang terjaga dapat menahan kenaikan harga lebih lanjut pada bulan Ramadhan. Kenaikan harga telur ayam ras terjadi sejak bulan Juli 2009 karena lonjakan permintaan dari industri kue, untuk stok menjelang Lebaran. Pada rapat Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi Jawa Barat bulan Agustus dan September 2009, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menginformasikan bahwa pada bulan Ramadhan kenaikan harga telur ayam ras diperkirakan masih dalam batas wajar, karena produsen akan menambah pasokan telur ayam, antara lain dari telur yang biasanya ditetaskan menjadi *Day Old Chick* (DOC)/bibit ayam pedaging.

BAB 3

PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH



Secara umum perkembangan perbankan di Jawa Barat pada triwulan III-2009 masih mengalami perlambatan. Hal ini terlihat dari berbagai indikator seperti aset dan *outstanding* kredit, yang secara tahunan (yoy) tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sebaliknya, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara triwulanan (qtq) baik total aset, *outstanding* kredit maupun DPK mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit yang lebih cepat daripada pertumbuhan DPK menyebabkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan di Jawa Barat mengalami sedikit peningkatan dibandingkan posisi triwulan sebelumnya. Di sisi lain, risiko kredit relatif terkendali. Hal ini terlihat dari persentase jumlah kredit bermasalah yang mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, seiring dengan mulai lancarnya penyaluran kredit, ekses likuiditas berupa penempatan dana bank pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh perbankan Jawa Barat mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya.

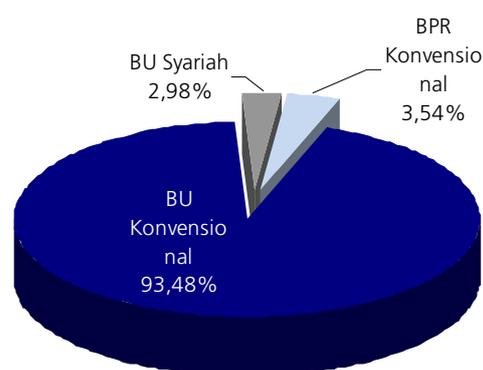
Seperti halnya perbankan di Jawa Barat, perkembangan bank umum khusus yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI Bandung juga mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh indikator utama seperti aset, DPK maupun *outstanding* kredit yang secara tahunan tumbuh lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya, namun dengan risiko kredit tersebut relatif rendah. Gempa bumi di Jawa Barat pada 2 September 2009 tidak berdampak signifikan terhadap operasional perbankan di Jawa Barat.

1. STRUKTUR PERBANKAN DI JAWA BARAT

Aset perbankan di Jawa Barat masih didominasi oleh bank umum konvensional dengan pangsa 93,48%. Sementara itu, pangsa bank umum syariah dan BPR konvensional masing-masing sebesar 2,98% dan 3,54% (Grafik 3.1.).

Sebagian besar (80%) aset perbankan di Jawa Barat masih dikuasai oleh sepuluh bank umum. Pada triwulan III-2009, aset perbankan di Jawa Barat tumbuh 2,89% (qtq) atau 20,97% (yoy) menjadi Rp182,54 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,02% (qtq) atau 22,21% (yoy). Jika dibandingkan dengan nasional, aset perbankan di Jawa Barat memiliki pangsa sebesar 7,9%.

Grafik 3.1. Komposisi Aset Perbankan di Jawa Barat Triwulan III-2009



Sumber: LBU, LBUS, LBPR KBI Bandung

2. BANK UMUM KONVENSIONAL

2.1 Pendanaan dan Risiko Likuiditas

Perkembangan Dana Pihak Ketiga

Selama tiga triwulan terakhir, pertumbuhan DPK secara tahunan relatif stabil. Pada triwulan III-2009, DPK mencapai Rp128,57 triliun, telah tumbuh 20,12% (yoy), tidak berbeda jauh dibandingkan pertumbuhan pada dua triwulan sebelumnya. Sementara itu, secara triwulanan (qtq), pertumbuhan DPK mengalami perlambatan, yakni dari 3,21% (qtq) pada triwulan II-2009 menjadi 1,26% di triwulan III-2009. Selama tahun 2009, DPK telah tumbuh 9,19% (ytd) atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2008 yang hanya mencapai 1,39%. Suku bunga simpanan yang masih cukup menarik, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat memutuskan untuk menyimpan uangnya di bank, dibandingkan dengan penempatan lainnya seperti saham ataupun surat berharga.

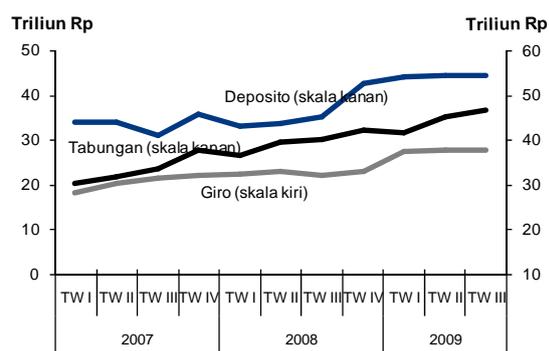
Jenis simpanan deposito masih mendominasi DPK bank umum konvensional di Jawa Barat.

Pada triwulan III-2009, pangsa deposito mencapai 42,18%, disusul tabungan 36,29% dan giro 21,52%. Pertumbuhan DPK pada triwulan laporan terutama disumbangkan oleh pertumbuhan deposito yang mencapai 19,95% (yoy) menjadi Rp54,24 triliun, diikuti tabungan yang tumbuh sebesar 16,84% menjadi Rp46,66 triliun dan giro yang tumbuh 26,49% menjadi Rp27,68 triliun. Secara triwulanan, simpanan

tabungan mengalami pertumbuhan tertinggi yakni 3,55% (qtq), disusul giro yang tumbuh 0,25%, sebaliknya simpanan deposito mengalami kontraksi 0,13% (qtq). Salah satu faktor penyebab meningkatnya tabungan diperkirakan adalah semakin gencarnya beberapa bank besar menawarkan tabungan berhadiah.

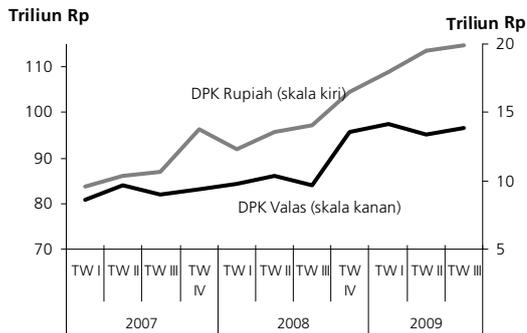
Berdasarkan jenis valuta, pada triwulan III-2009, DPK dalam valuta asing mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan DPK dalam rupiah. DPK dalam valas tumbuh 3,91% (qtq) atau 42,94% (yoy) menjadi Rp13,89 triliun. Rata-rata kurs tengah rupiah terhadap USD pada triwulan III-2009 terapresiasi 5,02% (qtq) menjadi sebesar Rp10.002,00 per USD. Sementara itu, DPK dalam rupiah mengalami pertumbuhan sebesar 0,95% (qtq) atau 17,85% (yoy) menjadi Rp114,69 triliun.

Grifik 3.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Umum Konvensional di Jawa Barat berdasarkan Jenis Simpanan



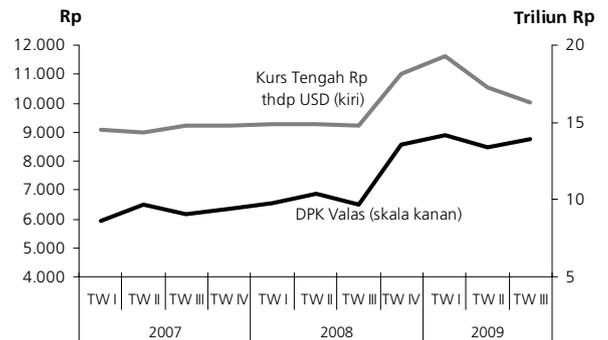
Sumber: LBU KBI Bandung

Grafik 3.3. Perkembangan DPK Bank Umum Konvensional di Jawa Barat berdasarkan Jenis Valuta



Sumber: LBU KBI Bandung

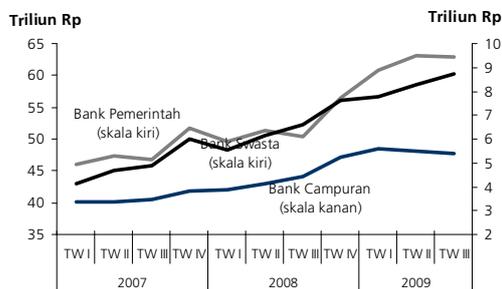
Grafik 3.4. Perkembangan DPK Valuta Asing & Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD



Sumber: LBU KBI Bandung

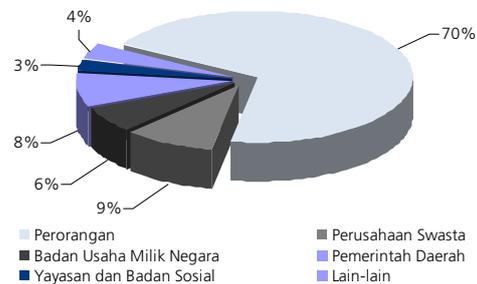
Berdasarkan kelompok bank, pada triwulan III-2009, secara tahunan DPK kelompok bank pemerintah tumbuh lebih baik, sedangkan kelompok bank swasta dan kelompok bank asing/campuran tumbuh melambat (Grafik 3.5.). Perlambatan pertumbuhan DPK pada bank asing/campuran disebabkan penurunan pada triwulan III-2009 (qtq). DPK yang dihimpun kelompok bank pemerintah tumbuh 24,78% (yoy) menjadi Rp62,87 triliun, sedangkan DPK kelompok bank swasta tumbuh 15,54% (yoy) menjadi Rp60,31 triliun dan kelompok bank asing/campuran tumbuh 21,24% (yoy) menjadi Rp5,39 triliun. Sementara itu, secara triwulanan, kelompok bank swasta tumbuh 3,18% (qtq), sebaliknya kelompok bank pemerintah dan kelompok bank asing/campuran masing-masing turun sebesar 0,25% dan 1,82%. Kondisi tersebut menyebabkan komposisi DPK mengalami sedikit perubahan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pangsa DPK kelompok bank pemerintah turun dari 49,64% menjadi 48,90%, pangsa bank swasta naik dari 46,03% menjadi 46,91% dan pangsa bank asing/campuran berkurang dari 4,33% menjadi 4,19%.

Grafik 3.5. Perkembangan DPK Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Bank



Sumber: LBU KBI Bandung

Grafik 3.6. DPK Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Triwulan III-2009 Berdasarkan Golongan Kepemilikan



Sumber: LBU KBI Bandung

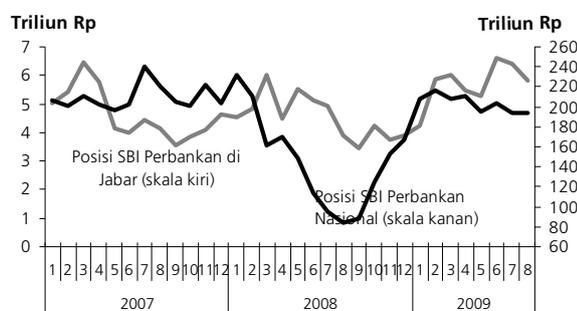
Berdasarkan golongan pemilik, pada triwulan III-2009, DPK milik perseorangan masih mendominasi pangsa DPK bank umum konvensional di Jawa Barat yakni sebesar 69,5% (Grafik 3.6.). Sementara itu, jika dilihat pertumbuhannya, pertumbuhan triwulanan tertinggi terjadi

pada DPK milik yayasan dan badan sosial sebesar 15% (qtq). Pertumbuhan tahunan tertinggi terjadi pada DPK milik badan usaha milik negara sebesar 37,47% (yoy).

Ekses Likuiditas

Posisi bulan Agustus 2009, jumlah kelebihan likuiditas berupa penempatan bank pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah penempatan SBI oleh perbankan Jawa Barat pada posisi bulan Agustus 2009 mencapai Rp5,81 triliun atau turun 11,88% dibandingkan posisi Juni 2009. Sementara itu, posisi SBI perbankan nasional sampai bulan Agustus 2009 mencapai Rp193 triliun, sehingga porsi penempatan SBI perbankan Jawa Barat terhadap perbankan nasional hanya sebesar 2,84% atau lebih rendah dibandingkan pangsa pada bulan Juni 2009 yang mencapai 3,12%. Penurunan ini seiring dengan semakin gencarnya penyaluran kredit perbankan, khususnya oleh bank umum yang berkantor pusat di wilayah KBI Bandung.

Grafik 3.7. Perkembangan SBI Bank Umum Konvensional di Jawa Barat dan SBI Perbankan Nasional



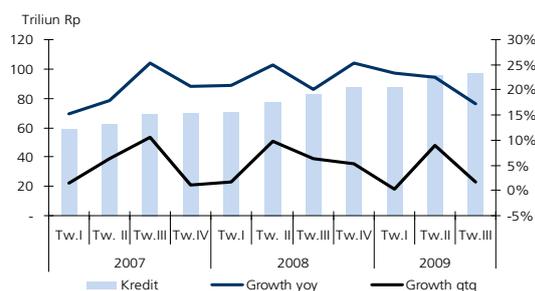
Sumber: LBU KBI Bandung

2.2 Perkembangan Kredit dan Risikonya

Perkembangan Kredit

Mulai membaiknya kondisi perekonomian, belum menunjukkan dampak terhadap penyaluran kredit oleh bank umum konvensional (Grafik 3.8.). Hal ini terlihat dari masih melambatnya pertumbuhan kredit pada triwulan III-2009. *Outstanding* kredit yang disalurkan posisi September 2009 adalah sebesar Rp97,15 triliun. Secara tahunan, kredit tumbuh 17,25% (yoy) melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 22,51%. Sementara itu, secara triwulanan, kredit tumbuh 1,78% (qtq) atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 8,99%(qtq). Selama tahun 2009 (Januari s.d. September), *outstanding* kredit telah tumbuh 11,23% (ytd) lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2008 yang mencapai 18,82%.

Grafik 3.8. Perkembangan Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat

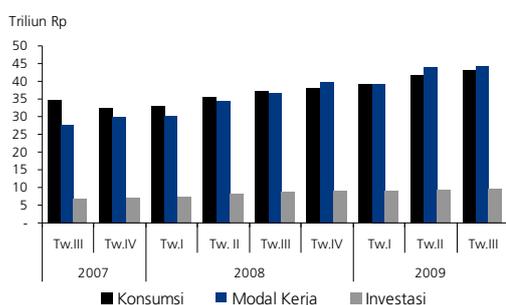


Sumber: LBU KBI Bandung

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit yang disalurkan bank umum konvensional di Jawa Barat masih didominasi oleh kredit produktif (modal kerja dan investasi) dengan pangsa 55,46% atau Rp53,88 triliun, sedangkan sisanya 44,54% atau Rp43,28 triliun adalah kredit

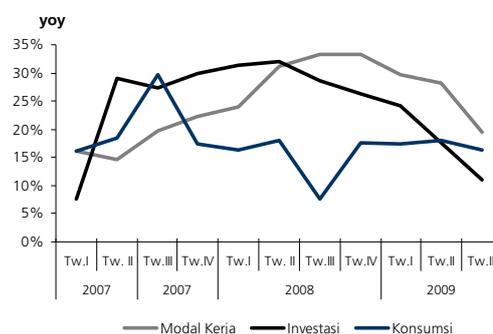
konsumsi. Sejalan dengan pertumbuhan kredit keseluruhan, secara tahunan maupun triwulanan, kredit untuk semua jenis penggunaan mengalami perlambatan. Pertumbuhan *outstanding* kredit untuk modal kerja melambat dari 28,25% (yoy) pada triwulan II-2009 menjadi 19,62% (yoy) pada triwulan III-2009. Pertumbuhan *outstanding* kredit investasi melambat dari 17,59% menjadi 11,09%, sementara pertumbuhan *outstanding* kredit konsumsi melambat dari 18,08% menjadi 16,33%. Secara triwulanan, *outstanding* kredit modal kerja, investasi, maupun konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 0,51%, 1,64% dan 3,14%.

Grafik 3.9. Perkembangan Kredit yang Disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: LBU KBI Bandung

Grafik 3.10. Perkembangan Pertumbuhan Kredit yang Disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan



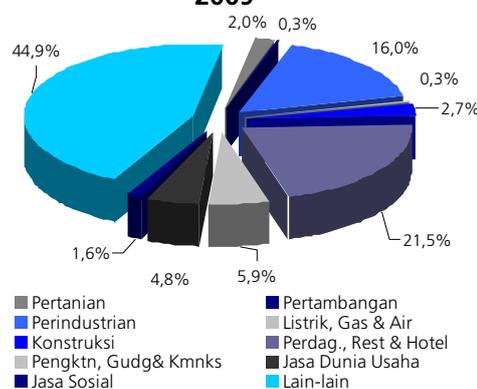
Sumber: LBU KBI Bandung

Sejalan dengan pangsa PDRB Jawa Barat, kredit yang disalurkan masih tetap didominasi oleh tiga sektor utama yakni sektor lain-lain (konsumsi), sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) dan sektor industri pengolahan masing-masing dengan pangsa 44,9%, 21,5% dan 16,0%.

Secara tahunan, kredit yang disalurkan sebagian besar sektor ekonomi mengalami perlambatan kecuali pada sektor pertanian, sektor pertambangan serta sektor jasa sosial. Kredit ke sektor pengangkutan dan komunikasi masih mengalami pertumbuhan sangat signifikan,

yakni sebesar 217% (yoy) menjadi Rp5,71 triliun. Kredit ke sektor PHR yang menempati posisi kedua terbesar justru mengalami perlambatan dari 23,19% menjadi 16,24%. Demikian pula kredit ke sektor industri pengolahan yang melambat dari 7,08% menjadi -1,33%. Secara triwulanan, kredit yang disalurkan mengalami perlambatan di seluruh sektor. Sektor pertambangan mengalami pertumbuhan terbesar yakni 27,85% (qtq), sementara sektor PHR dan industri pengolahan masing-masing mengalami kontraksi 4,47% dan 0,17%.

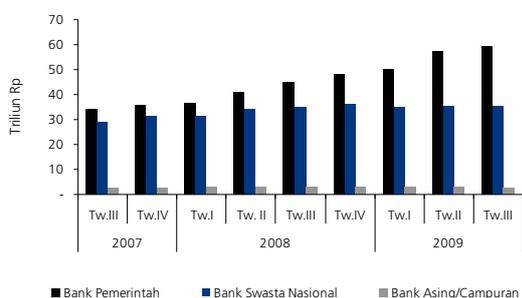
Grafik 3.11. Pangsa Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Sektor Ekonomi Triwulan III-2009



Sumber: LBU KBI Bandung

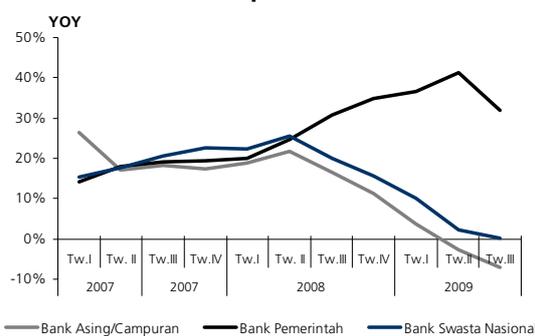
Pertumbuhan penyaluran kredit seluruh kelompok bank di Jawa Barat mengalami perlambatan. Pertumbuhan kredit kelompok Bank Pemerintah pada triwulan laporan lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, sehingga mengakhiri tren peningkatan selama dua tahun terakhir. Sementara itu, pada kelompok bank swasta dan bank asing/campuran masih terus mengalami tren perlambatan sejak lima triwulan terakhir (Grafik 3.13.). Secara tahunan, pada triwulan III-2009 kredit yang disalurkan kelompok bank pemerintah tumbuh 32,04% (yoy) menjadi Rp59,33 triliun. Sementara *outstanding* kredit kelompok bank swasta hanya tumbuh 0,31% menjadi Rp35,06 triliun. Sementara itu, kelompok bank asing/campuran turun 7,14% menjadi Rp2,77 triliun.

Grafik 3.12. Perkembangan Kredit yang Disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Bank



Sumber: LBU KBI Bandung

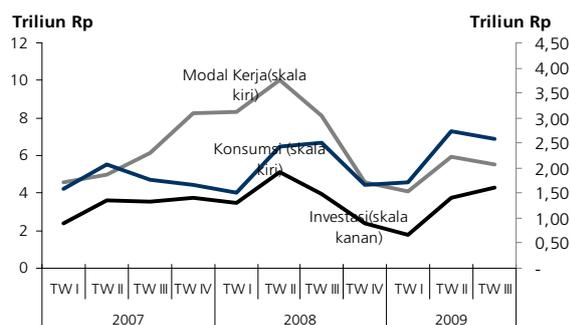
Grafik 3.13. Perkembangan Pertumbuhan Kredit yang Disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Bank



Sumber: LBU KBI Bandung

Pada triwulan III-2009, persetujuan plafon kredit baru lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah persetujuan plafon kredit baru selama triwulan III-2009 mencapai Rp14,02 triliun atau mengalami penurunan sebesar 4,24% (qtq) berbeda dengan triwulan sebelumnya yang mengalami peningkatan lebih dari 57% (qtq). Sementara secara tahunan, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 13,90% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, persetujuan plafon untuk kredit investasi mulai menunjukkan peningkatan. Pada triwulan III-2009, persetujuan plafon kredit investasi mencapai 15,47% (qtq) atau 9,22% (yoy) atau menjadi sebesar Rp1,62 triliun. Kredit untuk konsumsi dan modal kerja, secara triwulanan mengalami penurunan masing-masing sebesar 5,79% (qtq) dan 6,99%, menjadi Rp6,87 triliun dan Rp5,53 triliun. Secara tahunan, persetujuan plafon untuk kredit modal kerja mengalami penurunan sebesar 32,06% (yoy), sedangkan kredit konsumsi tetap tumbuh 3,15%.

Grafik 3.14. Perkembangan Persetujuan Plafon Kredit Baru Bank Umum Konvensional di Jawa Barat



Sumber: LBU KBI Bandung

Sebagian besar kredit yang disalurkan bank umum konvensional di Jawa Barat masih terfokus di Kota Bandung (46,35% dari total *outstanding* kredit). Pangsa tersebut sedikit

mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya (47,29%). Tingginya pangsa kredit di Kota Bandung cukup beralasan mengingat sebagian besar unit usaha di Jawa Barat berada di Kota Bandung dan sekitarnya. Sementara itu, pangsa kabupaten dan kota lainnya di bawah 7%. Terbesar kedua adalah Kota Bekasi (6,95%), disusul Kota Bogor (6,69%) dan sisanya tersebar di 22 kabupaten dan kota lainnya.

Tabel 3.1. Jumlah Kredit Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Triwulan III-2009

Kabupaten/Kota	Outstanding Kredit (Juta Rupiah)	Pangsa
Kota Bandung	45.032.422	46,35%
Kota Bekasi	6.756.301	6,95%
Kota Bogor	6.504.409	6,69%
Kota Cirebon	5.951.715	6,13%
Kota Tasikmalaya	4.129.271	4,25%
Kab. Karawang	2.909.125	2,99%
Kota Sukabumi	2.558.230	2,63%
Kab. Subang	2.262.567	2,33%
Kab. Bandung	2.181.979	2,25%
Kab. Garut	1.915.079	1,97%
Kab. Bogor	1.753.956	1,81%
Kab. Purwakarta	1.749.594	1,80%
Kota Depok	1.653.735	1,70%
Kab. Bekasi	1.528.636	1,57%
Kab. Cianjur	1.453.931	1,50%
Kab. Indramayu	1.307.739	1,35%
Kab. Sumedang	1.206.217	1,24%
Kab. Majalengka	1.141.243	1,17%
Kota Cimahi	1.085.061	1,12%
Kab. Kuningan	1.012.022	1,04%
Kab. Ciamis	911.159	0,94%
Kota Banjar	814.097	0,84%
Kab. Sukabumi	804.694	0,83%
Kab. Tasikmalaya	314.789	0,32%
Kab. Cirebon	215.968	0,22%
JUMLAH	97.153.939	100,00%

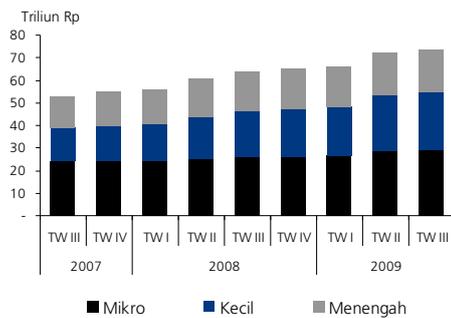
Sumber: LBU KBI Bandung

Kredit Mikro, Kecil dan Menengah (MKM)

Selama tahun 2009 (Januari s.d. September), kredit MKM (Mikro, Kecil dan Menengah) yang disalurkan bank umum konvensional di Jawa Barat tumbuh 12,55% (ytd) atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2008 (16,60%). Seiring dengan perkembangan kredit secara keseluruhan, kredit MKM (mikro, kecil dan menengah) yang disalurkan bank umum konvensional di Jawa Barat pada triwulan III-2009 tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. *Outstanding* kredit MKM tumbuh 15,07% (yoy) atau 2,09% (qtq) mencapai Rp73,47 triliun atau 75,62% dari total kredit, sementara pada triwulan II-2009, kredit MKM tumbuh 8,74% (qtq) atau 18,42% (yoy). Jika dilihat berdasarkan skala nominalnya, kredit mikro (di bawah Rp50 juta) memiliki pangsa terbesar yakni 39,6%, kredit kecil (di atas Rp50 juta namun di bawah Rp500 juta)

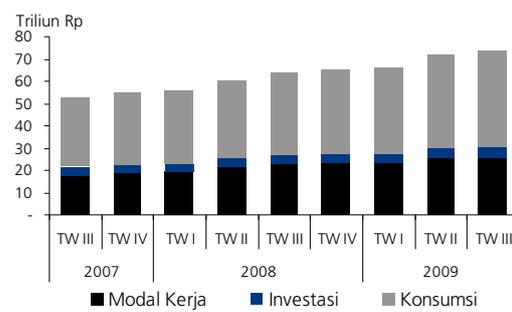
pangsanya mencapai 34,9%, dan sisanya 25,5% merupakan kredit menengah (di atas Rp500 juta namun di bawah Rp5 miliar). Sementara itu, berdasarkan jenis penggunaannya, kredit MKM masih didominasi oleh kredit konsumsi dengan pangsa sebesar 58% sedangkan sisanya sebesar 42% merupakan kredit produktif (modal kerja dan investasi).

Grafik 3.15. Perkembangan Kredit MKM Berdasarkan Skala Usaha



Sumber: LBU KBI Bandung

Grafik 3.16. Perkembangan Kredit MKM Berdasarkan Jenis Penggunaan

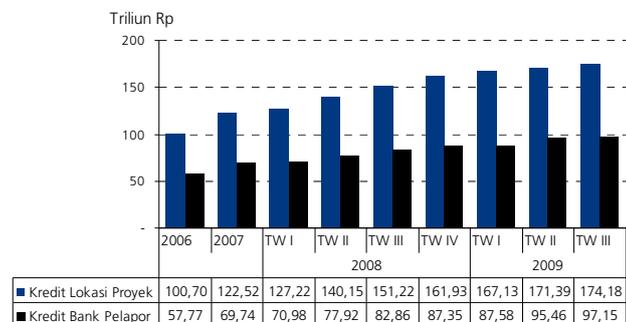


Sumber: LBU KBI Bandung

Kredit dengan Lokasi Proyek di Jawa Barat

Pertumbuhan kredit yang disalurkan ke Jawa Barat lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kredit yang disalurkan bank konvensional di Jawa Barat. Sampai dengan posisi triwulan III-2009 (bulan Agustus 2009), *outstanding* kredit yang berlokasi di Jawa Barat tercatat sebesar Rp174,18 triliun atau tumbuh 14,41% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit bank pelapor yang tercatat 17,25%. Lebih besarnya kredit yang disalurkan ke Jawa Barat menunjukkan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu tujuan utama perbankan nasional dalam penyaluran kredit.

Grafik 3.17. Perkembangan Kredit Lokasi Proyek dan Kredit Bank Pelapor



Keterangan:

Kredit Lokasi Proyek adalah kredit yang diberikan di wilayah Jawa Barat

Kredit bank pelapor adalah kredit yang diberikan oleh bank umum konvensional di Jawa Barat

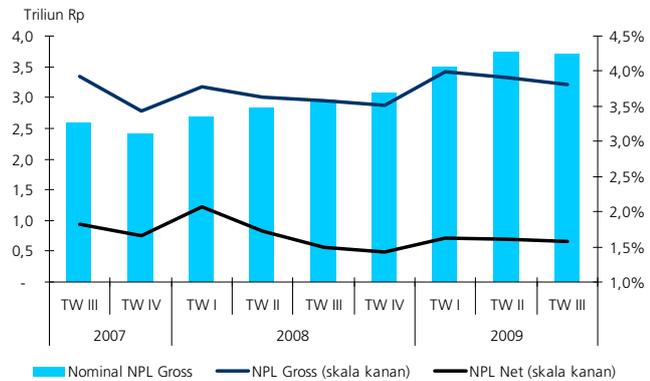
Sumber: LBU KBI Bandung

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit berlokasi proyek di Jawa Barat masih didominasi oleh kredit produktif (modal kerja dan investasi) yang mencapai 61% dari total kredit, sedangkan sisanya sebesar 39% merupakan kredit untuk konsumsi. Sementara itu, berdasarkan sektor ekonominya, kredit masih didominasi oleh kredit konsumsi (39%), kredit sektor industri pengolahan sebesar 29%, serta kredit sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 16%.

Risiko kredit

Risiko kredit yang disalurkan bank umum konvensional di Jawa Barat pada triwulan III-2009 menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Persentase jumlah kredit bermasalah kotor atau *Non Performing Loan* (NPL) Gross menurun dari 3,91% di triwulan II-2009 menjadi 3,81% pada triwulan III-2009. Begitu juga dengan nominalnya, turun dari Rp3,73 triliun menjadi Rp3,70 triliun. Sementara itu, persentase NPL net mengalami penurunan dari 1,60% menjadi 1,57%. Selain itu, seiring dengan membaiknya prospek perekonomian dunia di tahun 2010, diperkirakan risiko kredit perbankan akan semakin terkendali.

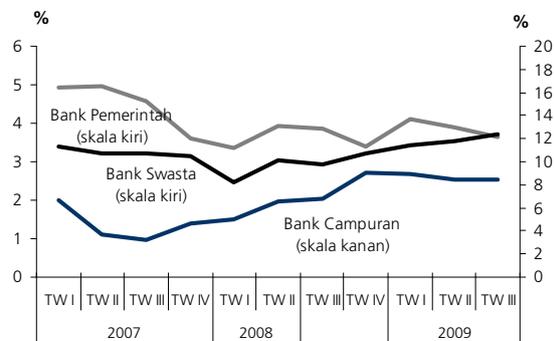
Grafik 3.18. Perkembangan Jumlah Kredit Bermasalah Bank Umum Konvensional di Jawa Barat



Sumber: LBU KBI Bandung

Pada triwulan III-2009, berdasarkan kelompok bank, persentase NPL gross untuk kelompok bank pemerintah dan bank asing/campuran menurun, sebaliknya kelompok bank swasta meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Persentase NPL gross kelompok bank pemerintah mengalami penurunan dari 3,90% pada triwulan II-2009 menjadi 3,64% pada triwulan III-2009. Hal yang sama terjadi pada NPL di kelompok bank asing/campuran, yaitu turun dari 8,50% menjadi 8,44%. Sementara itu, persentase NPL gross pada kelompok bank swasta terus mengalami peningkatan dari 3,54% menjadi 3,73%.

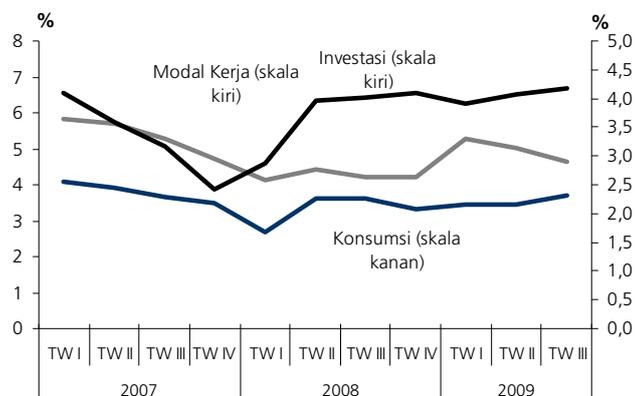
Grafik 3.19. Perkembangan Non Performing Loan Gross Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Bank



Sumber: LBU KBI Bandung

Berdasarkan jenis penggunaannya, pada triwulan III-2009, peningkatan persentase kredit bermasalah terjadi pada kredit investasi dan kredit konsumsi. Persentase NPL gross kredit investasi mengalami peningkatan dari 6,52% pada triwulan II-2009 menjadi 6,69%. Adapun NPL gross kredit konsumsi yang meningkat dari 2,15% menjadi 2,32%. Sementara itu, kredit modal kerja mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dari 5,02% menjadi 4,64%.

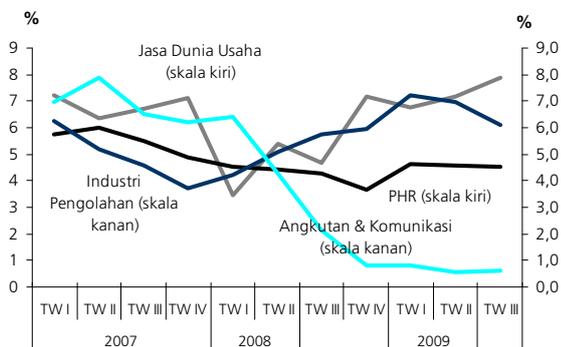
Grafik 3.20. Perkembangan NPL Gross Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: LBU KBI Bandung

Pada triwulan III-2009, risiko kredit pada seluruh sektor ekonomi mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya kecuali sektor jasa-jasa, sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor lain-lain. Persentase NPL gross kredit yang disalurkan kepada sektor industri pengolahan turun dari 6,94% pada triwulan II-2009 menjadi 6,11% pada triwulan III-2009. Demikian juga dengan NPL gross kredit kepada sektor PHR turun dari 4,59% menjadi 4,53%. Sementara itu, NPL gross kredit kepada sektor angkutan dan komunikasi mengalami penurunan dari 0,81% menjadi 0,56%.

Grafik 3.21. Perkembangan NPL Gross Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Beberapa Sektor Ekonomi Utama



Sumber: LBU KBI Bandung

Berdasarkan lokasi kota/kabupaten, persentase kredit bermasalah terbesar terdapat di Kabupaten Subang mencapai 4,90% terhadap kredit yang disalurkan di kabupaten tersebut. Empat daerah lainnya yang memiliki persentase kredit bermasalah di atas 4% adalah Kabupaten Karawang yang mencapai 4,87%, Kota Bandung sebesar 4,50%, Kota Bekasi mencapai 4,38% dan Kabupaten Purwakarta mencapai 4,20%. Sementara itu, daerah yang memiliki persentase NPL terendah adalah Kabupaten Cirebon (0,42%).

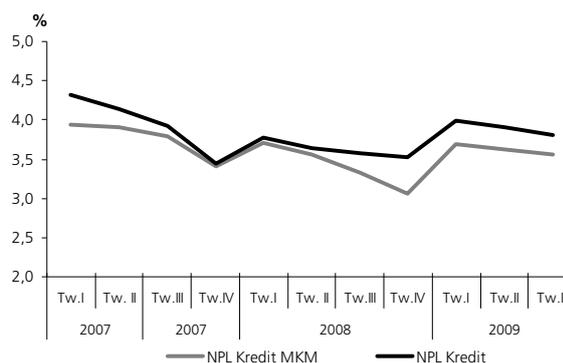
Tabel 3.2. NPL Gross Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Kredit (Juta Rp)	NPL	
		Nominal (Juta Rp)	%
Kab. Subang	2.262.567	110.753	4,90
Kab. Karawang	2.909.125	141.779	4,87
Kota Bandung	45.032.422	2.026.854	4,50
Kota Bekasi	6.756.301	296.084	4,38
Kab. Purwakarta	1.749.594	73.425	4,20
Kab. Sukabumi	804.694	31.182	3,88
Kota Depok	1.653.735	64.040	3,87
Kota Cirebon	5.951.715	211.319	3,55
Kota Bogor	6.504.409	222.557	3,42
Kab. Tasikmalaya	314.789	10.461	3,32
Kota Tasikmalaya	4.129.271	135.665	3,29
Kab. Bekasi	1.528.636	47.110	3,08
Kab. Majalengka	1.141.243	31.031	2,72
Kota Sukabumi	2.558.230	62.390	2,44
Kab. Indramayu	1.307.739	30.250	2,31
Kab. Cianjur	1.453.931	31.989	2,20
Kab. Bogor	1.753.956	37.413	2,13
Kab. Sumedang	1.206.217	23.176	1,92
Kota Banjar	814.097	14.111	1,73
Kab. Bandung	2.181.979	36.538	1,67
Kab. Garut	1.915.079	30.897	1,61
Kab. Kuningan	1.012.022	10.566	1,04
Kota Cimahi	1.085.061	11.249	1,04
Kab. Ciamis	911.159	9.307	1,02
Kab. Cirebon	215.968	901	0,42
JUMLAH	97.153.939	3.701.047	3,81

Sumber: LBU KBI Bandung

Risiko kredit mikro kecil dan menengah (MKM) pada triwulan III-2009 lebih rendah dibandingkan risiko kredit keseluruhan. Persentase NPL gross kredit MKM mengalami penurunan dari 3,62% pada triwulan II-2009 menjadi 3,56%, sama halnya dengan persentase NPL Gross kredit total mengalami penurunan dari 3,91% menjadi 3,81%. Rendahnya NPL MKM menunjukkan bahwa sektor MKM memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan sektor lainnya.

Grafik 3.22. Perkembangan NPL Gross Kredit MKM dan Total Kredit



Sumber: LBU KBI Bandung

2.3 Risiko Pasar

Selama tahun 2009 suku bunga perbankan di Jawa Barat cenderung terjadi penurunan. Hal ini terlihat dari penurunan suku bunga deposito jangka waktu 1 bulan yang mendekati penurunan BI

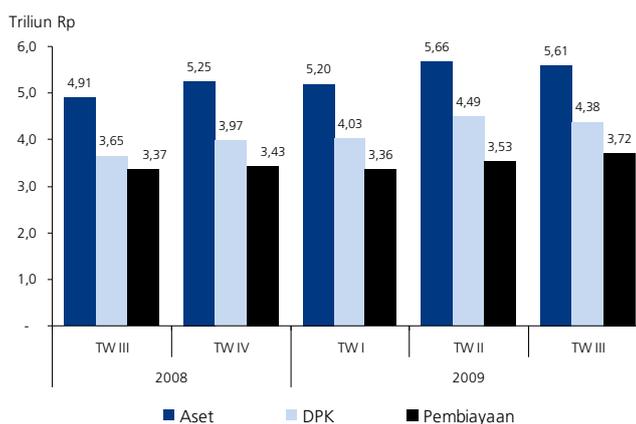
rate. Selama tahun 2009, BI rate sudah turun sebesar 275 basis poin dari 9,25% di Desember 2008 menjadi 6,50% di bulan September 2009, sedangkan rata-rata suku bunga deposito 1 bulan telah turun 236 basis poin dari 8,10% pada bulan Desember 2008 menjadi 5,74% pada bulan September 2009. Sementara itu, penurunan suku bunga kredit masih belum sepesat penurunan suku bunga simpanan. Rata-rata suku bunga kredit modal kerja mengalami penurunan sebesar 61 basis poin dari 16,44% (Desember 2008) menjadi 15,83% (September 2009). Rata-rata suku bunga investasi mengalami penurunan sebesar 32 basis poin dari 15,81% menjadi 15,49%, sementara untuk kredit konsumsi hanya turun sebesar 12 basis poin dari 14,65% menjadi 14,54%. Peluang penurunan suku bunga diperkirakan masih tetap terbuka sejalan dengan kesepakatan yang diambil oleh 14 Bank Besar pada tanggal 20 Agustus 2009 untuk menurunkan suku bunga simpanan agar mendekati BI rate dalam rangka mendorong penurunan biaya dana (*cost of funds*) guna meningkatkan fungsi intermediasi perbankan.

3. BANK UMUM SYARIAH

Pada triwulan III-2009, secara umum, perkembangan bank umum syariah di Jawa Barat tetap menunjukkan peningkatan. Secara tahunan, sampai dengan posisi bulan Agustus 2009, pertumbuhan total aset bank umum syariah meningkat dari 19,87% (yoy) pada triwulan II-2009 menjadi 36,58%.

Pertumbuhan penyaluran kredit meningkat dari 27,67% (yoy) menjadi 30,64%. Sebaliknya, pertumbuhan DPK melambat dari 73,66% (yoy) menjadi 36,14%. Sementara itu secara triwulanan, total aset bank umum syariah turun sebesar 1,05% (qtq), berbeda dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,85%. Begitu juga dengan pertumbuhan DPK pada triwulan laporan yang mengalami penurunan sebesar 2,52% (qtq), padahal triwulan sebelumnya masih tumbuh 11,46%. Berbeda dengan pertumbuhan penyaluran kredit yang tetap mengalami peningkatan dari 5,04% (qtq) pada triwulan II-2009 menjadi 5,34% pada triwulan III-2009. Dengan kondisi tersebut, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank umum syariah di Jawa Barat mengalami peningkatan dari 79% pada triwulan II-2009 menjadi 85% pada triwulan laporan. Di sisi lain, risiko pembiayaan juga mengalami sedikit peningkatan. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah/*Non Performing Financing* (NPF) yang mengalami peningkatan dari 3,46% pada Juni 2009 menjadi 3,72% pada Agustus 2009.

Grafik 3.23. Perkembangan Indikator Bank Umum Syariah Di Jawa Barat



Sumber: LBUS KBI Bandung

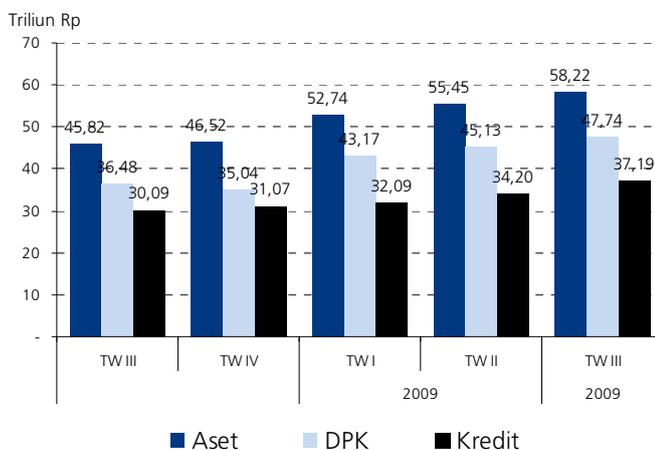
4. BANK UMUM YANG BERKANTOR PUSAT DI JAWA BARAT

Pada triwulan III-2009, perlambatan juga terjadi pada indikator perkembangan bank umum berkantor pusat di Jawa Barat. Secara tahunan, pertumbuhan aset melambat dari 36,64% (yoy) pada triwulan II-2009 menjadi 30,16% pada Agustus 2009 atau menjadi Rp58,22 triliun. Demikian juga dengan kredit yang disalurkan mengalami perlambatan dari 39,31% menjadi 25,64% atau

menjadi Rp37,19 triliun. DPK melambat dari 38,81% menjadi 33,41% atau menjadi Rp47,74 triliun. Sementara itu secara triwulanan, perlambatan hanya terjadi pada total aset, sedangkan penyaluran kredit dan DPK mengalami peningkatan. Total aset melambat dari 5,14% (qtq) menjadi 4,99%. Penyaluran kredit meningkat dari 6,60% (qtq) menjadi 8,73% dan DPK meningkat dari 4,55% (qtq) menjadi 5,78%. Di sisi lain, LDR bank umum tersebut mengalami peningkatan dari 75,79% triwulan sebelumnya menjadi 77,90%. Sementara itu, risiko kredit semakin berkurang seiring dengan membaiknya perekonomian. Hal ini terlihat dari persentase kredit bermasalah yang turun dari 1,04% pada triwulan sebelumnya menjadi 1,00% pada triwulan III-2009.

Sampai dengan posisi triwulan III-2009, tujuh bank umum yang berkantor pusat di Jawa Barat menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari laba yang berhasil diperoleh selama tahun 2009. Sampai dengan bulan Agustus 2009 *Net Interest Income* (NII) tercatat sebesar Rp2,65 triliun atau lebih tinggi dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,32 triliun. Namun secara persentase NII hanya mencapai 6,16% atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya (6,50%). Sementara itu, rasio *Return on Asset* (ROA) sampai dengan bulan Agustus 2009 tercatat sebesar 1,91% lebih rendah dibandingkan dengan posisi Agustus 2008 (2,30%), sedangkan rasio efisiensi antara Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 81,33% lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun 2008 yang sebesar 75,80%.

Grafik 3.24. Perkembangan Indikator Bank Umum yang Berkantor Pusat di Jawa Barat

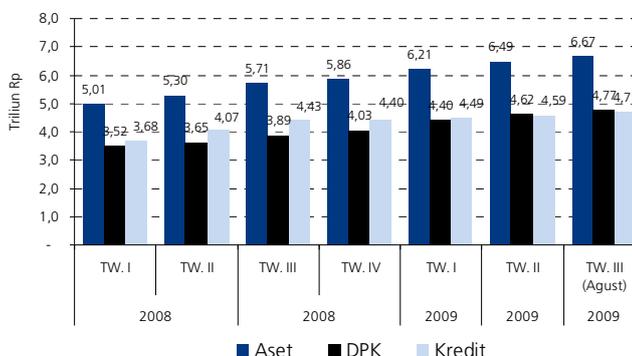


Sumber: LBU KBI Bandung

5. BANK PERKREDITAN RAKYAT

Seperti halnya bank umum, perkembangan indikator BPR konvensional di Jawa Barat pada triwulan III-2009 mengalami perlambatan. Hal ini terlihat dari melambatnya pertumbuhan beberapa indikator seperti aset, DPK dan kredit. Secara tahunan, total aset tumbuh melambat dari 22,48% (yoy) pada triwulan II-2009 menjadi 19,44% di bulan Agustus 2009 atau menjadi sebesar Rp6,67 triliun. Demikian juga

Grafik 3.25. Perkembangan Indikator BPR Konvensional di Jawa Barat



Sumber: LBPR KBI Bandung

dengan DPK yang tumbuh melambat dari 26,76% (yoy) menjadi 25,85% atau menjadi Rp4,77 triliun. Sementara itu, penyaluran kredit BPR juga tumbuh melambat dari 12,72% (yoy) menjadi 9,48% atau menjadi Rp4,71 triliun. Secara triwulanan, total aset dan DPK mengalami perlambatan, sebaliknya penyaluran kredit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Total aset tumbuh melambat dari 4,43% (qtq) pada triwulan II-2009 menjadi 2,74% pada bulan Agustus 2009. DPK tumbuh melambat dari 5,10% (qtq) menjadi 3,16%, sedangkan kredit yang disalurkan justru mengalami peningkatan pertumbuhan dari 2,25% (qtq) menjadi 2,54%.

Sebagian besar kredit yang disalurkan BPR merupakan kredit produktif (modal kerja dan investasi). Pangsa kredit produktif tersebut mencapai 55,7% dari total kredit BPR, sedangkan sisanya merupakan kredit untuk konsumsi. Kredit modal kerja mengalami pertumbuhan sebesar 0,99% (qtq) atau 4,29% (yoy) menjadi Rp2,48 triliun, sementara kredit konsumsi tumbuh 4,18% (qtq) atau 18,80% (yoy) menjadi Rp2,08 triliun. Sebaliknya, kredit investasi mengalami penurunan sebesar 2,86% (qtq) atau 13,33% (yoy) menjadi Rp140,51 miliar. Di sisi lain, risiko kredit BPR masih cukup tinggi. Pada posisi bulan Agustus 2009, persentase kredit bermasalah kotor (NPL Gross) mencapai 9,59% atau sedikit menurun dibandingkan dengan posisi bulan Juni 2009 yang mencapai 9,60%.

BOKS 5**DAMPAK GEMPA BUMI TERHADAP PERBANKAN DI JAWA BARAT**

Gempa tektonik berkekuatan 7,3 skala Richter yang berpusat di sekitar Tasikmalaya pada tanggal 2 September 2009 mengakibatkan kerusakan di beberapa daerah di Jawa Barat, terutama di sekitar pusat gempa. Daerah-daerah tersebut diantaranya, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Gempa tersebut menelan korban jiwa dan luka-luka serta lebih dari 190 ribu orang mengungsi. Selain itu, ribuan rumah maupun sarana umum seperti sekolah, kantor dan tempat ibadah rusak berat maupun rusak ringan.

Perbankan di Jawa Barat juga tidak luput dari gempa tersebut, namun demikian dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap kelancaran operasional perbankan. Jaringan dan sistem perbankan tidak ada yang mengalami kerusakan. Dari sekitar 1.400 kantor bank yang ada di Jawa Barat, hanya 7 gedung rusak berat dan 40 gedung rusak ringan (retakan pada dinding gedung). Sementara itu, hanya 1 BPR yang terpaksa menghentikan kegiatan operasionalnya, akibat kerusakan gedung yang cukup parah, dan hanya 3 kantor bank yang sementara memindahkan kegiatan operasionalnya ke unit terdekat.

Berdasarkan data Laporan Bulanan Bank bulan September 2009, pangsa aset perbankan yang beroperasi di wilayah yang terkena bencana hanya sekitar 8% dari total aset perbankan Jawa Barat. Sementara itu, jumlah dana pihak ketiga yang ada di wilayah tersebut tercatat sebesar Rp9,86 triliun atau 7,7% dari total DPK, sedangkan kredit yang disalurkan tercatat sebesar Rp11,72 triliun atau 12,06% dari total kredit. Di sisi lain, risiko kredit (NPL gross) di wilayah tersebut sebelum musibah gempa relatif tidak terlalu besar hanya sekitar 2,29%. Dengan dampak gempa yang relatif terlalu signifikan terhadap perekonomian dan dunia usaha di wilayah tersebut, maka potensi peningkatan risiko kredit diperkirakan masih dalam batas yang terkendali.

BAB 4

PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH



Perkembangan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat pada triwulan III-2009 menunjukkan laju pertumbuhan penerimaan pajak diperkirakan relatif stagnan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Meskipun penerimaan pajak pemerintah pusat masih mengalami kontraksi pada triwulan III-2009, penerimaan pajak pemerintah daerah diperkirakan dapat menahan laju perlambatan tersebut. Penurunan penerimaan pajak pemerintah pusat pada triwulan III-2009 terkait kebijakan stimulus fiskal berupa keringanan pajak. Sementara itu, sejalan dengan pemulihan perekonomian, penerimaan pajak Pemerintah Provinsi yang sebagian berasal dari konsumsi kendaraan bermotor justru mengalami peningkatan.

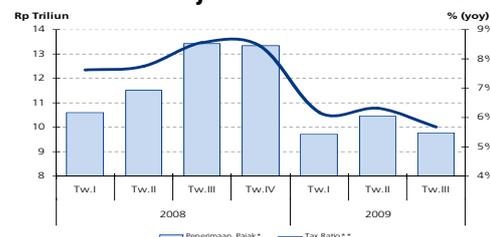
Di sisi lain, baik realisasi belanja pemerintah daerah maupun pusat di Jawa Barat pada triwulan III-2009 meningkat sebagaimana terlihat dari perlambatan pertumbuhan rekening simpanan milik Pemda dari 32,37% (yoy) pada triwulan II-2009 menjadi 26,29% pada triwulan III-2009. Belanja Pemerintah Pusat di daerah melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan meningkat disebabkan oleh program peningkatan kesejahteraan petani, penanggulangan bencana gempa Tasikmalaya, serta realisasi Biaya Operasional Sekolah pada tahun ajaran baru. Realisasi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada triwulan III-2009 diperkirakan baru mencapai kisaran 48% hingga 58%, meskipun demikian realisasi fisik pembangunan diperkirakan akan jauh lebih tinggi, yakni mencapai kisaran 60% hingga 70%.

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) 2009 telah disahkan pada tanggal 28 September 2009. Pendapatan daerah diperkirakan meningkat terutama disebabkan oleh kenaikan dana perimbangan. Peningkatan dana perimbangan merupakan hasil dari realokasi dana bagi hasil cukai rokok dan pajak panas bumi. Dari sisi belanja daerah, anggaran belanja juga mengalami peningkatan yang terutama digunakan untuk mengatasi penanggulangan gempa Tasikmalaya dan program pemeliharaan jalan dan jembatan.

1. PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI DI JAWA BARAT

*Tax ratio*¹ (rasio pajak terhadap PDRB) Jawa Barat turun tipis dari 6,31% pada triwulan II-2009 menjadi 5,66% pada triwulan III-2009 (Grafik 4.1). Penurunan disebabkan oleh penerimaan pajak pemerintah pusat terkait realisasi stimulus keringanan pajak pada triwulan III-2009. Pendapatan Pemerintah Provinsi juga mengalami perlambatan terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan kendaraan bermotor yang relatif rendah pada triwulan III-2009. Meskipun sedikit tertahan oleh peningkatan dana perimbangan.

Grafik 4.1. *Tax Ratio* dan Total Penerimaan Pajak di Provinsi Jawa Barat



Keterangan: *) Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat yang terdiri dari PPh, PPN, dan PBB serta perkiraan penerimaan pajak pemerintah daerah, **) Tax ratio adalah pembagian antara pajak dengan PDRB Jawa Barat (Atas Dasar Harga Berlaku)
 Sumber: BPS, Dipenda Provinsi Jawa Barat, KBI Bandung, Cirebon, dan Tasikmalaya

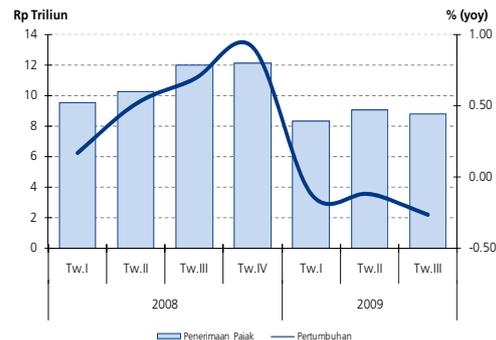
¹ *Tax ratio* adalah rasio penerimaan pajak terhadap PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku)

1.1. PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH

Pendapatan pemerintah pusat di Jawa Barat pada triwulan III-2009 lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III-2008. Turunnya penerimaan pemerintah pusat dari Rp11,99 triliun pada triwulan III-2008 menjadi Rp8,79 triliun pada triwulan III-2009 disebabkan oleh insentif keringanan pajak pada tahun 2009 yang diberikan sebagai stimulus fiskal, *sunset policy* pada tahun 2008, serta melambatnya perekonomian Jawa Barat pada tahun 2009.

Pertumbuhan tahunan pendapatan pajak pemerintah pusat masih mengalami kontraksi bahkan semakin dalam pada triwulan III-2009, yaitu dari -12,13% (yoy) pada triwulan II-2009 menjadi -26,72% pada triwulan III-2009 (Grafik 4.2). Meskipun siklus kenaikan fiskal pada umumnya terjadi pada triwulan III-2008, pada triwulan III-2009 penerimaan pajak pemerintah pusat turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan realisasi insentif keringanan pajak yang terjadi pada triwulan III-2009.

Grafik 4.2. Perkembangan Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat



Sumber: Transaksi Rekening Pemerintah di KBI Bandung, Cirebon, dan Tasikmalaya

Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I menurunkan target penerimaan dari Rp10,86 triliun menjadi Rp10,02 triliun. Hingga akhir triwulan III-2009 penerimaan pajak pemerintah pusat telah mencapai 70%-80% dari target. Sebagian besar penerimaan pajak, berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang memiliki pangsa sebesar 24,42% dari total penerimaan pajak, sementara pangsa Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 10,36%.

Insentif keringanan pajak PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) diperkirakan tidak akan terserap hingga akhir tahun. Wajib pajak di Jawa Barat hanya merealisasikan sekitar 10%-15% dari stimulus keringanan PPh 21. Beberapa pengusaha tidak merealisasikan stimulus tersebut disebabkan oleh jangka waktu penerapan stimulus yang pendek, dan ketidakpastian keberlanjutan stimulus fiskal tersebut yang dikhawatirkan berpengaruh terhadap upah bersih karyawan.

1.2. PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI

Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, yakni dari 96,78% pada triwulan III-2008 menjadi 72,75% pada triwulan III-2009 (Tabel 4.1). Realisasi pendapatan yang lebih rendah disebabkan oleh relatif rendahnya pembelian kendaraan bermotor pada triwulan III-2009 dibandingkan dengan triwulan III-2008. Perlambatan pendapatan Pemerintah Provinsi tertahan oleh peningkatan dana perimbangan, yang berasal dari realokasi dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat yang berupa cukai rokok dan pajak panas bumi. Oleh karena itu, penerimaan pajak Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada akhir tahun diperkirakan akan terealisasi sebesar 93% hingga 98% dari target.

Tabel 4.1. Perkembangan Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

No.	Uraian	APBD 2008 (Rp Miliar)	Triwulan III-2008*		APBD 2009 (Rp Miliar)	Triwulan III-2009**	
			Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi thd APBD		Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi thd APBD
I	PAD	4.055,12	4.021,91	99,18	5.176,29	3.560,32	68,78
	a. Pajak Daerah	3.796,64	3.728,96	98,22	4.835,28	3.177,41	65,71
	b. Retribusi Daerah	29,48	24,81	84,16	28,632	22,89	79,94
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	125,32	138,57	110,57	138,21	179,37	129,78
	d. Lain-lain PAD	103,67	129,56	124,97	174,168	180,656	103,73
II	Dana Perimbangan	1.630,81	1.359,24	83,35	1.763,25	1.472,76	83,53
	a. Bagi Hasil Pajak	726,58	605,63	83,35	786,02	650,41	82,75
	b. Dana Alokasi Umum	904,23	753,61	83,34	977,237	822,353	84,15
	c. Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	-	-
III	Lain-lain Pendapatan	10,36	131,98	1274,18	12,44	24,70	198,60
	a. Bantuan Keuangan	7,51	5,87	78,14	9,59	0,00	0,00
	b. Lain-lain Penerimaan	2,84	126,11	4.435,11	2,843	24,7	868,80
Total Pendapatan		5.696,29	5.513,13	96,78	6.951,98	5.057,78	72,75

Sumber: *) Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat, **) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada tahun 2009 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2008 (Tabel 4.2). Hal ini disebabkan oleh penurunan minat masyarakat untuk melakukan pembelian kendaraan bermotor bekas serta harga BBM bersubsidi yang lebih rendah. Namun demikian, penerimaan yang berasal dari pajak kendaraan bermotor masih menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 4.2 Perkembangan Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi Jawa Barat

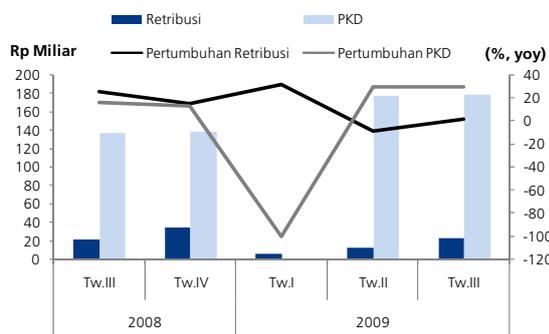
Jenis Pajak	2008			2009		
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III*)
Pajak Kendaraan Bermotor	424,61	471,42	398,76	411,03	458,21	520,142
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	520,34	613,20	452,76	403,80	423,09	564,997
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	261,98	328,18	323,48	265,61	262,93	282,93
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	21,85	23,45	22,44	22,81	23,53	35,335
Jumlah	1.228,78	1.436,25	1.197,43	1.103,24	1.167,76	1.403,404

Keterangan: *) Data Sementara

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (PPABTAP) Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan, yakni dari kisaran Rp21 miliar hingga Rp24 miliar pada triwulan-triwulan sebelumnya menjadi Rp35,34 miliar pada triwulan III-2009 (Tabel 4.2). Pemerintah Provinsi menaikkan tarif PPABTAP yang semula Rp525/m³ hingga Rp3.000/m³ menjadi Rp8.000/m³-Rp20.000/m³. Kenaikan tarif tersebut untuk mencegah pengambilan air tanah secara tidak terkendali oleh pengusaha dan pengelola gedung tinggi di Ibukota yang dapat mengakibatkan penurunan permukaan air tanah. Kenaikan tarif tersebut juga terjadi pada sebagian besar provinsi di Indonesia.

Grafik 4.3. Perkembangan Retribusi dan Pengelolaan Kekayaan Daerah (PKD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat



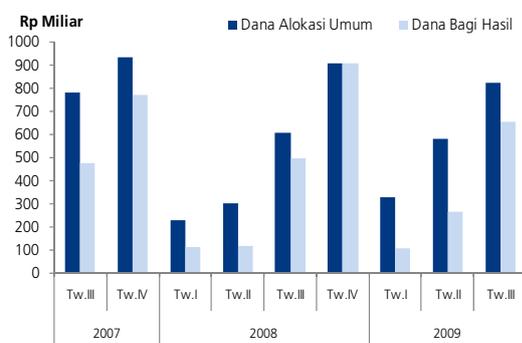
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan pola musimannya penerimaan dari retribusi mengalami peningkatan pada triwulan III-2009 dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada triwulan IV-2009. Namun demikian, retribusi Provinsi Jawa Barat memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap pendapatan asli daerah, yakni sebesar 0,6%. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperoleh pendapatan terbesar dari retribusi pasar dan terminal.

Dana Perimbangan

Pada triwulan III-2009 persentase realisasi dana perimbangan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, yakni dari 83,35% menjadi 83,53% (Tabel 4.1). Peningkatan realisasi dana perimbangan terutama berasal dari dana alokasi umum. Hal ini terkait kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan transfer ke daerah dalam rangka penanganan krisis keuangan global. Sementara itu, secara nominal dana bagi hasil pajak pemerintah provinsi meningkat dari Rp605,63 miliar pada triwulan III-2008 menjadi Rp650,41 miliar pada triwulan III-2009.

Grafik 4.4 Perkembangan Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Realisasi dana bagi hasil pajak (DBH) Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2009 (Grafik 4.4). Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya pendapatan pajak pemerintah pusat pada tahun 2009. Sementara itu, jumlah dana alokasi umum yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat relatif sama dengan tahun sebelumnya.

2. BELANJA DAERAH

Belanja pemerintah di Jawa Barat pada triwulan III-2009 masih relatif terbatas meskipun menunjukkan kenaikan laju realisasi meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan belanja dibandingkan dengan triwulan sebelumnya terjadi pada sebagian besar jenis belanja pemerintah di Jawa Barat. Namun demikian, belanja APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih relatif terbatas karena proses realisasi sedikit tertunda pada bulan Ramadhan dan hari raya Idul

Fitri. Namun demikian, pada triwulan IV-2009 belanja Pemerintah Provinsi diperkirakan akan mencapai target yang telah ditetapkan.

2.1. BELANJA APBN DI JAWA BARAT

Realisasi belanja dana tugas pembantuan mengalami kenaikan terutama di kabupaten dan kota wilayah Jawa Barat bagian Selatan yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. Selain itu, pada triwulan III-2009 belanja yang berasal dari utang luar negeri meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun demikian, realisasi belanja dana dekonsentrasi masih mengalami perlambatan karena reorganisasi Organisasi Perangkat Daerah.

Belanja Dana Dekonsentrasi

Dana dekonsentrasi meningkat dari Rp5,43 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp4,64 triliun pada tahun 2009 (Tabel 4.2). Peningkatan plafon anggaran terutama terjadi pada dinas-dinas yang berada pada koordinasi Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, dan Departemen Kesehatan. Sementara itu, alokasi anggaran terbesar tetap diterima oleh Dinas Pendidikan, yakni sebesar Rp4,54 triliun.

Realisasi anggaran Dinas Sosial tumbuh tertinggi pada triwulan III-2009, yakni menjadi 52,10% setelah pada triwulan sebelumnya belum merealisasikan anggaran (Tabel 4.3). BAPPEDA Provinsi Jawa Barat menginformasikan bahwa besarnya realisasi anggaran terutama digunakan untuk penanggulangan gempa Tasikmalaya. Penanggulangan bencana gempa Tasikmalaya menggunakan anggaran program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial.

Dinas Pendidikan sebagai penerima dana dekonsentrasi terbesar telah melakukan realisasi anggaran terbesar secara nominal pada triwulan III-2009, yakni sebesar Rp503 miliar (Tabel 4.3). Sebagian besar dana Dinas Pendidikan dialokasikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS bertujuan untuk pelatihan dan penataran infrastruktur, pembinaan dan konsultasi pengawasan, penyuluhan dan penyebaran informasi, pengembangan kelombagaan, pemberian bantuan sosial, serta pengadaan konsultan.

Tabel 4.3 Realisasi Dana Dekonsentrasi Jawa Barat di Lima Dinas

Dinas	Anggaran (Rp Miliar)	Tw.II		Tw.III	
		Realisasi (Rp Miliar)	Realisasi Keuangan	Realisasi (Rp Miliar)	Realisasi Keuangan
Dinas Pendidikan	4540,44	401,83	8,85%	904,46	19,92%
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD)	42,97	9,93	23,10%	19,95	46,43%
Dinas Pertanian	30,41	0,00	0%	2,11	6,94%
Dinas Sosial	25,21	2,48	0	13,13	52,10%
Dinas Tata Ruang dan Pemukiman	14,5	0,36	2,47%	6,24	43,01%
Jumlah	4.637,44	478,12	10,31%	1.190,89	25,68%

Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

Belanja Dana Tugas Pembantuan

Kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah Jawa Barat bagian selatan memperoleh peningkatan anggaran terbesar, sebagaimana tercermin pada jumlah dana tugas pembantuan yang diterima oleh Kabupaten Garut Sukabumi, dan Tasikmalaya (Tabel 4.*).

Dana tugas pembantuan adalah dana program pemerintah pusat untuk pembangunan fisik di daerah. Meskipun jumlah dana tugas pembantuan relatif terbatas, dana tersebut diharapkan dapat membantu daerah pedesaan melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (PKMP) yang memiliki alokasi dana program terbesar.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang telah merealisasikan dana tugas pembantuan tertinggi. Pada triwulan II-2009 Kabupaten Tasikmalaya hanya merealisasikan sebesar 48,29% dan pada triwulan III-2009 realisasi dana tugas pembantuan sebesar 62,01% (Tabel 4.*). Realisasi dana tugas pembantuan Kabupten Tasikmalaya terutama digunakan untuk program peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Kedua program tersebut merupakan limpahan dari Departemen Pertanian dari total 3 program yang diimplementasikan di Kabupaten Tasikmalaya. Melalui program peningkatan ketahanan pangan, pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan benih, sarana produksi, pembenihan, perbaikan infrastruktur pertanian, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), penyakit hewan, mekanisasi pra dan pasca panen, peningkatan produktivitas, pengembangan desa mandiri pangan, dan diversifikasi pangan. Sementara melalui program peningkatan kesejahteraan petani, pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan pelatihan untuk pertanian dan penanganan bencana alam.

Sementara itu, provinsi Jawa Barat sebagai pemegang dana tugas pembantuan terbesar di Jawa Barat telah merealisasikan sebesar 51,43% dari total anggaran yang sebesar Rp204,89 miliar (Tabel 4.4). Realisasi fisik terbesar dana tugas pembantuan terbesar berada pada program di bawah pengawasan Departemen Pekerjaan Umum, yakni program rehabilitasi jalan dan jembatan. Bahkan realisasi fisik program tersebut lebih besar dibandingkan dengan realisask keuangan. Hal ini disebabkan oleh kontraktor rehabilitasi jalan maupun jembatan memperoleh pembiayaan dari perbankan sehingga realisasi keuangan dari pemerintah daerah relatif lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pembangunan.

Tabel 4.4 Realisasi Dana Tugas Pembantuan Jawa Barat di Lima Dinas

Provinsi/Kabupaten/Kota	Anggaran (Rp Miliar)	Tw.II		Tw.III	
		Realisasi (Rp Miliar)	Realisasi Keuangan	Realisasi (Rp Miliar)	Realisasi Keuangan
Provinsi Jawa Barat	204,89	12,79	6,24%	51,43	25,10%
Kabupaten Garut	117,34	4,48	3,82%	35,99	30,67%
Kabupaten Sukabumi	100,33	0,43	0,43%	39,57	39,44%
Kabupaten Tasikmalaya	87,94	42,47	48,29%	54,53	62,01%
Kabupaten Cianjur	75,29	3,83	5,09%	42,48	56,42%
Jumlah	1.145,16	138,56	12,10%	359,12	31,36%

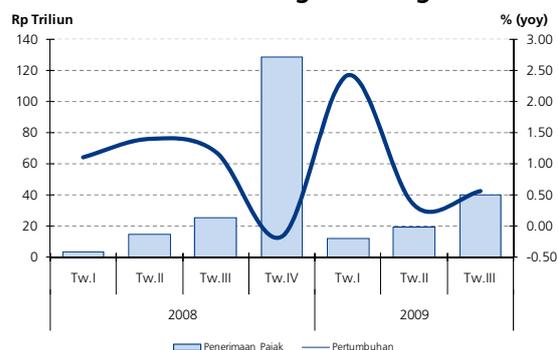
Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

Keterangan: *) Data sementara karena Kabupaten Majalengka belum melaporkan

Belanja APBN yang Berasal dari Utang Luar Negeri

Sesuai dengan pola musimannya, belanja pemerintah pusat di Jawa Barat yang dibiayai dari utang luar negeri menunjukkan peningkatan pada triwulan III-2009. Pada triwulan III-2009 belanja pemerintah pusat di Jawa Barat dari utang luar negeri mencapai Rp39,70 miliar meningkat dibandingkan dengan triwulan I-2009 yang sebesar Rp19,11 miliar (Grafik 4.5).

Grafik 4.5. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat dari Utang Luar Negeri



Sumber: KBI Bandung

Pada triwulan III-2009 realisasi belanja dari utang luar negeri terbesar ditujukan untuk pemberdayaan petani miskin dan masyarakat pedesaan serta pengembangan lingkungan sekitar, yakni sebesar Rp30,37 miliar dari Rp40,13 miliar total belanja yang dibiayai dari utang luar negeri (Tabel 4.5). Pembiayaan terbesar diperoleh dari *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) yakni lembaga yang menangani pembangunan di negara berkembang. Sementara, *Asian Development Bank* (ADB) masih melanjutkan pemberian pembiayaan seperti tahun sebelumnya.

Realisasi seluruh jenis belanja yang dibiayai oleh utang luar negeri meningkat pada triwulan III-2009. Peningkatan terutama terjadi pada program pemberdayaan petani miskin dan masyarakat pedesaan serta pengembangan lingkungan sekitar. Realisasi belanja terbesar dilaksanakan pada bulan September 2009, yakni sebesar Rp17,45 miliar. Hal ini disebabkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mulai mempercepat realisasi anggarannya, baik yang berasal dari utang luar negeri maupun pendapatan daerah.

Tabel 4.5 Perkembangan Belanja yang Berasal dari Utang Luar Negeri

No.	Jenis	Triwulan II-2009	Bulan Juli 2009	Bulan Agustus 2009	Bulan September 2009	Triwulan III-2009	Sumber Dana
1	Penelitian serta Partisipasi Pembangunan Irigrasi	1,914,584,355	1,102,987,246	1,181,256,844	1,274,734,016	3,558,978,106	International bank for Reconstruction and Development (IBRD)
2	Pendidikan	5,595,885,000	4,446,695,000	505,014,864	1,252,380,600	6,204,090,464	IBRD, BOS
3	Pemberdayaan Petani Miskin & Masyarakat Pedesaan serta Pengembangan Lingkungan Sekitar	22,262,057,189	6,975,082,228	8,465,776,820	14,924,596,490	30,365,455,538	IBRD, Asian Development Bank (ADB)
Jumlah		29,772,526,544	12,524,764,474	10,152,048,528	17,451,711,106	40,128,524,108	

Keterangan: IBRD = *International Bank for Reconstruction*; ADB = *Asian Development Bank*

Sumber: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) KBI Bandung

Realisasi utang luar negeri pada bulan September mengalami peningkatan sebagaimana pola musimannya. Sebagian besar utang luar negeri yang diterima oleh Jawa Barat berasal dari IBRD. IBRD memberikan pembiayaan yang bertujuan untuk perbaikan iklim investasi, pemberantasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Program unggulan IBRD adalah pengembangan

perumahan, dengan langkah awal berupa proyek percontohan di Kota Bandung. Anggaran dari IBRD untuk proyek perumahan ini dikelola oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman.

2.2. BELANJA APBD PROVINSI JAWA BARAT

Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada triwulan III-2009 diperkirakan lebih lambat dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh reorganisasi dinas/instansi dan pejabat berwenang atas pengelolaan anggaran serta penyelenggaraan PEMILU. Namun demikian, beberapa jenis belanja seperti belanja pegawai dan modal diperkirakan akan direalisasikan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Pada tahun 2009 hambatan yang paling sering ditemui dalam merealisasikan anggaran oleh para pengelola keuangan adalah aspek administratif dan legal merupakan hambatan utama dalam merealisasikan anggaran. Hambatan administrasi yang terjadi adalah penyusunan APBD yang panjang serta terbatasnya SDM yang berminat menjadi panitia pengadaan Sementara itu, hambatan aspek legal adalah peraturan yang multi tafsir serta peraturan yang mudah berubah.

Peningkatan belanja pada triwulan III-2009 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya terutama terjadi pada belanja pegawai dan modal. Peningkatan realisasi belanja pegawai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya karena program peningkatan kesejahteraan pegawai pada tahun 2009. Peningkatan realisasi belanja pegawai juga disebabkan oleh pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) pada bulan Ramadhan yang terjadi pada bulan September 2009.

Sementara itu, realisasi belanja modal relatif lebih tinggi setelah pada triwulan sebelumnya melewati tahapan lelang. Hal ini dikonfirmasi oleh realisasi keuangan Dinas Bina Marga yang meningkat drastis pada triwulan ini, yakni dari Rp75 miliar pada triwulan II-2009 menjadi sebesar Rp214 miliar pada triwulan III-2009. Dinas Bina Marga menginformasikan bahwa meskipun realisasi keuangan pada triwulan laporan relatif terbatas tetapi realisasi fisik Dinas Bina Marga dipastikan akan lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh Dinas Bina Marga baru membayarkan uang muka kepada kontraktir sedangkan kontraktor memperoleh pembiayaan modal kerja dari perbankan.

Meskipun realisasi belanja lain-lain relatif terbatas, penanggulangan bencana alam gempa di Tasikmalaya mampu mendorong realisasi belanja lain-lain. Belanja lain-lain adalah jenis belanja yang terdiri dari belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga serta belanja modal. Kenaikan belanja lain-lain disebabkan oleh respon pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan bencana gempa Tasikmalaya.

Berdasarkan prognosis Biro Keuangan, anggaran belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 diperkirakan akan terealisasi sebesar 99,53% (Tabel 4.6). Dengan adanya dorongan belanja pemerintah daerah yang cukup baik maka perlambatan perekonomian Jawa Barat diharapkan dapat dikoreksi. Bahkan belanja pegawai diperkirakan akan mengalami kenaikan melebihi alokasi anggaran. Kondisi ini akan diakomodasi dalam APBD-Perubahan tahun anggaran 2009.

Tabel 4.6 Realisasi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Rp Miliar)

Jenis Belanja	2008			2009		
	APBD (Rp Miliar)	Realisasi Tw.III	Realisasi Tw.IV*	APBD (Rp Miliar)	Realisasi Tw.III*	Realisasi Tw.IV**
Belanja Pegawai	1.182,43	73,05%	100%	1.467,81	73-78%	140,67%
Belanja Lain-lain***	3.370,93	68,38%	80-90%	4.304,89	40-50%	87,22%
Belanja Barang dan Jasa	1.030,52	57,14%	90-98%	1.566,11	45-55%	99,73%
Belanja Modal	416,13	33,63%	95-99%	923,77	30-40%	99,86%
Total Belanja	6.050,02	64,20%	90-97%	8.262,58	48-58%	99,53%

Keterangan: *) Proyeksi KBI Bandung, **) Prognosis Biro Keuangan, ***) Belanja lain-lain terdiri dari Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Tidak Terduga
 Sumber: Biro Keuangan, diolah

Namun demikian belanja hibah dan bantuan sosial diperkirakan tidak dapat terealisasi sepenuhnya pada tahun 2009. Hal ini disebabkan oleh sikap kehati-hatian petugas pengelola keuangan daerah selama penyelenggaraan PEMILU. Selain itu, perubahan struktur organisasi dan nomenklatur dinas/instansi pemerintah juga menunda pengesahan peraturan daerah yang menjadi landasan hukum pencairan belanja hibah dan bantuan sosial.

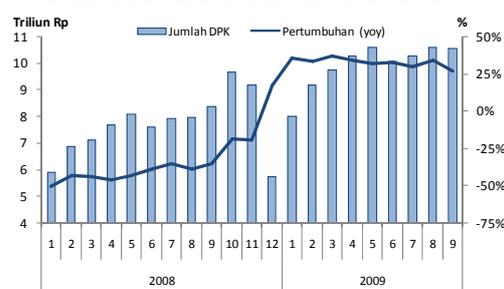
Belanja modal yang baru terealisasi sekitar 30-40% pada triwulan III-2009 diperkirakan akan sepenuhnya terealisasi pada akhir triwulan IV-2009. Optimismen tersebut disebabkan oleh telah selesainya proses lelang pada awal triwulan III-2009 dan sebagian besar program yang dilaksanakan adalah pemeliharaan infrastruktur yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih singkat. Hal ini tercermin dari realisasi fisik pada triwulan III-2009 telah mencapai 58% meskipun realisasi keuangan hanya sebesar 36%.

Di lain pihak, sebagian besar pengelola keuangan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat berpendapat bahwa realisasi keuangan daerah akan relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, keuangan daerah pada triwulan III akan terealisasi dengan kisaran 60% hingga 65%. Sementara, belanja modal hanya akan berkisar antara 35% hingga 45% dan akan terealisasi sepenuhnya pada akhir tahun anggaran.

3. REKENING MILIK PEMERINTAH DAERAH DI BANK UMUM

Rekening milik Pemerintah Daerah (Pemda) di bank umum meningkat dari Rp 10,06 triliun pada akhir triwulan II-2009 menjadi Rp10,53 triliun pada akhir triwulan III-2009 (Grafik 4.6). Peningkatan DPK milik Pemda disebabkan oleh realisasi belanja pemerintah daerah yang relatif tertahan serta transfer Dana Perimbangan tahap II yang dilakukan setiap bulan Agustus .

Grafik 4.6. Perkembangan Rekening Milik Pemerintah Daerah di Jawa Barat



Sumber: LBU, diolah

Pada triwulan III-2009, realisasi belanja pemerintah daerah meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dari perlambatan pertumbuhan DPK dari 32,37% (yoy) pada triwulan II-2009 menjadi 26,29% pada akhir triwulan III-2009. Perlambatan pertumbuhan DPK disumbangkan oleh laju pertumbuhan giro dan tabungan yang melambat (Tabel 4.7). Perlambatan pertumbuhan tersebut mengindikasikan adanya percepatan realisasi belanja daerah maupun realisasi pendapatan yang lebih rendah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya.

Tabel 4.7 Perkembangan Pertumbuhan Rekening Milik Pemerintah Daerah di Jawa Barat Menurut Jenis Rekening (yoy, %)

	2008				2009		
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III
Giro	16.25	-6.41	-2.42	17.38	17.60	38.05	29.37
Tabungan	-48.93	-8.38	-12.29	18.14	141.87	19.70	18.24
Deposito	115.51	-82.71	-9.27	-35.73	-57.67	-28.21	0.33
DPK	-44.31	-39.21	-35.65	16.91	36.84	32.37	26.29

Sumber: LBU, diolah

Seluruh pemerintah daerah mengalami perlambatan pertumbuhan outstanding DPK rekening milik Pemda. Rekening milik pemerintah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bekasi mengalami perlambatan pertumbuhan tercepat dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya. Bahkan, rekening milik Pemerintah Kota Bekasi telah mengalami perlambatan menjadi -11,27% (yoy) (Tabel 4.8).

Tabel 4.8 Perkembangan Pertumbuhan Rekening Milik Pemerintah Daerah di Jawa Barat Menurut Lokasi Rekening (yoy, %)

Pemerintah Daerah *)	2008				2009		
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III
Kodya Bandung **)	-59.78	-59.09	23.09	33.17	41.63	63.66	52.35
Kab. Bandung ***)	-20.31	2.23	-3.14	91.66	21.15	45.28	-0.60
Kab. Bekasi	-64.89	24.54	-68.19	86.56	429.26	15.92	7.97
Kotif Bekasi	-84.95	39.54	-39.11	74.27	1035.36	10.42	-11.27
Kotif Tasikmalaya	8.98	-30.93	-21.63	-14.89	1.04	24.66	0.68
Keseluruhan	-44.31	-39.21	-35.65	16.91	36.84	32.37	26.29

Keterangan: *) Pemerintah daerah dengan jumlah outstanding 5 terbesar, **) Termasuk didalamnya rekening milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Kotamadya Bandung, ***) Termasuk didalamnya Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat

Sumber: LBU, diolah

4. APBD – PERUBAHAN 2009

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengesahkan APBD-Perubahan (APBD-P) 2009 pada Perda No. 8 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009. Pengesahan peraturan tersebut adalah berdasarkan atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.903/3179/SJ tanggal 31 Agustus 2009 yang menyebutkan bahwa jika pemimpin DPRD definitif belum diangkat maka kepala daerah dapat menetapkan APBD-P melalui Surat Keputusan Gubernur. Surat tersebut merupakan bentuk antisipasi Departemen Dalam Negeri dalam rangka realisasi anggaran setelah PEMILU.

Pada APBD-P target pendapatan Pemerintah Provinsi dinaikkan dari Rp6,95 triliun menjadi Rp7,09 triliun atau naik tipis sebesar 2,01% (Tabel 4.9). Kenaikan pendapatan terutama berasal

dari dana perimbangan Pemerintah Provinsi. Sesuai dengan road map pengembangan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat meningkatkan alokasi dana bagi hasil untuk jenis cukai rokok dan pajak panas bumi. Sementara itu, target penerimaan pajak daerah turun dari Rp4,83 triliun menjadi Rp4,69 triliun karena konsumsi kendaraan bermotor masyarakat yang lebih rendah dari perkiraan Pemerintah Provinsi semula.

Selain itu, target belanja daerah meningkat dari Rp8,26 triliun menjadi Rp9,28 triliun atau naik sebesar 12,35%. Peningkatan belanja dialokasikan terutama pada belanja tidak langsung, khususnya belanja bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan tersebut ditujukan dalam rangka penganggulangan bencana gempa bumi Tasikmalaya. Belanja modal Pemerintah Provinsi yang dialokasikan terutama kepada Dinas Bina Marga juga meningkat tipis dari Rp0,92 triliun menjadi Rp1,06 triliun. Tambahan anggaran belanja modal akan digunakan untuk tambahan dana pemeliharaan jalan dan jembatan. Berdasarkan informasi dari Dinas Bina Marga, dana tambahan tersebut dapat direalisasikan tepat waktu karena melanjutkan program sebelumnya sehingga tidak melalui proses lelang.

Tabel 4.9 APBD dan APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2009

No.	Uraian	APBD 2008 (Rp Miliar)	Triwulan III-2008*		APBD 2009 (Rp Miliar)	Triwulan III-2009**	
			Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi thd APBD		Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi thd APBD
I	PAD	4.055,12	4.021,91	99,18	5.176,29		0,00
	a. Pajak Daerah	3.796,64	3.728,96	98,22	4.835,28		0,00
	b. Retribusi Daerah	29,48	24,81	84,16	28,632	22,889	79,94
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	125,32	138,57	110,57	138,21	179,37	129,78
	d. Lain-lain PAD	103,67	129,56	124,97	174,168	180,656	103,73
II	Dana Perimbangan	1.630,81	1.359,24	83,35	1.763,25	1.472,76	83,53
	a. Bagi Hasil Pajak	726,58	605,63	83,35	786,02	650,41	82,75
	b. Dana Alokasi Umum	904,23	753,61	83,34	977,237	822,353	84,15
	c. Dana Alokasi Khusus	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!
III	Lain-lain Pendapatan	10,36	131,98	1274,18	12,44		0,00
	a. Bantuan Keuangan	7,51	5,87	78,14	9,59		0,00
	b. Lain-lain Penerimaan	2,84	126,11	4.435,11	2,843		0,00
Total Pendapatan		5.696,29	5.513,13	96,78	6.951,98		0,00

Sumber: Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

BOKS 6

REALISASI STIMULUS INFRASTRUKTUR TAHUN 2009

Dalam rangka mengantisipasi perlambatan perekonomian di tahun 2009, Provinsi Jawa Barat menerima alokasi stimulus infrastruktur dari pemerintah pusat yang tersebar di tingkat kabupaten, kota, serta instansi yang langsung di bawah koordinasi pemerintah pusat, yaitu Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT). Stimulus tersebut disalurkan melalui mekanisme DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang merupakan wewenang pemerintah pusat dan tidak tercantum pada APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Sebagian besar dari stimulus tersebut dialokasikan oleh Departemen Pekerjaan Umum untuk mengerjakan proyek jalan/jembatan serta irigasi.

Alokasi Stimulus Infrastruktur di Jawa Barat

Berdasarkan informasi di website Departemen Pekerjaan Umum, Jawa Barat menerima stimulus infrastruktur sebesar Rp519,78 miliar dari total stimulus sebesar Rp5,83 triliun atau wilayah penerima dana stimulus kedua terbesar setelah Jawa Timur yang sebesar Rp1,06 triliun.

Stimulus Infrastruktur di Jawa Barat

No.	Dinas/Instansi	Wilayah	Jml Stimulus (Ribu Rupiah)
1	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor	Cibinong	68.000.000
2	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Subang	Subang	6.000.000
3	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang	Kab. Sumedang	4.320.000
4	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tasikmalaya	Kab. Tasikmalaya	20.000.000
5	Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majalengka	Jawa Barat	9.000.000
6	SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Barat	Kab. Purwakarta	137.049.151
7	SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	20.716.226
8	SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Jawa Barat	Bandung	2.234.623
9	PPK Irigasi I SNVT PPSDA Citarum	Jawa Barat	116.367.000
10	SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Citanduy	Banjar - Jawa Barat	22.455.500
11	SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Cimanuk-Cisanqqarung	Cirebon - Jawa Barat	59.675.940
TOTAL			519.775.339

Sumber: Website Departemen Pekerjaan Umum

Realisasi stimulus infrastruktur hingga triwulan III-2009

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh KBI Bandung terhadap dinas/instansi penerima stimulus pada bulan September 2009 diperoleh informasi bahwa sebagian besar dinas/instansi baru mulai merealisasikan stimulus infrastruktur pada bulan Agustus 2009 mengingat mekanisme (petunjuk teknis) tentang pencairan dana dimaksud baru terbit pada bulan Juli 2009. Hasil survei juga menunjukkan bahwa hingga posisi bulan September 2009, realisasi stimulus infrastruktur diperkirakan sekitar 24% dari total alokasi dana stimulus infrastruktur.

Dari hasil survei, dikemukakan beberapa kendala yang dihadapi dalam merealisasikan dana stimulus, antara lain:

1. Mekanisme lelang yang membutuhkan waktu relatif lama
Sebagian besar responden yang disurvei mengemukakan bahwa mekanisme lelang merupakan kendala utama dalam merealisasikan stimulus.
2. Permasalahan pada proses pembebasan lahan, terutama menyangkut tentang kesepakatan harga.
3. Permasalahan dalam bidang teknis administrasi, terutama berkaitan dengan petunjuk teknis yang menyangkut nomor DIPA stimulus serta petunjuk teknis mengenai program *multiyears* sehingga dapat menghambat pencairan dana stimulus.

Perkiraan realisasi hingga akhir tahun 2009

Meskipun menghadapi beberapa hambatan di atas, sebagian besar responden masih tetap optimis bahwa stimulus infrastruktur akan dapat direalisasikan di atas 90% pada akhir tahun 2009.

BAB 5

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN



Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional baik tunai maupun non tunai merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan undang-undang. Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar (*clean money policy*). Sementara itu kebijakan di bidang instrumen pembayaran non tunai tetap diarahkan untuk menyediakan sistem pembayaran yang efektif, efisien, aman dan handal dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

Pada triwulan III-2009, seiring dengan transaksi sistem pembayaran di Jawa Barat secara umum mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah aliran uang masuk (*inflow*) dan aliran uang keluar (*outflow*) ke KBI di wilayah Jawa Barat, secara triwulanan mengalami peningkatan. Sementara itu, nilai dan volume transaksi pembayaran melalui kliring di wilayah Jawa Barat juga mengalami peningkatan. Demikian juga dengan nilai dan volume transaksi pembayaran melalui Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), untuk wilayah Jawa Barat, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

1. PENGEDARAN UANG KARTAL

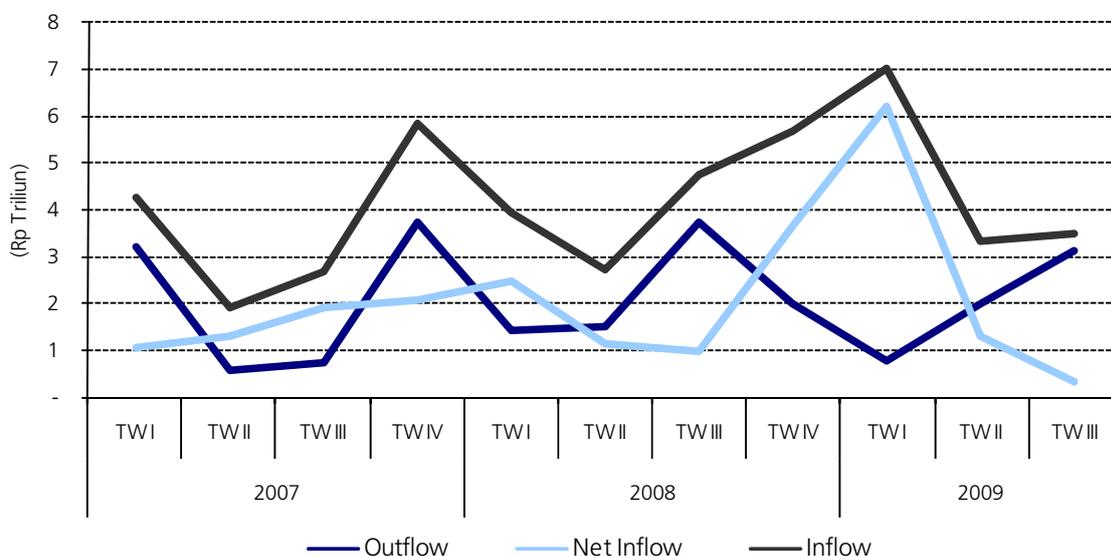
1.1. Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (*Inflow/Outflow*)

Perkembangan aliran uang kartal pada triwulan III-2009 di wilayah kerja KBI Bandung, Tasikmalaya dan Cirebon tetap mengalami *net inflow*. Artinya jumlah aliran uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia (*inflow*) lebih besar dibandingkan dengan jumlah aliran uang kartal yang keluar ke masyarakat (*outflow*). Pada triwulan III-2009, *inflow* di KBI wilayah Jawa Barat naik sebesar 11,08% (qtq) namun secara tahunan mengalami penurunan 21,91% (yoy) menjadi Rp3,71 triliun, sementara *outflow* di KBI wilayah Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 56,29% (qtq) namun turun secara tahunan 16,25% (yoy) menjadi Rp3,14 triliun (Grafik 5.1). Peningkatan *inflow* pada triwulan laporan merupakan siklus yang biasa terjadi setelah pada triwulan sebelumnya terjadi *outflow* yang cukup tinggi.

Peningkatan *inflow* di KBI wilayah Jawa Barat pada triwulan III-2009 disebabkan oleh meningkatnya *inflow* di KBI Bandung sebesar 46,24% (qtq) menjadi Rp2,53 triliun dan KBI Tasikmalaya sebesar 26,67% menjadi Rp0,19 triliun; Sedangkan di KBI Cirebon *inflow* turun 32,19% menjadi Rp0,99 triliun. Demikian pula *outflow* di KBI wilayah Jawa Barat pada triwulan III-2009 meningkat akibat dari peningkatan *outflow* di KBI Bandung sebesar 103,08% (qtq) menjadi Rp2,74 triliun dan KBI Tasikmalaya 50% (qtq) menjadi Rp0,03 triliun; sedangkan di KBI Cirebon turun sebesar 42,19% (qtq) menjadi Rp0,37 triliun.

Pada triwulan III-2009, kegiatan transaksi sistem pembayaran tunai di KBI Bandung, KBI Cirebon dan KBI Tasikmalaya mengalami perkembangan yang bervariasi. KBI Bandung mengalami *net outflow* sebesar Rp0,21 triliun. Sedangkan KBI Cirebon dan KBI Tasikmalaya mengalami *net inflow*, masing-masing adalah sebesar Rp0,62 triliun dan Rp0,16 triliun.

Grafik 5.1. Perkembangan *Inflow* dan *Outflow* Uang Kartal Di Jawa Barat



Sumber: KBI Bandung, KBI Tasikmalaya & KBI Cirebon

Selama triwulan III-2009, uang kertas yang keluar dari KBI Bandung mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Tabel 5.1). Secara nominal, uang kertas yang keluar dari KBI Bandung selama triwulan III-2009 adalah sebesar Rp2,81 triliun atau naik 108,36% (qtq), sedangkan uang logam yang keluar mencapai Rp1,993 miliar atau naik 68,58% (qtq). Sementara itu, jumlah bilyet uang kertas yang keluar mencapai 88,12 juta bilyet atau naik 188,06% (qtq), serta uang logam mencapai 5,12 juta keping atau naik 56,36% (qtq).

Tabel 5.1. Perkembangan *Outflow* Uang Kertas dan Uang Logam melalui KBI Bandung

Jenis Pecahan	Tw. II-2009		Tw. III-2009		Pertumbuhan (qtq)	
	Nominal (Rp Juta)	Bilyet/Keping (Juta)	Nominal (Rp Juta)	Bilyet/Keping (Juta)	Nominal	Bilyet/Keping
Uang Kertas						
100.000	640.963,10	6,41	1.365.332,90	13,65	113,01%	113,01%
50.000	618.570,25	12,37	1.106.006,45	22,12	78,80%	78,80%
20.000	38.097,60	1,90	157.343,86	7,87	313,00%	313,00%
10.000	13.701,15	1,37	66.233,70	6,62	383,42%	383,42%
5.000	35.959,91	7,19	74.238,63	14,85	106,45%	106,45%
2.000	-	-	35.730,59	17,87	n/a	n/a
1.000	1.343,28	1,34	5.145,47	5,15	283,05%	283,05%
Total	1.348.635,29	30,59	2.810.031,60	88,12	108,36%	188,06%
Uang Logam						
1.000	204,00	0,20	286,01	0,29	40,20%	40,20%
500	822,92	1,65	1.510,26	3,02	83,52%	83,52%
200	48,00	0,24	41,49	0,21	-13,56%	-13,56%
100	98,50	0,99	150,56	1,51	52,85%	52,85%
50	8,03	0,16	5,10	0,10	-36,49%	-36,49%
25	1,00	0,04	-	-	-100,00%	-100,00%
Total	1.182,45	3,28	1.993,42	5,12	68,58%	56,36%

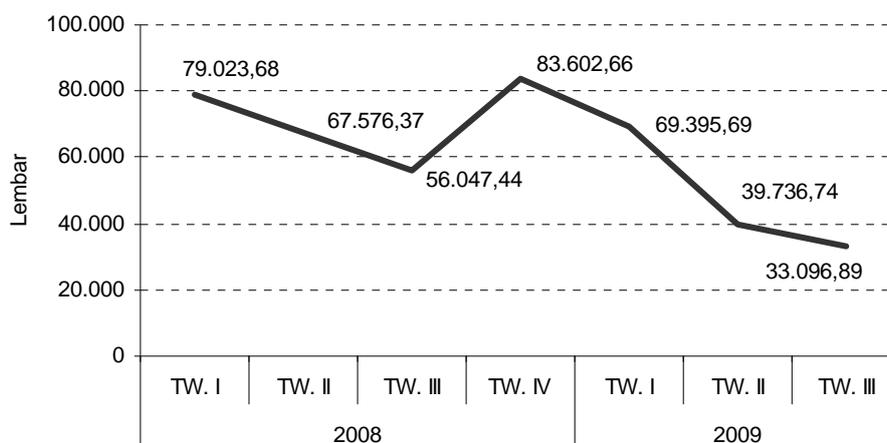
Sumber: KBI Bandung

1.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Bank Indonesia secara berkesinambungan melakukan pemusnahan atau kegiatan pemberian tanda tidak berharga (PTTB) terhadap uang kartal yang sudah tidak layak edar (lusuh/rusak) sebagai upaya untuk memelihara kualitas uang kartal yang diedarkan di masyarakat (*clean money policy*).

Selama triwulan III-2009, KBI Bandung melakukan pemusnahan uang kertas sebanyak 33,10 juta lembar atau turun 16,71% (qtq) (Grafik 5.2). Berdasarkan jumlah lembar yang dimusnahkan, yang paling banyak adalah pecahan Rp1.000, Rp5.000, Rp20.000, dan Rp10.000 masing-masing sebesar 28,71%, 27,16%, 15,98%, dan 12,77%. Sementara itu, KBI Tasikmalaya melakukan pemusnahan uang kertas sebanyak 4,60 juta lembar atau turun 11,30% (qtq), dan KBI Cirebon melakukan pemusnahan uang kertas sebanyak 141,24 juta lembar atau naik 381,53% (qtq).

Grafik 5.2. Perkembangan PTTB Kantor Bank Indonesia Bandung



Sumber: KBI Bandung

1.3. Uang Palsu

Selama triwulan III-2009, KBI Bandung telah menemukan uang rupiah palsu di wilayah kerjanya sebanyak 2.731 lembar atau naik 987 lembar dibandingkan triwulan sebelumnya. Pecahan uang palsu yang paling banyak ditemukan selama triwulan III-2009, adalah uang kertas pecahan Rp50.000 yaitu sebanyak 55,73% dari total lembar uang palsu yang ditemukan. Meskipun demikian, KBI Bandung terus berupaya menekan perkembangan peredaran uang palsu, diantaranya melalui sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada semua lapisan masyarakat, menyediakan sarana informasi *hotline service*, serta iklan layanan masyarakat.

2. SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

2.1 Kliring lokal

Pada triwulan III-2009, transaksi sistem pembayaran non tunai melalui kliring di wilayah Jawa Barat, baik secara nominal maupun volume mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Rata-rata nominal transaksi kliring per bulan pada triwulan III-2009 naik 2,50% (qtq), namun turun secara tahunan sebesar 7,32% (yoy) menjadi Rp10,64 triliun. Sementara itu, rata-rata volume transaksi kliring per bulan pada triwulan III-2009, adalah sebanyak 484.106 warkat, naik sebesar 1,52% (qtq) namun turun secara tahunan 11,06% (yoy) (Tabel 5.2).

Tabel 5.2. Perkembangan Transaksi Kliring Lokal Rata-rata per Bulan di Jawa Barat

Keterangan	2008				2009			Pertumbuhan (%)	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	qtq	yoy
Nominal (Rp Triliun)	9,60	10,23	11,48	10,93	9,94	10,38	10,64	2,50	-7,32
Volume (Lembar)	506.234	516.866	544.327	479.764	504.311	476.875	484.106	1,52	-11,06

Sumber: Website BI

2.2 Real Time Gross Settlement (RTGS)

Transaksi RTGS masih mendominasi sistem pembayaran non tunai di Jawa Barat. Hal ini disebabkan BI RTGS mempunyai keunggulan dalam kecepatan penyelesaian transaksi (seketika) dan risiko penyelesaian transaksi yang dapat diperkecil. Perkembangan penyelesaian rata-rata nominal dan volume transaksi RTGS per bulan (dari dan ke Jawa Barat), selama triwulan III-2009, mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Selama triwulan III-2009, rata-rata nominal transaksi RTGS per bulan adalah sebesar Rp53,18 triliun atau naik 15,07% (qtq), dan rata-rata volume transaksi RTGS per bulan adalah sebanyak 77.648 transaksi atau naik 18,53% (qtq) (Tabel 5.3). Total nominal dan volume transaksi RTGS pada triwulan III-2009, masing-masing sebesar Rp159,53 triliun dan 232.945 transaksi.

Tabel 5.3. Perkembangan Transaksi RTGS di Jawa Barat

Bulan	From		To		From + To	
	Nominal (Triliun Rp)	Volume	Nominal (Triliun Rp)	Volume	Nominal (Triliun Rp)	Volume
Juli	18,57	17.863	22,85	22.783	41,42	40.646
Agustus	17,03	24.448	24,69	26.711	41,73	51.159
September	23,42	30.286	33,87	42.343	57,29	72.629
Rata2 Tw III-08	19,67	24.199	27,14	30.612	46,81	54.811
Oktober	22,58	30.134	29,15	34.648	51,73	64.782
November	19,92	31.860	26,86	36.797	46,78	68.657
Desember	23,59	38.451	34,20	45.509	57,79	83.960
Rata2 Tw IV-08	22,03	33.482	30,07	38.985	52,10	72.466
Januari	17,58	25.993	24,19	33.736	41,77	59.729
Februari	18,33	29.266	22,77	34.240	41,10	63.506
Maret	18,73	31.282	28,97	34.346	47,70	65.628
Rata2 Tw I-09	18,21	28.847	25,31	34.107	43,52	62.954
April	20,58	31.562	27,91	32.396	48,49	63.958
Mei	16,52	28.440	23,16	36.509	39,68	64.949
Juni	21,33	31.807	29,14	35.819	50,47	67.626
Rata2 Tw II-09	19,48	30.603	26,74	34.908	46,21	65.511
Juli	25,54	36.708	32,92	46.480	58,46	83.188
Agustus	19,18	32.520	30,45	47.482	49,63	80.002
September	20,17	30.164	31,27	39.591	51,44	69.755
Rata2 Tw III-09	21,63	33.130.667	31,55	44.518	53,18	77.648
Pertumbuhan	11,06%	8,26%	17,99%	27,53%	15,07%	18,53%

Sumber: www.bi.go.id

BAB 6

PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH



Sejalan dengan mebaiknya perekonomian di Jawa Barat pada triwulan III-2009, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat diperkirakan mengalami perkembangan yang positif. Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di Jawa Barat diperkirakan sudah terindikasikan mengalami peningkatan, khususnya untuk kedua sektor dominan di Jawa Barat, yaitu industri pengolahan dan perdagangan, hotel, dan restoran. Kondisi ini ditunjukkan oleh hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha, dimana terjadi peningkatan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) untuk indikator jumlah karyawan pada triwulan III-2009. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang mengalami rasionalisasi, baik PHK maupun dirumahkan, diperkirakan sudah berhenti.

Dari sisi kesejahteraan, kesejahteraan petani di Jawa Barat terindikasikan meningkat. Hal ini diindikasikan oleh kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Barat, yang menggambarkan kesejahteraan petani, pada bulan September 2009 (triwulan III-2009), yang tumbuh sebesar 1,61% (yoy). Nilai tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan NTP pada bulan Juni 2009 (triwulan II-2009) yang sebesar 0,57% (yoy)

1. KETENAGAKERJAAN

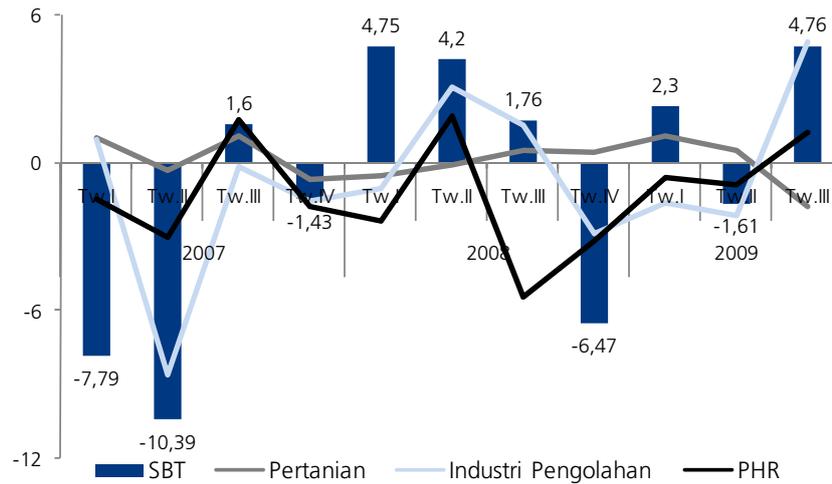
Keadaan Ketenagakerjaan Jawa Barat

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat pada triwulan III-2009 diperkirakan mengalami perkembangan yang positif. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi di Jawa Barat pada periode tersebut. Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh KBI Bandung, nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) untuk indikator realisasi jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan, yaitu dari sebelumnya mengalami penurunan sebesar 1,61, pada triwulan III-2009 maupun tumbuh positif dan cukup signifikan, yaitu sebesar 4,76. Sejalan dengan pergerakan pertumbuhan dua sektor dominan di Jawa Barat, yaitu sektor industri pengolahan dan perdagangan, hotel, dan restoran, penyerapan tenaga kerja di kedua sektor tersebut pun mengalami peningkatan, yang dicerminkan oleh nilai SBT kedua sektor tersebut yang meningkat cukup signifikan pada triwulan III-2009. Sementara itu, ekspektasi jumlah tenaga kerja yang terserap pada triwulan IV-2009 juga mengalami peningkatan, dengan nilai SBT indikator tersebut sebesar 6,34. Peningkatan ekspektasi tenaga kerja tersebut terjadi di ketiga sektor dominan di Jawa Barat, yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel, dan restoran, serta pertanian.

Laju penambahan jumlah rasionalisasi tenaga kerja akibat krisis keuangan global diperkirakan sudah berhenti. Berdasarkan data dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah tenaga kerja yang di-PHK di Jawa Barat pada 11 September 2009, adalah sebanyak 3.454 orang, sedangkan tenaga kerja yang dirumahkan adalah sebanyak 800 orang. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan kondisi pada akhir triwulan II-2009 (256 Juni 2009). Dengan demikian, aksi PHK dan perumahan tenaga kerja di Jawa Barat yang merupakan isu krusial selama krisis keuangan global diperkirakan sudah berhenti.

Sementara itu, terhitung Juli 2008 hingga Juli 2009, sebanyak 246.326 tenaga kerja asal Jawa Barat terserap. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, tenaga kerja tersebut terserap di berbagai lowongan kerja, mulai Antar Kerja Antar Daerah (1.811 orang), Antar Kerja Antar Negara (16.647 orang), dan Antar Kerja Lokal (227.868 orang). Melihat hasil tersebut, target penyerapan tenaga kerja sebanyak 302.000 orang pada tahun 2009 diperkirakan dapat tercapai.

Grafik 6.1. Saldo Bersih Tertimbang Indikator Jumlah Karyawan



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, KBI Bandung

2. KESEJAHTERAAN

Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan

Berdasarkan SUSEDA (Survei Sosial Ekonomi Daerah) BPS Jawa Barat, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mengalami penurunan. Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan¹ di Jawa Barat pada Maret 2009 berjumlah 4.983.570 orang atau 11,96% dari total penduduk, menurun dibandingkan kondisi pada Maret 2008 yang berjumlah 5.322.440 orang atau 13,01%. Dengan demikian, penduduk miskin Jawa Barat turun 338.870 orang atau 1,05%.

Penurunan kemiskinan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan turun 252.810 orang atau turun 1,77%. Sementara itu, penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan sebanyak 86.050 orang atau turun 0,55%. Sebanyak 49,21% penduduk miskin di Jawa Barat merupakan penduduk yang tinggal di daerah pedesaan, menurun dibandingkan periode Maret 2008 yang sebesar 50,82%.

Sebagai salah satu langkah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung, Bantuan Khusus Walikota Bidang Kemakmuran (Bawaku Makmur) dicairkan. Bantuan tersebut diberikan

¹ Garis kemiskinan naik sebesar 8,95%, yaitu dari Rp176.216/kapita/bulan pada Maret 2008 menjadi Rp191.985/kapita/bulan pada Maret 2009. Besarnya nilai Garis Kemiskinan Makanan (GKM) pada Maret 2009 adalah sebesar Rp138.275, sementara Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) sebesar Rp53.710.

oleh walikota dan diperuntukkan kepada 13.525 warga Kota Bandung. Adapun bantuan tersebut dijadwalkan mulai dicairkan setiap hari sejak akhir Agustus 2009 hingga 16 Oktober 2009.

Kesejahteraan Petani

Seiring dengan semakin meningkatnya sektor pertanian, tingkat kesejahteraan petani pada triwulan III-2009 meningkat dibandingkan triwulan II-2009. Kondisi ini diindikasikan oleh Nilai Tukar Petani (NTP) yang menunjukkan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks yang dibayar petani. NTP di Jawa Barat pada bulan September 2009 (triwulan III-2009) tumbuh sebesar 1,61% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan NTP pada bulan Juni 2009 (triwulan II-2009) yang sebesar 0,57% (yoy) (Tabel 6.3). Peningkatan pertumbuhan NTP tersebut disebabkan indeks yang dibayar petani mengalami penurunan pertumbuhan, yaitu dari 8,00% (yoy) menjadi 6,19% (yoy), dibandingkan penurunan pertumbuhan indeks yang diterima petani dari 8,62% (yoy) menjadi 7,91% (yoy). Apabila dilihat lebih detail, hampir seluruh komponen indeks harga yang dibayar petani mengalami penurunan pertumbuhan, kecuali sandang dan transportasi.

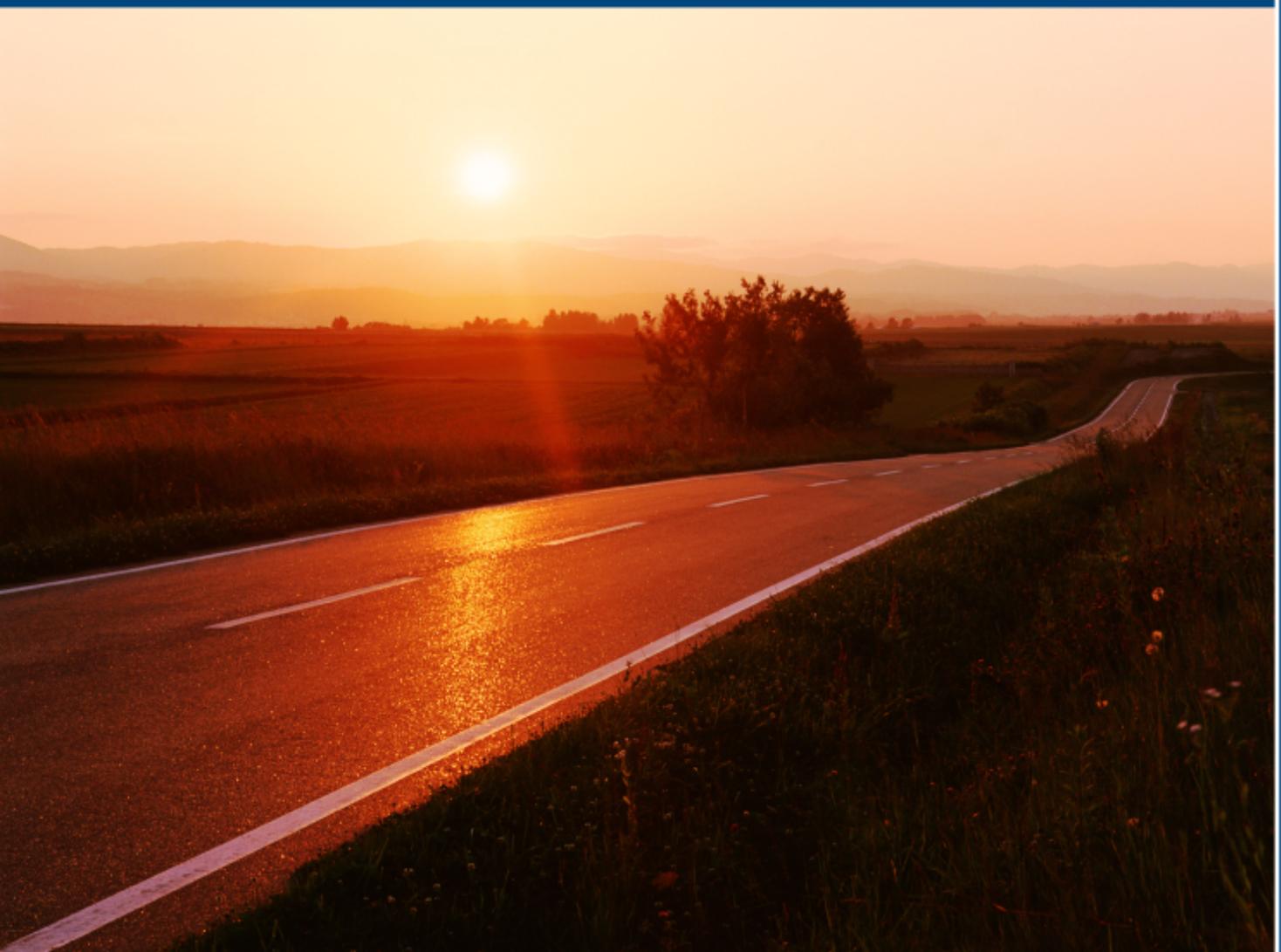
**Tabel 6.1. Nilai Tukar Petani di Jawa Barat
Bulan Juni dan September 2009 (2007 = 100)**

No.	Sektor, Kelompok, & Subkelompok	Jun-09		Sep-09	
		Indeks	Pertumbuhan (yoy)	Indeks	Pertumbuhan (yoy)
1	Indeks harga yang diterima petani	117,79	8,62%	122,76	7,91%
2	Indeks harga yang dibayar petani	122,23	8,00%	124,74	6,19%
2.1.	Konsumsi Rumah Tangga	123,88	8,98%	126,96	6,90%
	- Bahan Makanan	122,71	5,70%	127,25	4,56%
	- Makanan Jadi	120,59	8,69%	121,93	7,79%
	- Perumahan	139,11	21,50%	141,59	13,49%
	- Sandang	119,31	10,37%	122,5	10,53%
	- Kesehatan	118,33	10,75%	119,51	9,56%
	- Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	117,22	8,75%	118,9	8,03%
	- Transportasi & Komunikasi	112,2	-0,96%	113,15	-1,37%
2.2.	Biaya Produksi & Penambahan Barang Modal	117,11	5,18%	117,85	4,38%
	- Bibit	115,98	6,25%	116,69	5,13%
	- Obat-obatan & Pupuk	112,34	3,60%	112,72	2,53%
	- Sewa Lahan, Pajak & Lainnya	117,02	8,59%	117,24	8,44%
	- Transportasi	113,73	-3,48%	114,15	-3,14%
	- Penambahan Barang Modal	119,72	7,76%	121,6	6,79%
	- Upah Buruh Tani	118,77	5,93%	119,71	5,42%
3	Nilai tukar petani (NTP)	96,37	0,57%	98,41	1,61%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

BAB 7

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

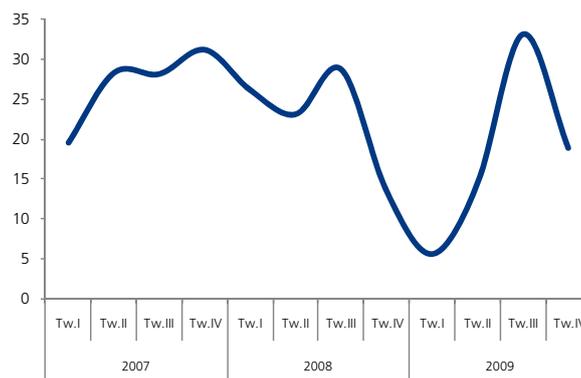


2.

1. PROSPEK EKONOMI MAKRO

Prospek perekonomian Jawa Barat ke depan, khususnya pada triwulan IV-2009, berpotensi tumbuh meningkat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada periode tersebut diperkirakan sebesar 4,3% (yoy), meningkat dibandingkan perkiraan pertumbuhan pada triwulan III-2009 yang sebesar 3,6%. Peningkatan tersebut tercermin dari optimisme para pelaku usaha, yang diperoleh berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha KBI Bandung. Nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) untuk ekspektasi kegiatan usaha, adalah sebesar 18,82 pada triwulan IV-2009, yang menunjukkan adanya peningkatan kegiatan usaha yang dilakukan dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2008, yang sebesar 13,42. Kenaikan SBT tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kegiatan dunia usaha pada triwulan IV-2009 lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, sehingga perekonomian Jawa Barat diperkirakan tumbuh membaik pada triwulan mendatang.

Grafik 7.1. Ekspektasi Kegiatan Dunia Usaha



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) KBI Bandung

Dilihat dari sisi permintaan, kenaikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2009 didorong oleh perbaikan pada komponen investasi dan ekspor. Optimisme perbaikan ekonomi diperkirakan dapat mendorong investasi tumbuh meningkat. Iklim kepastian usaha yang kondusif akibat terbentuknya pemerintahan Indonesia yang baru, perizinan yang semakin sederhana, serta perbaikan yang terjadi pada sisi eksternal, merupakan beberapa faktor pendorong peningkatan investasi. *Outlook* positif terhadap perekonomian Indonesia, seperti terlihat dari peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia, diperkirakan turut mendorong investor asing untuk mengalirkan modalnya ke Indonesia, khususnya Jawa Barat, sebagai salah satu daerah dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia. Sementara itu, tren pemulihan ekonomi global diperkirakan mampu mendorong perbaikan kinerja ekspor Jawa Barat, walaupun masih belum dapat dikatakan pulih seperti masa sebelum krisis keuangan global. Hal tersebut diindikasikan oleh permintaan ekspor produk asal Jawa Barat, yang hingga saat ini terus menunjukkan tren perbaikan. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan periode sebelumnya.

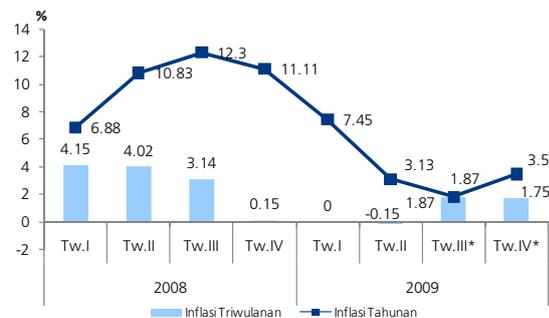
Dari sisi penawaran, peningkatan pertumbuhan ditopang oleh perbaikan kinerja di sektor industri pengolahan, sebagai kontributor utama perekonomian Jawa Barat. Kondisi ekonomi yang mulai menunjukkan tren pemulihan menciptakan optimisme iklim dunia usaha. Para pelaku usaha memberikan respons positif melalui peningkatan utilisasi kapasitas produksi, terutama industri mesin, alat angkutan, dan peralatannya, serta industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki. Peningkatan tersebut sudah mulai terasa memasuki akhir tahun 2009 ini, demi memenuhi kembali meningkatnya permintaan terhadap produk-produk industri pengolahan, terutama yang berasal dari eksternal. Sementara itu, dua sektor dominan lainnya, sektor pertanian dan perdagangan diperkirakan mengalami pertumbuhan yang melambat pada triwulan IV-2009. Kondisi iklim yang kembali normal, tidak sekondusif periode-periode sebelumnya, mengakibatkan perlambatan pada sektor pertanian. Hal ini ditunjukkan oleh Angka Ramalan II BPS, dimana luas panen padi pada *subround* III (September s.d. Desember 2009) mengalami pertumbuhan yang relatif stagnan, yaitu 0,4% (yoy). Kondisi ini berbeda dibandingkan pertumbuhan pada dua *subround* sebelumnya, yang mampu mencetak pertumbuhan luas panen sebesar 3,2% dan 6,5%. Namun demikian, produksi padi diperkirakan masih cukup aman pada tahun 2009 ini, akibat dampak kekeringan di tahun 2009 yang tidak sebesar tahun 2008. Sementara itu, sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) juga diperkirakan mengalami sedikit perlambatan. Selain akibat tidak adanya faktor-faktor spesial pendorong aktivitas perdagangan di Jawa Barat, jumlah hari libur di triwulan IV-2009 yang lebih sedikit dibandingkan periode yang sama di tahun 2008 mengakibatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jawa Barat diperkirakan mengalami penurunan, yang selanjutnya memperlemah kinerja sektor PHR pada triwulan yang dimaksud.

2. PRAKIRAAN INFLASI

Inflasi triwulan IV-2009 atau inflasi tahun 2009 Jawa Barat diperkirakan akan menjadi titik awal tren peningkatan laju inflasi, yakni dari 1,38% (yoy) menjadi berkisar antara 3% hingga 4% (Grafik 7.2). Naiknya laju inflasi tahunan tersebut disebabkan oleh pengaruh *administered price* yang telah kembali normal. Namun demikian, perkiraan laju inflasi tersebut masih lebih kecil daripada inflasi musiman tahunan Jawa Barat yang berada dalam kisaran 5% hingga 5,5%.

Laju inflasi tahun Jawa Barat yang berada di bawah persistensi inflasinya akibat penurunan seluruh faktor fundamental dan non-fundamental. Rendahnya laju inflasi tahun 2009 terutama disebabkan oleh tekanan eksternal dan interaksi permintaan-penawaran yang lemah, serta hasil panen bahan makanan yang lebih baik. Sementara, *administered price* naik, yakni untuk harga gas elpiji dan tarif beberapa ruas tol.

Grafik 7.2. Perkembangan dan Prakiraan Inflasi Jawa Barat Tahun 2009



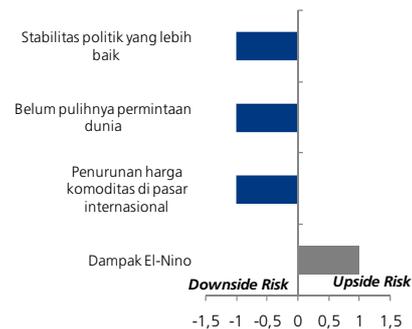
Sumber: BPS, diolah

Keterangan: *) Proyeksi inflasi KBI Bandung dengan kisaran kurang lebih 1% setiap triwulannya

Di lain pihak, inflasi triwulanan Jawa Barat diperkirakan akan turun dari 1,87% (qta) pada triwulan III-2009 menjadi pada kisaran 1,7% hingga 1,8% pada triwulan IV-2009 (Grafik 7.2). Hal ini disebabkan oleh pengaruh hari besar keagamaan nasional yang terkendali dan kondisi eksternal yang stabil. Hari raya Idul Adha jatuh pada triwulan IV-2009 dan dapat memicu inflasi meskipun dengan pengaruh yang relatif kecil dibandingkan dengan bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Selain itu, ekonomi global yang sedang dalam tahap pemulihan akan tetap menjaga kondisi eksternal relatif stabil.

Namun demikian, inflasi triwulan IV-2009 diperkirakan dapat mencapai kisaran batas atas proyeksi. Tekanan atas laju inflasi diperkirakan terutama akibat pengaruh El-Nino yang terjadi setiap 3 hingga 8 tahun sekali terhadap produksi bahan pangan serta kenaikan harga *administered price*. Pengaruh kenaikan tarif beberapa ruas tol dan harga gas elpiji non-PSO diduga juga dapat meningkatkan laju inflasi pada triwulan IV-2009.

Grafik 7.3 Upside & Downside Risk Proyeksi Inflasi Triwulanan Jawa Barat Pada Triwulan IV-2009



Sumber: Hasil *Judgment* Peneliti KBI Bandung

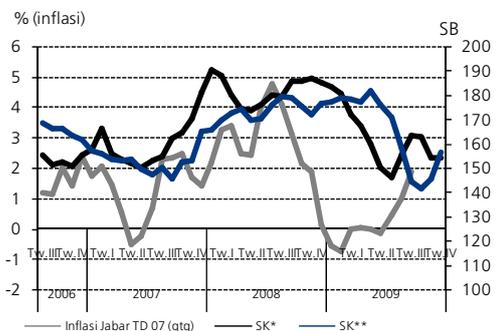
Faktor Fundamental

Faktor fundamental diperkirakan akan menjadi faktor penyebab turunnya laju inflasi triwulan Jawa Barat pada triwulan IV-2009. Ekspektasi inflasi masyarakat diduga akan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara, tekanan interaksi permintaan-penawaran akibat hari raya Idul Adha diperkirakan akan minimal meskipun pemulihan ekonomi global dapat mendorong kapasitas terpakai industri. Selain itu, tekanan eksternal diperkirakan akan relatif minimal karena apresiasi nilai tukar rupiah.

Ekspektasi inflasi konsumen dan pedagang eceran turun pada triwulan IV-2009 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Konsumen berpendapat bahwa harga akan cenderung turun pada triwulan IV-2009 sebagaimana terlihat dari hasil ekspektasi harga 3 bulan yang akan datang dalam Survei Konsumen yang sebesar 162,67 pada triwulan III-2009 menjadi 151,33 pada triwulan IV-2009 (Grafik 7.4). Hal ini disebabkan oleh pasokan barang dan jasa telah kembali normal setelah melewati bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

Grafik 7.4. Ekspektasi Konsumen Terhadap Harga Barang dan Jasa di Kota Bandung



Sumber: SK-KBI Bandung; BPS Provinsi Jawa Barat.

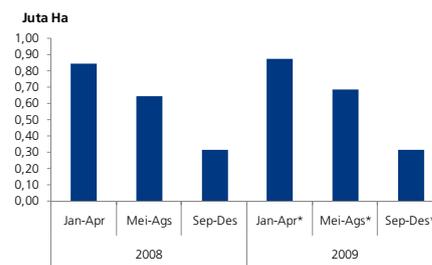
Keterangan: SK*=Ekspektasi konsumen terhadap harga pada bulan tsb. menurut SK pada 3 bulan sebelumnya (*Moving Average* 3 bulan); SK**= Ekspektasi konsumen terhadap harga pada bulan tsb. menurut SK 6 bulan sebelumnya (*Moving Average* 3 bulan);

Apresiasi nilai tukar dan harga komoditas strategis di pasar internasional diperkirakan menjadi penyebab laju inflasi Jawa Barat turun. Berdasarkan hasil *Consensus Forecast*, nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp9.500-9.700/USD pada triwulan IV-2009 atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III-2009 yang rata-rata sebesar Rp9.800/USD. Selain itu, harga komoditas strategis seperti kedelai, aluminium, dan minyak dunia diperkirakan relatif stagnan bahkan mengalami penurunan. Sementara itu, laju inflasi negara mitra dagang utama diperkirakan akan tetap rendah dan relatif stagnan.

Faktor Non Fundamental

Musim tanam yang terjadi pada triwulan IV-2009 akan mendorong inflasi kelompok bahan makanan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 7.5). Sebagaimana yang terjadi secara musiman, inflasi kelompok bahan makanan yang terbesar disumbangkan oleh padi akan mengalami inflasi yang cukup tinggi.

Grafik 7.5 Luas Lahan Panen Padi



Keterangan: * ARAM BPS
Sumber: BPS. diolah

Kenaikan harga gas elpiji non-PSO dan tarif beberapa ruas tol di Jawa Barat diperkirakan akan mendorong kenaikan *administered price*. Meskipun tarif beberapa ruas tol telah dinaikkan pada akhir bulan September 2009, pengaruh kenaikan tarif tersebut akan terasa pada triwulan IV-2009. Kenaikan tarif ruas tol juga diduga akan mendorong perilaku pengusaha angkutan penumpang maupun barang untuk menaikkan tarif. Selain itu, rencana Pertamina untuk meningkatkan harga gas elpiji secara bertahap hingga mencapai harga keekonomisannya diperkirakan akan mendorong tekanan inflasi hingga akhir tahun 2009.

LAMPIRAN

1. EKONOMI MAKRO

Tabel 1.A. Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Menurut Sektor Ekonomi (Miliar Rupiah)

SEKTOR EKONOMI	2008				2009		
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III*)
Pertanian	11.080	8.227	9.053	8.096	11.380	9.080	9.488
Pertambangan dan Penggalian	1.704	1.530	1.730	1.719	1.720	1.780	1.799
Industri Pengolahan	30.937	33.487	34.264	35.083	31.590	32.940	34.495
Listrik, Gas, dan Air Bersih	1.512	1.476	1.492	1.536	1.580	1.640	1.670
Bangunan	2.243	2.269	2.620	2.603	2.330	2.460	2.882
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	13.370	14.038	14.826	14.711	14.250	15.000	15.867
Pengangkutan dan Komunikasi	2.933	3.050	3.154	3.098	3.180	3.390	3.515
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	2.087	2.255	2.425	2.309	2.140	2.350	2.437
Jasa-jasa	4.693	4.680	4.827	4.879	4.820	4.870	4.878
PDRB	70.550	71.012	74.384	74.020	72.980	73.500	77.031

*) Proyeksi KBI Bandung

Tabel 1.B. Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Menurut Jenis Penggunaan (Miliar Rupiah)

SEKTOR EKONOMI	2008				2009		
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III*)
Konsumsi Rumah Tangga	45.636	45.930	47.733	48.000	48.890	48.600	50.600
Konsumsi Pemerintah	3.616	4.110	4.710	6.190	3.780	4.440	5.083
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	11.276	12.590	13.280	13.460	11.610	12.010	14.113
Lain-lain**)		3.042	1.307	2.980	5.910	5.520	1.924
Ekspor barang dan jasa	31.185	29.280	29.157	28.860	25.250	26.190	28.350
Dikurangi impor barang dan jasa	25.123	23.940	21.802	25.500	22.470	23.260	23.038
PDRB	70.545	71.012	74.384	74.020	72.980	73.500	77.031

*) Proyeksi KBI Bandung

***) Perubahan stok dan Deskrepansi statistik

2. INFLASI

Tabel 2.A. Perkembangan Inflasi IHK Tahun Dasar 2007 Bulanan (mtm) di Jawa Barat Menurut Kota dan Kelompok Barang dan Jasa Bulan Juli 2009 (%)

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Dpk	Bgr	Cn	Skbm	Tsm	
1	Bahan makanan	1.18	0.67	2.53	0.36	0.56	1.38	0.28	1.22
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	0.18	0.15	-0.03	0.39	-0.12	0.11	0.17	0.13
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	-0.01	0.00	0.18	-0.09	-0.04	-0.25	-0.04	0.02
4	Sandang	-2.01	0.04	-0.34	0.34	-0.84	-0.73	0.08	-0.74
5	Kesehatan	-0.01	0.00	-0.05	0.00	0.39	0.14	-0.16	0.00
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	1.75	3.17	0.17	0.00	-0.05	0.00	-0.03	1.49
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	-0.12	0.01	-0.20	0.01	0.14	0.00	0.21	-0.08
Umum		0.29	0.44	0.58	0.16	0.08	0.30	0.12	0.38

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

Keterangan: Bd= Bandung, Bks=Bekasi, Dpk=Depok, Bgr=Bogor, Cn=Cirebon, Skbm=Sukabumi, Ts=Tasikmalaya

Tabel 2.B. Perkembangan Inflasi IHK Tahun Dasar 2007 Bulanan (mtm) di Jawa Barat Menurut Kota dan Kelompok Barang dan Jasa Bulan Agustus 2009 (%)

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Dpk	Bgr	Cn	Skbm	Tsm	
1	Bahan makanan	1.14	1.79	1.36	1.15	1.66	1.22	0.59	1.40
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	0.94	0.34	0.30	0.70	1.28	0.45	0.08	0.59
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	-0.01	-0.01	-0.15	0.20	-0.05	0.16	0.09	-0.02
4	Sandang	-0.59	-0.06	0.10	0.15	0.11	-0.28	-0.28	-0.18
5	Kesehatan	0.23	0.48	-0.20	4.66	0.94	0.11	1.45	0.64
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	1.15	0.00	3.41	1.47	6.39	0.88	2.46	1.52
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	0.06	0.00	-0.14	0.73	1.57	0.01	-0.04	0.08
Umum		0.50	0.53	0.56	0.88	1.26	0.50	0.33	0.58

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.C Perkembangan Inflasi IHK Tahun Dasar 2007 Bulanan (mtm) di Jawa Barat Menurut Kota dan Kelompok Barang dan Jasa Bulan September 2009 (%)

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Dpk	Bgr	Cn	Skbm	Tsm	
1	Bahan makanan	1.79	2.06	3.75	1.29	3.23	0.60	1.40	2.27
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	1.13	1.42	1.17	1.12	1.00	0.37	0.76	-0.52
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	0.04	-0.69	0.04	0.06	0.13	0.02	0.04	-0.15
4	Sandang	1.86	0.72	1.13	0.11	2.63	-0.59	0.42	1.11
5	Kesehatan	0.17	0.26	0.08	0.04	0.03	-0.04	-0.03	0.14
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	0.05	0.02	0.02	0.11	0.00	1.99	0.07	0.09
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	0.78	0.62	0.63	0.49	0.23	0.89	1.01	0.66
Umum		0.84	0.78	1.27	0.66	1.14	0.44	0.64	0.90

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.D. Perkembangan Inflasi IHK Tahun Dasar 2007 Triwulanan (qtq) di Jawa Barat Menurut Kota dan Kelompok Barang dan Jasa Triwulan III-2009 (%)

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Dpk	Bgr	Cn	Skbm	Tsm	
1	Bahan makanan	4.16	4.58	7.83	2.82	5.54	3.23	2.28	4.96
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	2.27	1.91	1.44	2.23	2.17	0.94	1.01	0.20
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	0.02	-0.70	0.07	0.17	0.03	-0.07	0.09	-0.15
4	Sandang	-0.78	0.69	0.89	0.60	1.88	-1.59	0.22	0.18
5	Kesehatan	0.39	0.74	-0.17	4.71	1.36	0.22	1.26	0.78
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	2.98	3.19	3.61	1.58	6.34	2.89	2.50	3.12
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	0.72	0.63	0.29	1.24	1.94	0.90	1.19	0.66
Umum		1.64	1.76	2.43	1.72	2.49	1.25	1.09	1.87

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.E. Perkembangan Inflasi IHK Tahun Dasar 2007 Tahun Kalender (ytd) di Jawa Barat Menurut Kota dan Kelompok Barang dan Jasa Bulan September 2008 (%)

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Dpk	Bgr	Cn	Skbm	Tsm	
1	Bahan makanan	4.76	4.10	7.89	6.75	4.81	1.84	3.09	5.37
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	4.67	4.49	5.94	6.02	4.95	5.52	7.71	3.08
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	0.15	-0.91	-1.00	0.94	2.78	10.51	6.31	0.20
4	Sandang	4.39	2.12	3.42	1.75	6.89	0.33	2.90	3.20
5	Kesehatan	4.76	2.29	0.59	6.67	4.53	2.73	0.89	3.06
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	2.85	3.25	3.79	3.26	7.79	3.27	2.22	3.35
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	-5.53	-2.84	-6.80	-9.39	-2.75	-6.18	-2.63	-5.31
Umum		1.61	1.51	1.33	2.24	3.47	3.31	2.99	1.72

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

3. DATA PERBANKAN

Tabel 3.A. Indikator Bank Umum di Jawa Barat Posisi bulan Juni 2009 (Rp Triliun)

Bank Umum Konvensional

Pos Tertentu	2007				2008				2009	Pertumbuhan	
	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	q-t-q	y-o-y
Total Aset	118,82	122,65	124,99	136,39	133,59	139,72	145,03	154,91	162,80	5,09%	21,86%
DPK	92,24	95,80	95,91	105,57	101,76	105,98	107,03	117,76	123,03	4,48%	20,90%
Kredit bank pelapor	58,67	62,39	66,03	69,74	70,98	77,92	82,86	87,35	87,58	0,26%	23,39%
Kredit lokasi proyek	102,05	109,46	115,50	122,52	127,22	135,29	147,46	163,33	162,54	-0,48%	27,76%
LDR %	63,60	65,13	68,85	66,06	69,75	73,52	77,42	74,18	71,19		
Rasio NPLs (%)	4,31	4,13	3,92	3,44	3,78	3,63	3,57	3,52	3,99		

Sumber: LBU KBI Bandung

Bank Umum Syariah

Indikator	2007				2008				2009	Pertumbuhan	
	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	qtq	yoy
Total Aset (Rp Triliun)	3,32	3,41	3,55	4,07	4,10	4,73	4,91	5,25	5,23	-0,38%	27,56%
DPK (Rp Triliun)	2,46	2,5	2,59	3,14	3,21	3,73	3,65	3,97	4,09	3,02%	27,41%
Pembiayaan (Rp Triliun)	2,39	2,56	2,76	2,84	2,84	3,07	3,37	3,43	3,41	-0,58%	19,86%
- FDR (%)	96,97	102,21	106,77	90,34	88,40	82,28	92,21	86,26	86,26		
NPF (%)	6,6	8,2	7,87	5,83	5,63	5,14	4,81	3,55	2,92		

Sumber: LBU KBI Bandung

DAFTAR ISTILAH

<i>Administered price</i>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
<i>Imported inflation</i>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari pengaruh perkembangan harga di luar negeri (eksternal)
Indeks Ekspektasi Konsumen	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Indeks Pembangunan Manusia	Ukuran kualitas pembangunan manusia, yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup, yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Migas	Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.
Mtm	Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
<i>Perceived risk</i>	Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian sebuah negara
Qtq	<i>Quarter to quarter</i> . Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
<i>Share effect</i>	Kontribusi pangsa sektor atau subsektor terhadap total PDRB.

<i>Share of Growth</i>	Kontribusi suatu sektor ekonomi terhadap total pertumbuhan PDRB.
<i>Volatile food</i>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
<i>West Texas Intermediate</i>	Jenis minyak bumi yang menjadi acuan untuk transaksi perdagangan minyak dunia.
Yoy	<i>Year on year</i> . Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.